



**PERAN HAJI AGUS SALIM DALAM KONFLIK PERPECAHAN  
SAREKAT ISLAM TAHUN 1914-1936**

**SKRIPSI**

**Oleh**  
Nurma Helani  
NIM 150210302003

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH  
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2019**



**PERAN HAJI AGUS SALIM DALAM KONFLIK PERPECAHAN  
SAREKAT ISLAM TAHUN 1914-1936**

**SKRIPSI**

Diajukan guna memenuhi tugas akhir dan syarat untuk menyelesaikan program pendidikan strata satu (S1) pada program studi Pendidikan Sejarah dan mencapai gelar Sarjana Pendidikan

Oleh:  
**Nurma Helani**  
**NIM 150210302003**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH  
JURUSAN PENDIDIAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
2019**

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

1. Ibunda Kalimatusya'diah dan Ayahanda Suryanto tercinta yang selalu memberikan kasih sayang dan untaian doanya;
2. Kakakku Yunus Victu Risa dan Sri Astuti yang senantiasa memberi dukungan dan dorongan semangat kepada penulis;
3. Almamater Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember;
4. Guru-guru sejak Taman Kanak-Kanak hingga Sekolah Menengah Atas dan Bapak/Ibu Dosen yang telah membimbing, mengajarkan, dan membekali ilmu pengetahuan dengan penuh kesabaran, keikhlasan, dan tanggungjawab;
5. Sahabat Taman Kanak-Kanak sampai Perguruan Tinggi yang penulis banggakan.

**MOTTO**

*“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya”*

(terjemahan Surat Al-Baqarah ayat 286)<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> Departemen Agama Republik Indonesia. 2005. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Surabaya: CV. Karya Utama.

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurma Helani

NIM : 150210302003

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Peran Haji Agus Salim dalam Konflik Perpecahan Sarekat Islam Tahun 1914-1936” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 11 Desember 2019

Yang menyatakan,

Nurma Helani  
NIM 150210302003

**SKRIPSI**

**PERAN HAJI AGUS SALIM DALAM KONFLIK PERPECAHAN  
SAREKAT ISLAM TAHUN 1914-1936**

Oleh  
Nurma Helani  
NIM 150210302003

**Pembimbing**

Dosen Pembimbing Utama : Dr. Nurul Umamah, M.Pd.

Dosen Pembimbing Anggota : Dr. Sumardi, M.Hum.

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul “Peran Haji Agus Salim Dalam Konflik Perpecahan Sarekat Islam Tahun 1914-1936” telah diuji dan disahkan pada:

hari, tanggal : Rabu, 11 Desember 2019

tempat : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jember

Tim Penguji:

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Nurul Umamah, M.Pd  
NIP. 19690204 1993 2 008

Dr. Sumardi, M.Hum  
NIP. 19600518 198902 1 001

Anggota I,

Anggota II,

Drs. Marjono, M.Hum  
NIP. 19600422 198802 1 001

Dr. Mohammad Na'im, M.Pd.  
NIP. 19660328 200012 1 001

Mengesahkan

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Jember

Prof. Drs. Dafik, M.Sc. Ph.D.  
NIP. 19680802 199303 1 004

## RINGKASAN

**Peran Haji Agus Salim dalam Konflik Perpecahan Sarekat Islam Tahun 1914-1936**, Nurma Helani, 150210302003; 2019, xiii + 87; Program Studi Pendidikan Sejarah Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember.

Sarekat Dagang Islam (SDI) pada saat pembentukannya yang merupakan cikal bakal SI yang tidak ada sebuah kepastian (Noer, 1980:115). Organisasi ini didirikan pada akhir tahun 1911 atau awal tahun 1912 di Surakarta. Secara umum diterima bahwa gerakan ini dibentuk oleh H. Samanhudi, seorang penguasa batik yang mampu di Kampung Lawean, Solo (Korver, 1985:11). Sarekat Dagang Islam memakai dasar Islam. Islam diupayakan mampu mengganti tatanan pemerintahan Hindia Belanda yang deskriminatif. Selain itu, Islam dijadikan sebagai pembanding dari sistem pemerintahan Hindia Belanda. Dengan dasar Islam, SDI mampu tersebar luas tanpa terhalang oleh batas teritorial, suku, dan ras yang ada di Indonesia.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana latarbelakang terjadinya Konflik Perpecahan Sarekat Islam tahun 1914-1936?; (2) bagaimanakah peran Haji Agus Salim dalam menyelesaikan konflik internal dalam Sarekat Islam tahun 1914-1936?; dan (3) bagaimanakah dampak peran Haji Agus Salim dalam menyelesaikan konflik internal dalam Sarekat Islam tahun 1914-1936?. Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) untuk menganalisis latarbelakang terjadinya Konflik perpecahan Sarekat Islam tahun 1914-1936.; (2) untuk menganalisis peran Haji Agus Salim dalam menyelesaikan konflik internal dalam Sarekat Islam tahun 1914-1936; dan (3) untuk menganalisis dampak peran Haji Agus Salim dalam menyelesaikan konflik internal dalam Sarekat Islam tahun 1914-1936.

Manfaat dari penelitian ini adalah: (1) bagi peneliti, sebagai latihan dalam penelitian dan penulisan karya tulis ilmiah, latihan berfikir dan memecahkan masalah secara kritis dan logis, serta memperdalam pengetahuan tentang peran



Haji Agus Salim dalam menyelesaikan konflik internal dalam Sarekat Islam tahun 1914-1936; (2) bagi mahasiswa pendidikan sejarah, dapat menambah pengetahuan tentang peran Haji Agus Salim dalam menyelesaikan konflik internal dalam Sarekat Islam tahun 1914-1936; dan (3) bagi almamater, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan sebagai wujud nyata pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Dharma Penelitian; Jenis penelitian ini adalah penelitian sejarah Yokoh Perjuangan Bangsa Indonesia. Subyek dalam penelitian ini adalah Peran Haji Agus Salim dalam Penyelesaian Konflik Perpecahan dalam Sarekat Islam Tahun 1914-1936. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Penelitian Sejarah yang meliputi Heuristik, Kritik, Interpretasi dan Historiografi.

Kesimpulan dalam penelitian ini bahwa konflik yang terjadi dalam tubuh Sarekat Islam disebabkan oleh perbedaan ideology perjuangan antara SI Putih dan SI Merah. Sarekat Islam Putih, yaitu yang masih setia pada pimpinan dwitunggal HOS. Cokroaminoto dan Haji Agus Salim, sedangkan Sarekat Islam Merah mengikuti jejak Semaun dan Darsono yang menggantikan nama organisasinya Sarekat Rakyat sebagai onderbouw (susunan bawah) dari partai Komunis India. Cabang-cabang Sarekat Islam Merah memisahkan diri sebagai akibat penerapan disiplin partai yang melarang seseorang menjadi anggota lebih dari satu partai.

Konflik dalam pergerakan Sarekat Islam berdampak pada terpecahnya Sarekat Islam menjadi dua, yaitu Sarekat Islam Putih dan Sarekat Islam Merah. Fokus dari Sarekat Islam Putih adalah beralih dalam bidang pertahanan dan pembangunan Islam dan persatuan Umat Islam. Dampak selanjutnya Haji Agus Salim kemudian melancarkan gerakan Pan Islamisme. Maksudnya untuk mencari hubungan dan menghimpun segala kekuatan Islam yang ada di Indonesia dan mencari juga hubungan dengan gerakan Islam di luar negeri, sehingga dengan demikian Sarekat Islam mempunyai jiwa internasional. Untuk mewujudkan gerakan Pan Islamisme ini Sarekat Islam mencari bantuan kepada Muhammadiyah.

## PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah Swt, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Peran Haji Agus Salim dalam Konflik Perpecahan Sarekat Islam Tahun 1914-1936”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) dan Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Drs. Moh. Hasan, M.Sc. Ph.D., selaku Rektor Universitas Jember;
2. Prof. Drs. Dafik, M.Sc. Ph.D., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan;
3. Dr. Nurul Umamah, M.Pd. selaku ketua Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dan juga sebagai Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam penulisan skripsi ini;
4. Dr. Sumardi, M.Hum., selaku ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dan juga sebagai Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan memberikan saran dengan penuh kesabaran dalam penulisan skripsi ini;
5. Drs. Marjono, M. Hum. dan Dr. Mohammad Na'im, M.Pd., selaku dosen penguji yang telah meluangkan waktu, memberikan pengarahannya dan saran dalam penulisan skripsi ini;
6. Bapak dan Ibu Dosen yang memberikan bekal ilmu selama menyelesaikan studi di Pendidikan Sejarah;
7. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember yang telah banyak membantu penulisan selama studi;
8. Keluarga besar Bapak Suryanto, Ibu Kalimatusya'diah, kakak Yunus Victu Risa dan Sri Astuti, adik Ega Rangga, Thalita, dan Ammar yang telah memberikan dukungan dan do'anya demi terselesaikannya skripsi ini;

9. Sahabat tercinta Qurota A'yun, Rita Yulia, Gilang Nur Rohman, Aprilio Riardo M., dan Exo.
10. Sahabat-sahabatku Kai, Chanyeol, sehun, kyungso, suho, minseok, xiying, jongdae, baekhyun, Mei Dian, Bayu, Intan, Nawang, Sigit, Agung, Dhanang, dan Nala, Ina, Bahrur, Fajar, serta semua teman-teman pendidikan sejarah 2015 yang selalu memberikan dorongan semangat;

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, 11 Desember 2019

Penulis

**DAFTAR ISI**

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>PRAKATA .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Penegasan Judul .....	7
1.3 Ruang Lingkup Penelitian .....	9
1.4 Rumusan Masalah .....	9
1.5 Tujuan Penelitian .....	10
1.6 Manfaat Penelitian .....	10
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
2.1 Penelitian Terdahulu .....	11
2.2 Pendekatan Penelitian .....	17
2.3 Teori Penelitian .....	18
<b>BAB 3. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>23</b>
3.1 Heuristik .....	23
3.2 Kritik .....	24
3.3 Interpretasi .....	27
3.4 Historiografi .....	29
<b>BAB 4. LATAR BELAKANG DAN PROSES TERJADINYA KONFLIK</b>	
<b>INTERNAL SAREKAT ISLAM TAHUN 1914-1936 .....</b>	<b>31</b>
4.1 Perbedaan Ideologi .....	33

4.1.1 Gerakan Pan-Islamisme .....	39
4.1.2 Gerakan Sosialisme Islam .....	42
4.2 Proses Terjadinya Konflik .....	48
4.2.1 Konflik Masa-Masa Awal .....	48
4.3 Akhir Konflik .....	53
<b>BAB 5. PERAN HAJI AGUS SALIM DALAM PENYELESAIAN KONFLIK INTERNAL SAREKAT ISLAM TAHUN 1914-1936 .....</b>	<b>57</b>
5.1 Posisi Haji Agus Salim sebagai Ketua Partai .....	58
5.2 Haji Agus Salim dan Gerakan Disiplin Partai .....	63
5.3 Haji Agus Salim dan Gerakan Politik Hijrah .....	72
<b>BAB 6. DAMPAK PENYELESAIAN KONFLIK INTERNAL SAREKAT ISLAM TAHUN 1914-1936 .....</b>	<b>77</b>
6.1 Pemecatan Pendukung Haji Agus Salim .....	78
6.2 Munculnya Partai Baru .....	81
6.4 Pecahnya Sarekat Islam .....	84
<b>BAB 7. PENUTUP .....</b>	<b>93</b>
7.1 Simpulan .....	93
7.2 Saran .....	94
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>95</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>99</b>

## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Memasuki abad XX, kolonialisme di Hindia Belanda memasuki masa kulminasi. Pemerintah kolonial telah berkembang dalam tahap yang lebih mapan. Alih-alih menjadi upaya untuk membalas budi pada pribumi, kebijakan Politik Etis justru makin menguatkan posisi pemerintah kolonial untuk terus melanjutkan kekuasaannya atas Hindia Belanda. Di satu sisi, perkembangan kontra-kolonialisme juga memasuki tahap baru, yakni dengan perubahan corak pergerakan rakyat. Perubahan corak ini ditandai dengan adanya upaya tersistematisasi dalam berbagai lembaga pergerakan yang memiliki tujuan dan langkah-langkah strategis yang lebih jelas dibanding masa-masa sebelumnya.

Munculnya gerakan-gerakan yang lebih terstruktur dan terorganisasi menjadi sebuah model pergerakan baru yang sangat berpengaruh terhadap dinamika sejarah pada paruh pertama abad XX. Berbagai organisasi dengan beragam latar belakang muncul. Tidak terkecuali organisasi yang membawa predikat Islam.

Salah satu organisasi berpredikat Islam yang berkembang dan dengan cepat menarik perhatian rakyat adalah Sarekat Islam (SI). Pada tahun 1914, anggota SI berjumlah 444.251. Pada bulan Oktober 1918 Kongres Ketiga Sarekat Islam dihadiri oleh 450.000 anggotanya. Pada tahun 1919, SI menyatakan bahwa mempunyai 2 juta anggota (Suhartono, 1994; Kahin, 1995.; Riklefs, 1991:). Sarekat Islam bermula dari Sarekat Dagang Islam yang didirikan pada tahun 1911 oleh H. Samanhudi di Solo, yang merupakan cabang dari SDI bentukan R.M. Tirta Adisuryo di Batavia. SDI memiliki semboyan “kebebasan ekonomi, rakyat tujuannya, Islam jiwanya” (Utomo, 1995: 62-67).

Sarekat Dagang Islam (SDI) Pada saat pembentukannya yang merupakan cikal bakal SI yang tidak ada sebuah kepastian (Noer, 1980:115). Organisasi ini didirikan pada akhir tahun 1911 atau awal tahun 1912 di Surakarta. Secara umum diterima bahwa gerakan ini dibentuk oleh H. Samanhudi, seorang penguasa batik yang mampu di Kampung Lawean, Solo (Korver, 1985:11). Sarekat Dagang Islam memakai dasar Islam. Islam diupayakan mampu mengganti tatanan pemerintahan

Hindia Belanda yang deskriminatif. Selain itu, Islam dijadikan sebagai pembanding dari sistem pemerintahan Hindia Belanda. Dengan dasar Islam, SDI mampu tersebar luas tanpa terhalang oleh batas teritorial, suku, dan ras yang ada di Indonesia.

Tanggal 10 September 1912, organisasi ini mendapat pengakuan dari Pemerintah Hindia Belanda dan kata “*dagang*” dihapuskan sehingga nama Sarekat Dagang Islam (SDI) menjadi Sarekat Islam (SI). Organisasi ini akhirnya dipimpin oleh H.O.S. Cokroaminoto dari Surabaya menggantikan Haji Samanhudi dari Surakarta (Nasihin, 2012:2), setelah mendapat pengakuan dari Pemerintah Hindia Belanda. Kongres SI pertama pada tanggal 26 Januari 1913 diadakan di Surabaya, yang dipimpin oleh H.O.S. Cokroaminoto. Pada kongres tersebut diterangkan bahwa SI bukan partai politik dan tidak bereaksi melawan pemerintah Hindia Belanda (Pringgodigdo, 1986:5). Cokroaminoto menegaskan bahwa tujuan SI adalah mengembangkan jiwa dagang bangsa Indonesia, memperkuat ekonominya agar mampu bersaing dengan bangsa asing dan memberi bantuan kepada anggota-anggotanya yang menderita kesukaran, memajukan pengajaran, mempercepat naiknya derajat bumi putera, dan menentang pendapat-pendapat yang keliru tentang agama Islam (Poseponegoro dan Notosusanto, *Jilid V*, 1993:183).

SI yang mengalami perkembangan pesat, kemudian mulai disusupi oleh paham sosialisme revolusioner. Paham ini disebarakan oleh H.J.F.M Sneevliet yang mendirikan organisasi ISDV (*Indische Sociaal-Democratische Vereeniging*) pada tahun 1914. Pada mulanya ISDV sudah mencoba menyebarkan pengaruhnya, tetapi karena paham yang dianut tidak berakar di dalam masyarakat Indonesia melainkan diimpor dari Eropa oleh orang Belanda, sehingga usahanya kurang berhasil. Sehingga ISDV menggunakan taktik infiltrasi yang dikenal sebagai "Blok di dalam", ISDV berhasil menyusup ke dalam tubuh SI oleh karena dengan tujuan yang sama yaitu membela rakyat kecil dan menentang kapitalisme namun dengan cara yang berbeda. Dengan usaha yang baik, ISDV berhasil memengaruhi tokoh-tokoh muda SI seperti Semaoen, Darsono, Tan Malaka, dan Alimin Prawirodirdjo. Hal ini menyebabkan SI pecah menjadi "SI Putih" yang

dipimpin oleh HOS Cokroaminoto dan "SI Merah" yang dipimpin Semaoen. SI merah berlandaskan asas sosialisme-komunisme.

Sarekat Islam Putih (H. Agus Salim, Abdul Muis, Suryopranoto, Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo) berhaluan kanan berpusat di kota Yogyakarta. Sedangkan Sarekat Islam Merah (Semaoen, Alimin, Darsono) berhaluan kiri berpusat di kota Semarang. Sedangkan HOS Cokroaminoto pada mulanya adalah penengah di antara kedua kubu tersebut. Jurang antara SI Merah dan SI Putih semakin melebar saat keluarnya pernyataan Komintern (Partai Komunis Internasional) yang menentang cita-cita Pan-Islamisme. Pada saat kongres SI Maret 1921 di Yogyakarta, H. Fachruddin, Wakil Ketua Muhammadiyah mengedarkan brosur yang menyatakan bahwa Pan-Islamisme tidak akan tercapai bila tetap bekerja sama dengan komunis karena keduanya memang bertentangan. Di samping itu Agus Salim mengecam SI Semarang yang mendukung PKI. Darsono membalas kecaman tersebut dengan mengecam beleid (Belanda: kebijaksanaan) keuangan Cokroaminoto. SI Semarang juga menentang pencampuran agama dan politik dalam SI. Oleh karena itu, Cokroaminoto lebih condong ke SI haluan kanan (SI Putih). Yang pada Kongres Nasional di Madiun akan memisahkan SI Merah dan SI putih secara organisatoris.

Kongres Nasional di Madiun pada 17-20 Februari 1923, pada mulanya diambil keputusan bahwa Central Sarekat Islam diganti menjadi Partai Sarekat Islam (PSI) (Salam, 1961:62). anggota-anggota ini disebut *Wargorumekso* (Noer, 1996:146). Kongres ini juga membicarakan tentang perubahan sikap politik partai terhadap pemerintah. Perubahan ini disebut sikap non kooperatif yang artinya organisasi tidak mau bekerjasama dengan pemerintah kolonial, tetapi mengizinkan anggotanya duduk dalam *Volksraad* (Noer, 1996:127). Kongres PSI tahun 1927 menegaskan asas perjuangan bahwa tujuannya adalah mencapai kemerdekaan nasional berdasarkan agama Islam (Suhartono, 2003:37). Asas perjuangan tersebut merupakan hasil pemikiran dari Haji Agus Salim.

Haji Agus Salim lahir dari pasangan Soetan Salim gelar Soetan Mohamad Salim dan Siti Zainab. Jabatan terakhir ayahnya adalah Jaksa Kepala di Pengadilan Tinggi Riau. Pendidikan dasar ditempuh di *Europeesche Lagere*



*School* (ELS), sekolah khusus anak-anak Eropa, kemudian dilanjutkan ke *Hoogere Burgerschool* (HBS) di Batavia. Ketika lulus, Agus Salim berhasil menjadi lulusan terbaik di HBS se-Hindia Belanda. Setelah itu bekerja sebagai penerjemah dan pembantu notaris pada sebuah kongsi pertambangan di Indragiri. Pada tahun 1906, Salim berangkat ke Jeddah, Arab Saudi untuk bekerja di Konsulat Belanda di sana. Pada periode inilah Salim berguru pada Syeh Ahmad Khatib, yang masih merupakan pamannya. Salim kemudian terjun ke dunia jurnalistik sejak tahun 1915 di *Harian Neratja* sebagai Redaktur II. Setelah itu diangkat menjadi Ketua Redaksi. Menikah dengan Zaenatun Nahar dan dikaruniai 8 orang anak. Kegiatannya dalam bidang jurnalistik terus berlangsung hingga akhirnya menjadi Pemimpin *Harian Hindia Baroe* di Jakarta. Kemudian mendirikan *Suratkabar Fadjar Asia*. Dan selanjutnya sebagai Redaktur *Harian Moestika* di Yogyakarta dan membuka kantor *Advies en Informatie Bureau Penerangan Oemoem* (AIPO). Bersamaan dengan itu Agus Salim terjun dalam dunia politik sebagai pemimpin Sarekat Islam.

Haji Agus Salim dikenal sebagai seorang ulama, diplomat dan penulis hebat di Indonesia. Pengetahuannya yang luas mengenai agama Islam dipadu dengan intelektual, kesederhanaan, serta kematangan dalam berpolitik menjadikannya sebagai salah satu tokoh terkenal pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia (Prasetyo, 2004:145). Ketaatannya pada ajaran agama Islam tidak mengekang jiwanya yang bebas mendengarkan suara hati nuraninya, baik dalam kiprah sosial, politik maupun dalam kehidupan pribadinya.

Haji Agus Salim masuk dalam kancah pergerakan politik saat bergabung menjadi anggota SI pada tahun 1915. H.O.S. Cokroaminoto mengajak Agus Salim menghadiri kongres SI pada tahun 1915 di Surabaya dan menghadiri rapat SI di berbagai kota besar maupun kota kecil. Pada tahun 1921, H.O.S. Cokroaminoto dan Abdul Muis mengundurkan diri dari anggota *Volksraad* (Dewan Perwakilan Rakyat) sebagai wakil SI akibat kekecewaan keduanya terhadap Pemerintah Hindia Belanda (Mukayat, 1985:31), Haji Agus Salim menggantikan keduanya selama tiga tahun (1921-1924) menjadi anggota *Volksraad* mewakili SI (Salam, 1961:69 ). Akan tetapi sebagaimana pendahulunya, Haji Agus Salim merasa

perjuangan di dalam *Volksraad* tidak membawa hasil, sehingga Haji Agus Salim mengundurkan diri sebagai anggota *Volksraad* dan berkonsentrasi di SI sampai tahun 1940.

Melalui organisasi SI, Haji Agus Salim mengemukakan gagasan dan pendapatnya. Semenjak Kongres SI pertama pada 26 Januari 1913 di Surabaya, organisasi ini bersikap kooperatif dengan pihak Belanda, namun semakin lama tidak membuahkan hasil, akhirnya organisasi ini mengubah sikapnya menjadi non kooperatif dengan Pemerintah Hindia Belanda, setelah diadakan kongres Nasional di Madiun pada 17-20 Februari 1923 dan pada waktu itu Haji Agus Salim menjadi anggota *Volksraad* mewakili SI. Perubahan sikap politik tersebut membuat peneliti tertarik untuk mengkajinya. Peneliti tertarik untuk mengkaji tentang sikap politik Haji Agus Salim beserta dampak-dampak yang ditimbulkan dari sikap politik tersebut.

Sepak terjang dan pemikirannya telah dicatat dalam sejarah perjuangan Bangsa Indonesia. Betapa tidak, pemikiran Agus Salim punya andil besar menjadikan Indonesia terbebas dari belenggu penjajahan. Tak itu saja sisi luar biasa yang dimilikinya. Agus Salim adalah sosok yang menjalani hidup dengan penuh kesederhanaan. Kesederhanaannya bisa menjadi contoh pemimpin masa kini yang sering absen saat diberi amanah, dan akhirnya tergelincir dalam kubang korupsi.

Kecerdasan dan jejak-jejak intelektual Haji Agus Salim tersebar dalam bidang pemikiran Islam, pendidikan, sosial, politik, dan diplomasi. Tokoh-tokoh dunia semasa puncak karir politik Haji Agus Salim mengagumi pria kelahiran Koto Gadang, Bukittinggi, Minangkabau, 8 Oktober 1884 yang meninggal dunia di Jakarta, 4 November 1954.

Aktivitas dan kepemimpinan politik selama periode puncak kehebatan Sarekat Islam-Partai Sarekat Islam (SI, PSI), bisa menjadi cermin, bagaimana memimpin dan mengelola partai besar dengan segala intrik dan perbedaan pandangan yang menjurus ke konflik. Namun, sejarah mencatat, Haji Agus Salim mampu mengatasinya dengan bijak. Dalam konteks kepemimpinan Haji Agus Salim di partai politik itulah, masyarakat bisa mempelajari bagaimana konflik dan

intrik dalam partai politik yang kini tengah melanda partai besar di Tanah Air seperti Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), sesungguhnya konflik seperti itu telah menjadi bagian dalam sejarah perkembangan partai di Indonesia.

Ketertarikan penulis melakukan penelitian ini secara objektif adalah untuk menganalisis dan melihat peran dari salah satu tokoh penting masa sebelum kemerdekaan Indonesia, yakni Haji Agus Salim di dalam sebuah organisasi massa pertama di Indonesia yang memiliki jumlah anggota yang tersebar di wilayah Jawa, Madura dan beberapa wilayah lainnya. Tentunya hal ini menjadi nilai lebih dari Organisasi Sarekat Islam yang mempunyai jumlah massa anggota luar biasa banyaknya. Sehingga peran Haji Agus Salim dalam Sarekat Islam juga memberikan dampak dan kontribusi luar biasa baik untuk organisasi Sarekat Islam itu sendiri ataupun untuk Bangsa Indonesia.

Alasan secara subjektif terkait ketertarikan penulis dalam penelitian ini adalah kekaguman secara personal terhadap sosok tokoh pahlawan Indonesia yang dijuluki sebagai "*The Grand Old of Indonesia*" yaitu Haji Agus Salim, Haji Agus Salim dalam masa tuanya merupakan tokoh perjuangan bangsa Indonesia yang dihormati oleh kawan dan disegani oleh lawan politiknya. Sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa Haji Agus Salim menjadi satu-satunya tokoh angkatan tua pada masa-masa perjuangan kemerdekaan Indonesia sehingga memiliki ciri khas yang memiliki wibawa dan tingkat kecerdasan tinggi sebagai kaum intelektual Indonesia pada masanya.

Peneliti dalam hal ini memfokuskan pada peran Haji Agus Salim dari awal tahun 1914 sampai dengan tahun 1936. Serta lebih difokuskan kepada hal-hal apa saja yang telah diberikan atau bentuk kontribusi yang telah diberikan oleh haji Agus Salim bagi organisasi Sarekat Islam yang memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap perkembangan Indonesia pada masa itu baik dalam bidang Ekonomi, sosial dan politik. Berawal dari latar belakang di atas serta ketertarikan penulis meneliti lebih jauh tentang peran Haji Agus Salim dalam Sarekat Islam, maka penulis menyadari permasalahan tersebut menarik untuk dikaji lebih dalam serta dituangkan dalam bentuk karya tulis ilmiah. Karena itu, penulis merumuskan

penelitian ini dengan judul “**Peran Haji Agus Salim dalam Konflik Perpecahan Sarekat Islam Tahun 1914-1936**”.

## 1.2 Penegasan Judul

Penegasan judul ini dibuat untuk menghinari kesalahpahaman dalam penafsiran mengenai judul “**Peran Haji Agus Salim dalam Konflik Perpecahan Sarekat Islam Tahun 1914-1924**”, maka penulis perlu memberikan penegasan dari istilah yang terdapat dalam judul yang dibuat yaitu Peran, , Haji Agus Salim, Konflik dan Sarekat Islam.

**Peran**, Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto (2002:243), yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dari hal diatas lebih lanjut dapat dilihat pendapat lain tentang peran yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normatif. Sebagai peran normatif dalam hubungannya dengan tugas dan kewajiban dinas perhubungan dalam penegakan hukum mempunyai arti penegakan hukum secara total *enforcement*, yaitu penegakan hukum secara penuh, (Soerjono Soekanto 1987: 220).

**Haji Agus Salim**, Haji Agus Salim (lahir dengan nama Mashudul Haq (berarti "*Pembela Kebenaran*"); lahir di Koto Gadang, Agam, Sumatera Barat, Hindia Belanda, 8 Oktober 1884 – meninggal di Jakarta, Indonesia, 4 November 1954 pada umur 70 tahun) adalah seorang pejuang kemerdekaan Indonesia. Haji Agus Salim ditetapkan sebagai salah satu Pahlawan Nasional Indonesia pada tanggal 27 Desember 1961 melalui Keppres nomor 657 tahun 1961.

**Konflik**, Konflik dapat didefinisikan sebagai segala macam interaksi pertentangan atau antagonistic antara dua atau lebih pihak, konflik organisasi adalah ketidak sesuaian antara dua atau lebih anggota-anggota atau kelompok-kelompok organisasi yang timbul karena adanya kenyataan, karena mereka harus membagi sumber daya-sumber daya yang terbatas atau kegiatan-kegiatan kerja atau karena kenyataan bahwa mereka mempunyai perbedaan status, tujuan, nilai,

atau persepsi. Menurut Stoner dan Wankel, (1998) bahwa: Konflik organisasi adalah suatu perbedaan pendapat diantara dua atau lebih anggota atau kelompok dalam suatu organisasi yang muncul dari kenyataan bahwa mereka harus membagi sumber daya yang langka atau aktivitas kerja atau dari kenyataan bahwa mereka mempunyai status, tujuan, nilai, atau pandangan yang berbeda. Para anggota organisasi atau sub unit yang berbeda pendapat berupaya untuk memenangkan kepentingan atau pandangannya masing-masing.

**Sarekat Islam**, Syarikat Islam (disingkat SI), atau Sarekat Islam, dahulu bernama Sarekat Dagang Islam (disingkat SDI) didirikan pada tanggal 16 Oktober 1905 oleh Haji Samanhudi. SDI merupakan organisasi yang pertama kali lahir di Indonesia, pada awalnya Organisasi yang dibentuk oleh Haji Samanhudi dan kawan-kawan ini adalah perkumpulan pedagang-pedagang Islam yang menentang politik Belanda memberi keleluasaan masuknya pedagang asing untuk menguasai kompar ekonomi rakyat pada masa itu. Pada kongres pertama SDI di Solo tahun 1906, namanya ditukar menjadi Sarikat Islam. Pada tanggal 10 September 1912 berkat keadaan politik dan sosial pada masa tersebut HOS Cokroaminoto menghadap notaris B. Ter Kuile di Solo untuk membuat Sarikat Islam sebagai Badan Hukum dengan Anggaran Dasar SI yang baru, kemudian mendapatkan pengakuan dan disahkan oleh Pemerintah Belanda pada tanggal 14 September 1912. Hos Cokroaminoto mengubah yuridiksi SDI lebih luas yang dulunya hanya mencakupi permasalahan ekonomi dan sosial kearah politik dan Agama untuk menyumbangkan semangat perjuangan islam dalam semangat juang rakyat terhadap kolonialisme dan imperialisme pada masa tersebut.

Berdasarkan pengertian yang telah dijabarkan, maka maksud yang terkandung dalam judul “**Peran Haji Agus Salim dalam Konflik Perpecahan Sarekat Islam Tahun 1914-1936**” adalah sikap organisatoris dan jiwa kepemimpinan Haji Agus Salim dalam meredam dan menyelesaikan konflik internal partai selama berada di dalam Organisasi Sarekat Islam dari tahun 1914 sampai dengan tahun 1936.

### 1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Penentuan ruang lingkup untuk mengarahkan penelitian sehingga tidak keluar dari pokok bahasan yang sudah ada. Adapun ruang lingkup penelitian ini meliputi waktu (temporal), tempat (spasial), dan materi. Ruang lingkup waktu (temporal) penelitian ini dimulai dari tahun 1914 sampai tahun 1936. Dimulai dari tahun 1914 merupakan tahun dimana pengaruh Komunisme mulai merambah ke Sarekat Islam serta Tahun yang menunjukkan sosok Haji Agus Salim yang sudah menjadi Dwi Tunggal SI dengan HOS Cokroaminoto. Tahun 1936 adalah batasan peneliti diakhir masa pecahnya Sarekat Islam Putih dan Merah, walaupun untuk periode selanjutnya Haji Agus Salim tetap memiliki pengaruh yang cukup luar biasa baik dalam organisasi Sarekat Islam ataupun selama proses perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1936 itu masa terakhir ikut-campurnya Haji Agus Salim dalam menyelesaikan perpecahan internal Sarekat Islam sudah selesai, serta pada tahun 1936 merupakan tahun dipecatnya haji Agus Salim dari Sarekat Islam. Perlu diperhatikan bahwa penetapan ruang lingkup (temporal) ini tidaklah bersifat mutlak tetapi fleksibel, karena tidak menutup kemungkinan peneliti juga akan membahas beberapa kejadian yang berhubungan dengan peran Haji Agus Salim di Sarekat Islam sebelum tahun 1914 ataupun setelah 1936.

Ruang lingkup tempat (spasial) penelitian ini, lebih memfokuskan peristiwa yang terjadi di Indonesia khususnya pusat komando organisasi Sarekat Islam dan peristiwa-peristiwa yang menyangkut kepentingan politik kebanyakan terjadinya di sana. Sedangkan ruang lingkup materi yaitu Peran Haji Agus Salim dalam Konflik Perpecahan Sarekat Islam tahun 1914-1936.

### 1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan ruang lingkup permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan permasalahan pada penelitian ini adalah :

- 1) bagaimana latar belakang terjadinya konflik internal Sarekat Islam tahun 1914-1936?
- 2) bagaimanakah peran Haji Agus Salim dalam menyelesaikan konflik internal dalam Sarekat Islam tahun 1914-1936?

- 3) bagaimanakah dampak peran Haji Agus Salim dalam menyelesaikan konflik internal dalam Sarekat Islam tahun 1914-1936?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Mengacu pada rumusan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah :

- 1) untuk menganalisis latar belakang terjadinya konflik internal Sarekat Islam tahun 1914-1936;
- 2) untuk menganalisis peran Haji Agus Salim dalam menyelesaikan konflik internal dalam Sarekat Islam tahun 1914-1936;
- 3) untuk menganalisis dampak peran Haji Agus Salim dalam menyelesaikan konflik internal dalam Sarekat Islam tahun 1914-1936.

### **1.6 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini penulis dapat memberikan manfaat bagi :

- 1) bagi peneliti, sebagai latihan dalam penelitian dan penulisan karya tulis ilmiah, latihan berfikir dan memecahkan masalah secara kritis dan logis, serta memperdalam pengetahuan tentang peran Haji Agus Salim dalam menyelesaikan konflik internal dalam Sarekat Islam tahun 1914-1936;
- 2) bagi mahasiswa pendidikan sejarah, dapat menambah pengetahuan tentang peran Haji Agus Salim dalam menyelesaikan konflik internal dalam Sarekat Islam tahun 1914-1936;
- 3) bagi almamater, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan sebagai wujud nyata pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Dharma Penelitian;
- 4) bagi peneliti lain, sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan penelitian yang sejenis dan sekaligus pengembangannya.

## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Bab 2 Tinjauan pustaka dalam penelitian ini mengemukakan kajian terdahulu yang berkaitan dengan Peran Haji Agus Salim dalam Konflik Internal Sarekat Islam Tahun 1914-1936. Kajian teori dilakukan dengan mengumpulkan pendapat atau teori-teori yang dikemukakan oleh para peneliti sebelumnya. Tinjauan pustaka merupakan sebuah pem bahasan yang lebih menekankan pada upaya memposisikan penelitian yang akan dilakukan dibandingkan dengan hasil-hasil terdahulu mencapai tema yang sama. Tinjauan pustaka juga mengemukakan pendekatan dan teori yang digunakan peneliti dalam penelitian ini. Berbagai kajian tentang teori-teori, pendekatan-pendekatan dan penelitian terdahulu diperoleh dari sumber-sumber berupa buku, jurnal dan skripsi.

### 2.1 Penelitian Terdahulu

Buku karya Suradi (1997) yang berjudul "*Haji Agus Salim; dan Konflik Politik dalam Sarekat Islam*", buku ini adalah sebuah studi sederhana yang menelusuri salah satu faset dari sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia. Dalam studi buku ini kelihatan bahwa tidak ada labgkah perjuangan yang diterima begitu saja dan tidak ada pula pilihan strategi perjuangan yang tanpa resiko. Buku ini membahas dan mengulas tentang konflik-konflik Politik yang membawa Haji Agus Salim dan Organisasi Sarekat Islam menjadi tokoh perjuangan untuk kemerdekaan dalam melawan imperialisme Hindia Belanda dengan startegi Kooperasi. Tidak ada tokoh yang menjalani lingkaran dari Kooperasi kembali ke Ko-operasi ini seutuhnya selain dari Haji Agus Salim. Dalam sejarah Indonesia dikenang sebagai pemikir islam, tokoh pergerakan dan barangkali yang akan selalu melekat pada dirinya sepanjang sejarah "*Grand Old Man of the Republic*", karena peranannya dalam sejarah revolusi kemerdekaan (1945-1949). Buku ini lebih banyak membahas masalah konflik-konflik yang terjadi di dalam tubuh Sarekat Islam, sedangkan substansi dari penelitian penulis lebih menekankan kepada Peran Haji Agus Salim dalam Konflik Internal Sarekat Islam yang



nantinya akan membawa perubahan dan dampak yang luar biasa bagi Sarekat Islam dan perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia.

Buku karya Nasihin (2012) yang berjudul “*Sarekat Islam Mencari Ideologi 1924-1945*”. Buku ini adalah sekelumit tentang tema pergerakan Nasional Indonesia atau khususnya tentang Sarekat Islam (SI). Buku ini merupakan sebuah rincian mengenai bangunan ideologi yang dipilih dan diterapkan oleh SI, PSI, atau PSII untuk mencapai tujuan atau cita-cita perjuangan organisasi dan bangsa. Melalui ideologi dan sistem politik yang diterapkan inilah, SI, PSI atau PSII mampu berproses sebagai sebuah organisasi yang besar dan menjadil *Role* bagi perjuangan organisasi untuk menguatkan rasa nasionalisme bangsa.

Gerakan nasionalisme bumiputera yang muncul awal abad ke IX merupakan suatu upaya untuk melakukan perlawanan terhadap praktik kolonialisme Belanda di Indonesia. Berbarengan dengan bangkitnya nasionalisme tersebut, masuk pula ke Indonesia berbagai ideologi pergerakan dari luar seperti Islam (Pan-Islamisme), Sosialisme, Komunisme yang kemudian ikut mewarnai pergerakan nasional dalam melawan kolonialisme Belanda. Sarekat Islam atau yang nantinya akan berubah menjadi Partai Sarekat Islam (PSI) mengalami dinamika internal akibat kontestasi dan pertarungan dari berbagai ideologi luar tersebut. Hasil akhirnya, PSI atau PSII sampai pada penegasan bahwa sosialisme Islam adalah ideologi mereka. Buku ini menjadi salah satu bahan pembanding dari referensi lainnya, karena dalam Buku ini yang paling utama adalah membahas masalah pemilihan Ideologi Sosialisme Islam sebagai ideologi pergerakan Sarekat Islam. Sehingga bagi penulis buku ini lebih banyak membahas mengenai perjalanan perjuangan Sarekat Islam baik dalam mendukung perekonomian islam ataupun membantu perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Focus penelitian penulis dalam skripsi ini lebih menekankan pada aspek konflik internal dalam Sarekat Islam yang di dalamnya untuk melihat dan menganalisis peran Haji Agus Salim dalam konflik internal tersebut..

Buku karya Gani, M. A. (1982) yang berjudul “*Cita Dasar dan Pola Perjuangan Syarikat Islam Indonesia*”, Buku mengupas tentang situasi kelahiran

Syarikat Islam, Cita dasar syarikat Islam yang mengandung asas agama Islam, asas kerakyatan, asas sosial ekonomi. Selain itu buku ini juga membahas tentang trilogi landasan prinsip Syarikat Islam yaitu *tauhid*, ilmu pengetahuan, dan siasah. Gerak langkah perjuangan Syarikat Islam dalam berbagai bidang seperti bidang politik, dakwah, ekonomi, dan sosial serta pendidikan. Buku ini lebih dominan pada aspek hal-hal yang mendasar dalam perjuangan Sarekat Islam, yaitu perjuangan perkeonomian umat islam dan memajukan perdagangan. Di sisi lain, perjuangan politik juga dilakukan oleh Sarekat Islam dengan cara melakukan praktik politik non-koperasi dan berubah menjadi politik koperasi. Sedangkan focus penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis adalah masalah konflik internal dalam Sarekat Islam yang didalamnya ada peran Haji Agus Salim dalam menyelesaikan konflik tersebut. Tetapi juga tidak dipungkiri kalau peneliti mengambil beberapa data yang dibutuhkan dalam buku ini dalam hal sikap politik Sarekat Islam ketiak menghadapi Belanda.

Buku karya Amin, M (1996) yang berjudul “*Syarikat Islam, Obor Kebangkitan Nasional (1905-1942)*”. Buku ini mengupas mengenai perkembangan Sarekat Islam (SI) dimulai dari latar belakang berdirinya organisasi Sarekat Islam di Surakarta tahun 1905. Unsur-unsur integrasi dalam Sarekat Islam, menjadikan organisasi ini sebagai wadah nasionalisme Indonesia dibawah panji-panji Islam, relasi-relasi kerjasama Sarekat Islam, serta perjuangan-perjuangan Sarekat Islam dalam membangun umat Islam, menjawab tantangan Barat, dan memperdayakan ekonomi rakyat. Buku ini lebih banyak mengupas sisi biografi dari perjalanan perjuangan Sarekat Islam dari tahun 1905 sampai dengan tahun 1942. Perjuangan perjalanan Sarekat Islam dalam buku ini banyak mengupas hubungannya dengan penjajahan Belanda, taktik politik dalam menghadapi Belanda dalam dewan *Volksraad* serta perjuangan dalam membangun perekonomian umat islam agar tetap menjaga stabilitas persaiangn ekonomi dengan pihak China dan Belanda pada saat itu. Sedangkan focus penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis adalah meneliti mengenai intrik politik konflik internal dalam Sarekat Islam yang berdampak pada perpecahan organisasi tersebut

dan berdampak pada pemecatan beberapa tokoh penting dalam Sarekat Islam, salah satunya adalah Haji Agus Salim.

Buku karya Korver, A. P. E. (1985) yang berjudul "*Sarekat Islam; Gerakan Ratu Adil*". Dalam ini berisi tentang rentetan peristiwa yang terjadi dalam perkembangan organisasi Sarekat Islam dimulai dari latar belakang terbentuknya organisasi, pergantian kepemimpinan, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang diambil untuk kepentingan bersama. Buku ini membahas mengenai sejarah pergerakan nasional Indonesia yang mencatat nama Sarekat Islam sebagai salah satu organisasi perjuangan yang memegang peranan penting dalam meningkatkan kesadaran politik rakyat pada zamannya. Memang, hari lahirnya –apakah mendahului atau sesudah Budi Utomo- sejauh ini masih sering diperdebatkan, tetapi hal itu tidak mengurangi kepeloporan SI sebagai organisasi yang merakyat dan, atas segalanya, sebagai organisasi pertama yang memiliki *Nationwide*, yakni keanggotaannya meliputi hampir seluruh wilayah Nusantara.

Sebagaimana halnya dengan setiap pembicaraan sejarah, penulis buku ini pun tidak sekedar menyodorkan peristiwa demi peristiwa dari masa lampau. Tetapi juga memaparkan struktur lingkungan yang mendorong kebangkitan dan pertumbuhan SI yang luar biasa itu, dibalik pelbagai pergolakan intern yang mewarnai SI. Oleh sebab itu, Buku ini memberikan gambaran utuh tentang Organisasi Sarekat Islam yang terus ikut andil dalam perjuangan kemerdekaan bangsa dan majunya agama Islam. Bagi penulis, kepentingan dalam buku ini adalah mengambil beberapa hal yang berhubungan dengan Haji Agus Salim, terutama Organisasi Sarekat Islam yang menjadi tunggangan dan perjuangan Haji Agus Salim dalam Konflik Internal Sarekat Islam Tahun 1914-1924.

Buku karya Noer, D. (1973) yang berjudul "*Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*". Dalam buku ini berisi tentang periodisasi pertumbuhan dan perkembangan Sarekat Islam. Dalam buku ini juga dijelaskan secara detail rentetan peristiwa yang mengakibatkan kemajuan dan kemunduran Sarekat Islam. Buku ini lebih banyak membahas gerakan orang Islam di Indonesia ke arah yang lebih baik lagi tanpa ada kungkungan adat dan sosial, tetapi di sisi lain tetap mempertahankan ciri khas Islam Nusantara. Gerakan Modern Islam ini menjadi

cikal bakal dari lahirnya pemikiran Haji Agus Salim tentang perjuangana umat islam Indonesua yang harus ikut andil dalam setiap masanya untuk menyongsong kemerdekaan bangsa Indonesia dan majunya Islam. Bagi penulis sendiri, buku ini menjadi cikal bakal dari kiprah politik dan arah pemikiran perjuangan Haji Agus Salim dalam organisasi Sarekat Islam. Arah gerakan politik Haji Agus Salim yang menitikberatkan untuk tidak bersikap kooperatif terhadap imperialisme Belanda dan lebih memilih sikap berseberangan untuk menunjukkan prinsip perjuangan Bangsa Indonesia dan umat islam tentang Nasionalisme.

Skripsi karya Iman, Nur. (2006) yang berjudul “*Pemikiran Haji Agus Salim Tentang Islam*”. Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang. Penelitian yang dilakukan oleh Iman dalam Skripsi ini lebih banyak pada aspek kekuatan islam dan pokok pemikiran haji Agus Salim tentang Islam. Islam dan perjuangan di Indonesia yang nantinya akan menjadi arah perjuangan bangsa Indonesia tentang perang, jihad dan nasionalisme. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis disini lebih menitikberatkan pada aspek Peran Haji Agus Salim dalam Konflik Internal Sarekat Islam Tahun 1914-1924. Bagi penulis, skripsi ini menjadi salah satu rujukan untuk dijadikan bahan pembanding terkait Organisasi Sarekat Islam, mulai dari sejarah beridirinya serta arah perjuangan Sarekat Islam selama masa pemerintahan Kolonial Belanda. serta peneliti mengambil beberapa data tambahan dalam skripsi ini berupa biografi secara utuh tentang perjalanan hidup dan perjalanan perjuangan politik Haji Agus Salim selama masa perjuangan kemerdekaan Bangsa Indonesia, khususnya perjalanan politik dalam organisasi Sarekat Islam.

Skripsi karya Muhibin, M (2009) yang berjudul “*Politik Hijrah; Perjuangan Partai Sarekat Islam Indonesia dalam Melawan Pemerintahan Kolonial Belanda Tahun 1923-1940*”. Fakultas Adab, UIN Sunan Kalijaga. Penelitian dalam skripsi memfokuskan pada Sikap politik Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII) terhadap pemerintah kolonial Hindia Belanda. Dijalankannya politik hijrah tersebut dimaksudkan untuk melepaskan diri dari segala bentuk pengaruh dan sistem kehidupan kolonial serta memulai menyusun segala aspek kehidupan baik sosial, ekonomi, maupun politik berdasarkan pada potensi dan

kekuatan diri sendiri. Dengan perkataan lain, pindah dari tatanan atau sistem kehidupan yang tadinya berada di bawah pengaruh sistem Kolonial Belanda ke kehidupan yang senantiasa selalu berdasarkan pada potensi yang dimiliki sendiri.

Namun pada perkembangan selanjutnya kebijakan politik hijrah ini menjadi sumber polemik ditubuh PSII itu sendiri. Sejarah perjalanan PSII mencatat beberapa konflik yang muncul dan bersumber dari pelaksanaan politik hijrah ini. Memasuki akhir tahun 1930-an PSII telah mengalami tiga kali perpecahan dan menghasilkan tiga partai yang memisahkan diri dari PSII. ketiga partai itu adalah Barisan Penyardar PSII pimpinan H. Agus Salim, Partai Islam Indonesia (PII) pimpinan Soekiman, dan Komite Pertahanan Kebenaran PSII (KPK-PSII) pimpinan S. M. Kartosuwiryo yang masih menggunakan metode hijrah. Selain itu, pelaksanaan politik hijrah tersebut telah membangkitkan kembali tuntutan Indonesia berparlemen dan semakin memperlebar jarak pemisah antara rakyat Indonesia dengan Pemerintah Kolonial Belanda.

Dari uraian di atas, dapat diambil penjelasan bahwa Peran Haji Agus Salim dalam Konflik Internal Sarekat Islam Tahun 1914-1936 merupakan peran aktif Haji Agus Salim yang dinamis selama berada di dalam organisasi Sarekat Islam yang nantinya akan memberikan dampak cukup luar biasa bagi arah perjuangan Sarekat Islam dan perjuangan bangsa Indonesia selama masa perjuangan kemerdekaan, peran aktif dari Haji Agus Salim dalam Sarekat Islam memberikan dampak, dampak tersebut seperti dalam hal sosial budaya, politik, agama, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya yang menyangkut keberlangsungan kehidupan bangsa Indonesia selama masa perjuangan kemerdekaan, serta perjuangan umat islam untuk menegakkan agama islam di Indonesia. Sedangkan posisi penelitian ini adalah "*Penelitian Pengembangan*" dalam hal studi Peran Politik dalam sebuah organisasi perjuangan kemerdekaan, yaitu Peran Haji Agus Salim dalam Konflik Internal Sarekat Islam Tahun 1914-1936.. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian lain adalah fokus kajian penulis yang menekankan pada aspek Peran Haji Agus Salim dalam Konflik Internal Sarekat Islam, sedangkan penelitian lain masih lebih bersifat normatif dan bersifat umum dalam melaksanakan penelitiannya dan tidak dikhususkan dalam satu

substansi penelitian, seperti Ekonomi, Politik, Sosial-Budaya dan Pendidikan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan Sosiologi Politik.

## 2.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan sosiologi politik ini mengkaji ilmu tentang kekuasaan, pemerintahan, otoritas, komando di dalam sebuah lapisan masyarakat dan masyarakat nasional. Objek pendekatan sosiologi politik menganalisis kekuasaan di dalam masyarakat secara menyeluruh yang mencakup konflik antar individu-individu dan kelompok untuk memperoleh kekuasaan. Dasar sosiologi politik ialah menegakkan ketertiban sosial (Duverger, 1998:18-29). Pendekatan sosiologi politik ini dilandasi pemikiran bahwa seorang pemimpin bukan hanya untuk mencapai tujuan yang akan dicapai dalam suatu tujuan negara. Tanpa masyarakat, tujuan untuk memajukan negara tidak akan dapat tercapai. Pemakaian pendekatan sosiologi politik dapat membantu penulis mengetahui sejauh mana seseorang dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh misalnya keputusan kebijakan, kewenangan politik, pengendalian sosial, dan perubahan sosial (Budiardjo, 2003:20). Sama halnya dalam penelitian ini yang memfokuskan substansi penelitiannya kepada Peran Haji Agus Salim dalam Konflik Internal Sarekat Islam yang memiliki pengaruh cukup luar biasa untuk memberikan kebijakan dan menentukan arah perjuangan organisasi Sarekat Islam selama masa-masa perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Sosiologi politik adalah ilmu tentang kekuasaan, pemerintahan, otoritas, dan komando di dalam semua lapisan masyarakat, tidak hanya di dalam masyarakat nasional. Pengertian tersebut pada dasarnya membedakan antara pemerintah dengan yang diperintah. Di dalam suatu kelompok manusia terdapat orang yang memerintah dan orang yang mematuhi, terdapat mereka yang membuat keputusan dan orang-orang yang menaati keputusan tersebut. Ilmu sosiologi politik adalah gabungan anatara ilmu sosial dan politik yang berfokus pada hubungan antara masyarakat dan pemerintah, dimana pemerintah lebih berperan untuk mengatur masyarakat melalui lembaga pemerintahannya. Sarekat Islam menjadi salah satu organisasi pergerakan awal yang memimpin

kaum intelektual dan pemuda muslim Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaannya, salah satunya adalah tokoh Haji Agus Salim yang menjadi salah satu petinggi partai Sarekat Islam yang nantinya akan berperan aktif secara politis dalam Sarekat Islam.

Pendekatan sosiologi politik ditujukan kepada para pembuat keputusan yang memiliki kekuasaan yang langsung menentukan perkembangan politik serta jalannya pemerintahan dalam suatu masyarakat. Pendekatan sosiologi politik dalam penelitian ini digunakan untuk dapat melihat perkembangan jalannya roda organisasi dan arah perjuangan Sarekat Islam dibawah Haji Agus Salim yang memiliki peran politik cukup luar biasa . Menurut peneliti pendekatan sosiologi politik sangat cocok dalam Peran Haji Agus Salim dalam Konflik Internal Sarekat Islam Tahun 1914-1936.

### **2.3 Teori Penelitian**

Selanjutnya untuk mempertajam hasil analisis dengan pendekatan yang telah dijelaskan diatas, maka penulis menggunakan teori Konflik Organisasi Stoner dan Freeman (1991). Organisasi sebagai suatu sistem terdiri dari komponen-komponen (subsistem) yang saling berkaitan atau saling tergantung (*interdependence*) satu sama lain dan dalam proses kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu (Kast dan Rosenzweigh, 1974). Sub-subsistem yang saling tergantung itu adalah tujuan dan nilai-nilai (*goals and values subsystem*), teknikal (*technical subsystem*), manajerial (*managerial subsystem*), psikososial (*psychosocial subsystem*), dan subsistem struktur (*structural subsystem*).

Dalam proses interaksi antara suatu subsistem dengan subsistem lainnya tidak ada jaminan akan selalu terjadi kesesuaian atau kecocokan antara individu pelaksananya. Setiap saat ketegangan dapat saja muncul, baik antar individu maupun antar kelompok dalam organisasi. Banyak faktor yang melatar - belakangi munculnya ketidakcocokan atau ketegangan, antara lain: sifat-sifat pribadi yang berbeda, perbedaan kepentingan, komunikasi yang “buruk”, perbedaan nilai, dan sebagainya. Perbedaan-perbedaan inilah yang akhirnya membawa organisasi ke dalam suasana konflik. Agar organisasi dapat tampil

efektif, maka individu dan kelompok yang saling tergantung itu harus menciptakan hubungan kerja yang saling mendukung satu sama lain, menuju pencapaian tujuan organisasi.

Namun, sebagaimana dikatakan oleh Gibson, *et al.* (1997:437), selain dapat menciptakan kerjasama, hubungan saling tergantung dapat pula melahirkan konflik. Hal ini terjadi jika masing-masing komponen organisasi memiliki kepentingan atau tujuan sendiri-sendiri dan tidak saling bekerjasama satu sama lain. Konflik dapat menjadi masalah yang serius dalam setiap organisasi, tanpa peduli apapun bentuk dan tingkat kompleksitas organisasi tersebut. Konflik tersebut mungkin tidak membawa “kematian” bagi organisasi, tetapi pasti dapat menurunkan kinerja organisasi yang bersangkutan, jika konflik tersebut dibiarkan berlarut-larut tanpa penyelesaian. Karena itu keahlian untuk mengelola konflik sangat diperlukan bagi setiap pimpinan atau manajer organisasi.

Terdapat berbagai macam jenis konflik organisasi, tergantung pada dasar yang digunakan untuk membuat klasifikasi. Ada yang membagi konflik atas dasar fungsinya, ada pembagian atas dasar pihak-pihak yang terlibat dalam konflik, dan sebagainya.

#### **a. Konflik Dilihat dari Fungsi**

Berdasarkan fungsinya, Robbins (1996:430) membagi konflik menjadi dua macam, yaitu: konflik fungsional (*Functional Conflict*) dan konflik disfungsional (*Dysfunctional Conflict*). Konflik fungsional adalah konflik yang mendukung pencapaian tujuan kelompok, dan memperbaiki kinerja kelompok. Sedangkan konflik disfungsional adalah konflik yang merintangai pencapaian tujuan kelompok.

Menurut Robbins, batas yang menentukan apakah suatu konflik fungsional atau disfungsional sering tidak tegas (kabur). Suatu konflik mungkin fungsional bagi suatu kelompok, tetapi tidak fungsional bagi kelompok yang lain. Begitu pula, konflik dapat fungsional pada waktu tertentu, tetapi tidak fungsional di waktu yang lain. Kriteria yang membedakan apakah suatu konflik fungsional atau disfungsional adalah dampak konflik tersebut terhadap kinerja kelompok, bukan pada kinerja individu. Jika konflik tersebut dapat meningkatkan kinerja kelompok,



walaupun kurang memuaskan bagi individu, maka konflik tersebut dikatakan fungsional. Demikian sebaliknya, jika konflik tersebut hanya memuaskan individu saja, tetapi menurunkan kinerja kelompok maka konflik tersebut disfungsi.

#### **b. Konflik Dilihat dari Pihak yang Terlibat di Dalamnya**

Berdasarkan pihak-pihak yang terlibat di dalam konflik, Stoner dan Freeman (1989:393) membagi konflik menjadi enam macam, yaitu:

- 1) Konflik dalam diri individu (*conflict within the individual*). Konflik ini terjadi jika seseorang harus memilih tujuan yang saling bertentangan, atau karena tuntutan tugas yang melebihi batas kemampuannya.
- 2) Konflik antar-individu (*conflict among individuals*). Terjadi karena perbedaan kepribadian (*personality differences*) antara individu yang satu dengan individu yang lain.
- 3) Konflik antara individu dan kelompok (*conflict among individuals and groups*). Terjadi jika individu gagal menyesuaikan diri dengan norma - norma kelompok tempat ia bekerja.
- 4) Konflik antar kelompok dalam organisasi yang sama (*conflict among groups in the same organization*). Konflik ini terjadi karena masing - masing kelompok memiliki tujuan yang berbeda dan masing-masing berupaya untuk mencapainya.
- 5) Konflik antar organisasi (*conflict among organizations*). Konflik ini terjadi jika tindakan yang dilakukan oleh organisasi menimbulkan dampak negatif bagi organisasi lainnya. Misalnya, dalam perebutan sumberdaya yang sama.
- 6) Konflik antar individu dalam organisasi yang berbeda (*conflict among individuals in different organizations*). Konflik ini terjadi sebagai akibat sikap atau perilaku dari anggota suatu organisasi yang berdampak negatif bagi anggota organisasi yang lain. Misalnya, seorang manajer *public relations* yang menyatakan keberatan atas pemberitaan yang dilansir seorang jurnalis.

### c. Konflik Dilihat dari Posisi Seseorang dalam Struktur Organisasi

Winardi (1992:174) membagi konflik menjadi empat macam, dilihat dari posisi seseorang dalam struktur organisasi. Keempat jenis konflik tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Konflik vertikal, yaitu konflik yang terjadi antara karyawan yang memiliki kedudukan yang tidak sama dalam organisasi. Misalnya, antara atasan dan bawahan.
- 2) Konflik horizontal, yaitu konflik yang terjadi antara mereka yang memiliki kedudukan yang sama atau setingkat dalam organisasi. Misalnya, konflik antar karyawan, atau antar departemen yang setingkat.
- 3) Konflik garis-staf, yaitu konflik yang terjadi antara karyawan lini yang biasanya memegang posisi komando, dengan pejabat staf yang biasanya berfungsi sebagai penasihat dalam organisasi.
- 4) Konflik peran, yaitu konflik yang terjadi karena seseorang mengemban lebih dari satu peran yang saling bertentangan. Di samping klasifikasi tersebut di atas, ada juga klasifikasi lain, misalnya yang dikemukakan oleh Schermerhorn, *et al.* (1982), yang membagi konflik atas: *substantive conflict*, *emotional conflict*, *constructive conflict*, dan *destructive conflict*.

Menurut Robbins (1996), konflik muncul karena ada kondisi yang melatar - belakangnya (*antecedent conditions*). Kondisi tersebut, yang disebut juga sebagai sumber terjadinya konflik, terdiri dari tiga kategori, yaitu: komunikasi, struktur, dan variabel pribadi.

**Komunikasi.** Komunikasi yang buruk, dalam arti komunikasi yang menimbulkan kesalah - pahaman antara pihak-pihak yang terlibat, dapat menjadi sumber konflik. Suatu hasil penelitian menunjukkan bahwa kesulitan semantik, pertukaran informasi yang tidak cukup, dan gangguan dalam saluran komunikasi merupakan penghalang terhadap komunikasi dan menjadi kondisi anteseden untuk terciptanya konflik.

**Struktur.** Istilah struktur dalam konteks ini digunakan dalam artian yang mencakup: ukuran (kelompok), derajat spesialisasi yang diberikan kepada anggota kelompok, kejelasan jurisdiksi (wilayah kerja), kecocokan antara tujuan anggota dengan tujuan kelompok, gaya kepemimpinan, sistem imbalan, dan derajat ketergantungan antara kelompok. Penelitian menunjukkan bahwa ukuran kelompok dan derajat spesialisasi merupakan variabel yang mendorong terjadinya konflik. Makin besar kelompok, dan makin terspesialisasi kegiatannya, maka semakin besar pula kemungkinan terjadinya konflik.

**Variabel Pribadi.** Sumber konflik lainnya yang potensial adalah faktor pribadi, yang meliputi: sistem nilai yang dimiliki tiap-tiap individu, karakteristik kepribadian yang menyebabkan individu memiliki keunikan (*idiosyncrasies*) dan berbeda dengan individu yang lain. Kenyataan menunjukkan bahwa tipe kepribadian tertentu, misalnya, individu yang sangat otoriter, dogmatik, dan menghargai rendah orang lain, merupakan sumber konflik yang potensial. Jika salah satu dari kondisi tersebut terjadi dalam kelompok, dan para karyawan menyadari akan hal tersebut, maka muncullah persepsi bahwa di dalam kelompok terjadi konflik. Keadaan ini disebut dengan konflik yang dipersepsikan (*perceived conflict*). Kemudian jika individu terlibat secara emosional, dan mereka merasa cemas, tegang, frustrasi, atau muncul sikap bermusuhan, maka konflik berubah menjadi konflik yang dirasakan (*felt conflict*). Selanjutnya, konflik yang telah disadari dan dirasakan keberadaannya itu akan berubah menjadi konflik yang nyata, jika pihak-pihak yang terlibat mewujudkannya dalam bentuk perilaku. Misalnya, serangan secara verbal, ancaman terhadap pihak lain, serangan fisik, huru-hara, pemogokan, dan sebagainya. Teori konflik ini digunakan oleh peneliti untuk mengupas habis permasalahan dalam penelitian ini terkait Peran Haji Agus Salim dalam menyelesaikan konflik internal Sarekat Islam.

### BAB 3. METODE PENELITIAN

Bab 3 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah. Metode penelitian sejarah merupakan sebuah proses menguji dan menganalisis secara kritis dan aktif terkait rekaman dan peninggalan sejarah masa lampau (Gottschalk, 1986:32). Metode penelitian sejarah menjadi prosedur utama bagi peneliti sejarah untuk menuliskan kembali kisah dan sejarah masa lampau yang sudah termaktub (Notosusanto, 1917:17). Berdasarkan pendapat tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa metode penelitian sejarah adalah cara yang digunakan seorang peneliti untuk mendapatkan jawaban berupa kesimpulan dari suatu persoalan dengan menggunakan metode – metode sejarah yang ada. Metode sejarah yang penulis gunakan dalam penelitian ini meliputi (1) Heuristik, (2) Kritik, (3) Interpretasi, (4) Historiografi. Berikut akan penulis jelaskan ke-4 langkah metode penelitian sejarah dalam skripsi ini :

#### 3.1 Heuristik

Heuristik menjadi langkah pertama yang dilakukan oleh peneliti mencari sumber–sumber sampai mendapatkan data. Sumber yang berhasil dikumpulkan berupa sumber tertulis baik berupa artikel, buku, dan penelitian terdahulu. Sumber data yang berhasil dikumpulkan kemudian dibedakan menjadi dua, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer yang dimaksud berupa buku karangan Haji Agus Salim yang berjudul “Pesan-Pesan Islam”, dan Buku Karangan Drs. Mukayat yang berjudul “Haji Agus Salim” serta Koran Koran (Surat Kabar) dan Majalah diantaranya “*Neratja*,” April 1919, “*Neratja*” 17 Maret 1921, “*Bendera Islam*” 2 Januari 1927, dan “*Bendera Islam*” 2 Mei 1927. Sedangkan sumber sekunder adalah penelitian sebelumnya berupa skripsi, jurnal dan laporan yang berhubungan dengan Haji Agus Salim ataupun Sarekat Islam, serta koran-koran, majalah dan dokumen lainnya yang menunjang tentang pembahasan skripsi yang dilakukan peneliti. Sebelum melakukan penelitian, pertama–tama peneliti melakukan penelitian di Perpustakaan dengan mencari skripsi yang berhubungan dengan pembahasan dan mencari informasi di internet

yang kemudian dilanjutkan dengan membaca buku–buku primer tentang Haji Agus Salim dan Sarekat Islam. Peneliti menggunakan sumber primer tentang penelitian ini yang penulis dan penelitinya mengalami secara langsung atau mendapatkan informasi secara langsung dari haji Agus Salim dan Organisasi Sarekat Islam. Sumber itu diantaranya karya Korver, A. P. E (1985) buku yang berjudul “*Sarekat Islam; Gerakan Ratu Adil*”, karya Gani, A (1984) yang berjudul “*Cita Dasar dan Pola Perjuangan Syarikat Islam*”, karya Kutojo, S (1978) buku yang berjudul “*Rowayat Hidup dan Perjuangan Haji Agus Salim*”, karya Mukayat (1985) buku yang berjudul “*Haji Agus Salim; Karya dan Pengabdiannya*”, karya Nasihin (2012) yang berjudul “*Sarekat Islam Mencari Ideologi 1924-1945*”, karya Roem, M (1995) buku yang berjudul “*Djejak Langkah Haji Agus Salim*”, karya Salam, S (1961) buku yang berjudul “*Haji Agus Salim; Hidup dan Perjuangannya*”, karya Suhatno (1995) buku yang berjudul “*Tokoh-Tokoh Pemikir Paham Kebangsaan; Haji Agus Salim dan Mohammad Husni Thamrin*”, serta karya Sulastro (2004) buku yang berjudul “*Haji Agus Salim (1884-1954) tentang Perang, Jihad, dan Pluralisme*”.

Sumber sekunder merupakan sumber tertulis yang mendukung dan masuk ke dalam pembahasan skripsi ini yang relevan. Sumber sekunder yang peneliti dapatkan berupa skripsi yang mendukung penelitian dan berhubungan dengan substansi dari skripsi ini, yaitu, Skripsi karya Iman, N (2006) yang berjudul “*Pemikiran Haji Agus Salim tentang Islam*”, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang. Selanjutnya skripsi karya Muhibbin, M (2009) yang berjudul “*Politik Hijrah; Perjuangan Partai Sarekat Islam Indonesia dalam Melawan Pemerintahan Kolonial Belanda Tahun 1923-1940*”, Skripsi Fakultas Adab dan Ilmu Budaya, UIN Sunan Kalijaga. Sumber–sumber tersebut di dapat dari perpustakaan daerah Jember serta pencarian secara langsung maupun transaksi pembelian buku secara online.

### 3.2 Kritik

Kritik menjadi langkah kedua bagi peneliti setelah mengumpulkan sumber-sumber sejarah, maka langkah selanjutnya yang dilakukan adalah oleh

peneliti adalah mengadakan kritik sumber, baik sumber primer maupun sekunder dilakukan kritik. (Sjamsudin, 1996:104). Kritik juga digunakan penulis dalam pengujian sumber-sumber sejarah agar menjadi sumber yang kredibel keasliannya. Pada langkah kritik ini ada dua macam yaitu kritik ekstern dan kritik intern. Kritik ekstern berupa sebuah langkah yang dilakukan dengan melihat sampul, tahun terbit, pengarang, judul, serta latar belakang. Kritik ekstern pertama dilakukan pada sumber primer yaitu buku karangan Haji Agus Salim yang berjudul “Pesan-Pesan Islam”, dan Buku Karangan Drs. Mukayat yang berjudul “Haji Agus Salim” serta Koran Koran (Surat Kabar) dan Majalah diantaranya “*Neratja*,” April 1919, “*Neratja*” 17 Maret 1921, “*Bendera Islam*” 2 Januari 1927, dan “*Bendera Islam*” 2 Mei 1927. Serta buku pendukung diantaranya karya Korver, A. P. E (1985) buku yang berjudul “*Sarekat Islam; Gerakan Ratu Adil*”, karya Gani, A (1984) yang berjudul “*Cita Dasar dan Pola Perjuangan Syarikat Islam*”, karya Kutojo, S (1978) buku yang berjudul “*Rowayat Hidup dan Perjuangan Haji Agus Salim*”, karya Mukayat (1985) buku yang berjudul “*Haji Agus Salim; Karya dan Pengabdianya*”, karya Nasihin (2012) yang berjudul “*Sarekat Islam Mencari Ideologi 1924-1945*”, karya Roem, M (1995) buku yang berjudul “*Djejak Langkah Haji Agus Salim*”, karya Salam, S (1961) buku yang berjudul “*Haji Agus Salim; Hidup dan Perjuangannya*”, karya Suhatno (1995) buku yang berjudul “*Tokoh-Tokoh Pemikir Paham Kebangsaan; Haji Agus Salim dan Mohammad Husni Thamrin*”, serta karya Sulastro (2004) buku yang berjudul “*Haji Agus Salim (1884-1954) tentang Perang, Jihad, dan Pluralisme*”.

Kritik ekstern kedua dilakukan pada sumber sekunder yaitu yang peneliti dapatkan berupa skripsi yang mendukung penelitian dan berhubungan dengan substansi dari skripsi ini, yaitu, Skripsi karya Iman, N (2006) yang berjudul “*Pemikiran Haji Agus Salim tentang Islam*”, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang. Selanjutnya skripsi karya Muhibbin, M (2009) yang berjudul “*Politik Hijrah; Perjuangan Partai Sarekat Islam Indonesia dalam Melawan Pemerintahan Kolonial Belanda Tahun 1923-1940*”, Skripsi Fakultas Adab dan Ilmu Budaya, UIN Sunan Kalijaga.

Setelah kritik ekstern selanjutnya yaitu kritik intern. Kritik intern yang dilakukan peneliti adalah melakukan penilaian secara kritis sumber – sumber yang telah didapat dengan cara membandingkan persamaan ataupun perbedaan beberapa penafsiran dari buku-buku yang diperoleh dari setiap data. Kritik intern pertama dilakukan penulis untuk melihat kredibilitas dari sumber primer, yaitu diantaranya buku karangan Haji Agus Salim yang berjudul “Pesan-Pesan Islam”, dan Buku Karangan Drs. Mukayat yang berjudul “Haji Agus Salim” serta Koran Koran (Surat Kabar) dan Majalah diantaranya “*Neratja*,” April 1919, “*Neratja*” 17 Maret 1921, “*Bendera Islam*” 2 Januari 1927, dan “*Bendera Islam*” 2 Mei 1927. Serta buku pendukung karya Korver, A. P. E (1985) buku yang berjudul “*Sarekat Islam; Gerakan Ratu Adil*”, karya Gani, A (1984) yang berjudul “*Cita Dasar dan Pola Perjuangan Syarikat Islam*”, karya Kutojo, S (1978) buku yang berjudul “*Rowayat Hidup dan Perjuangan Haji Agus Salim*”, karya Mukayat (1985) buku yang berjudul “*Haji Agus Salim; Karya dan Pengabdiannya*”, karya Nasihin (2012) yang berjudul “*Sarekat Islam Mencari Ideologi 1924-1945*”, karya Roem, M (1995) buku yang berjudul “*Djejak Langkah Haji Agus Salim*”, karya Salam, S (1961) buku yang berjudul “*Haji Agus Salim; Hidup dan Perjuangannya*”, karya Suhatno (1995) buku yang berjudul “*Tokoh-Tokoh Pemikir Paham Kebangsaan; Haji Agus Salim dan Mohammad Husni Thamrin*”, serta karya Sulastro (2004) buku yang berjudul “*Haji Agus Salim (1884-1954) tentang Perang, Jihad, dan Pluralisme*”. Berdasarkan kritik intern untuk sumber primer ini, penulis mendapatkan fakta sejarah berupa data-data yang berhubungan dengan organisasi Sarekat Islam dan data mengenai Haji Agus Salim baik secara personal ataupun gerak langkah perjuangannya.

Kritik intern kedua peneliti lakukan pada sumber sekunder dalam penelitian ini, yaitu yang peneliti dapatkan berupa skripsi yang mendukung penelitian dan berhubungan dengan substansi dari skripsi ini, yaitu, Skripsi karya Iman, N (2006) yang berjudul “*Pemikiran Haji Agus Salim tentang Islam*”, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang. Selanjutnya skripsi karya Muhibbin, M (2009) yang berjudul “*Politik Hijrah; Perjuangan Partai*

*Sarekat Islam Indonesia dalam Melawan Pemerintahan Kolonial Belanda Tahun 1923-1940*”, Skripsi Fakultas Adab dan Ilmu Budaya, UIN Sunan Kalijaga.

Berdasarkan kritik intern untuk sumber sekunder ini, penulis mendapatkan beberapa tambahan data-data penelitian baru yang nantinya akan menjadi fakta sejarah tambahan untuk menganalisis Peran Politik Haji Agus Salim dalam Sarekat Islam. Melalui kritik intern baik sumber primer ataupun sumber sekunder, penulis menentukan kredibilitas dan reabilitas buku ini apakah sesuai dan tidak menyimpang dengan pembahasan peneliti. Setelah mengkaji sumber yang ada penulis dapat menemukan data-data yang sesuai dan dibutuhkan dalam penelitian mengenai Peran Haji Agus Salim dalam Konflik Perpecahan Sarekat Islam Tahun 1914-1936.

### **3.3 Interpretasi**

Interpretasi menjadi langkah ketiga setelah kritik sumber. Interpretasi yang dilakukan oleh peneliti adalah proses menghubungkan–hubungkan atau mengkait–kaitkan fakta sejarah yang telah diwujudkan satu sama lainnya sehingga menjadi rangkaian yang masuk akal dalam arti menunjukkan keserasian antara satu dengan lainnya (Hariyono, 1995:110). Fakta–fakta sejarah harus diinterpretasi atau ditafsirkan agar suatu peristiwa dapat direkonstruksikan dengan baik, yaitu dengan cara menyeleksi, menyusun data, mengurangi tekanan, dan menempatkan fakta.

Kegiatan interpretasi merupakan proses penafsiran terhadap fakta – fakta yang ada untuk menetapkan makna yang saling berhubungan antara fakta satu dengan yang lainnya yang telah terhimpun dan berhubungan dengan Peran Haji Agus Salim dalam Konflik Perpecahan Sarekat Islam Tahun 1914-1936. Setelah itu dirangkai dan disusun dengan kronologis menjadi suatu peristiwa, sehingga dapat diperoleh suatu kisah sejarah atau cerita sejarah yang benar sesuai realita peristiwanya. Kegiatan interpretasi ini terbagi menjadi dua macam yaitu analisis dan sintesis. Analisa yaitu menguraikan data-data yang telah diperoleh selama ini terkait Peran Haji Agus Salim dalam Sarekat Islam, sedangkan sintesis yaitu



menghubungkan atau menyatukan data-data yang telah diperoleh sehingga ditemukan fakta sejarah (Kuntowijoyo, 2013:78).

Penulis dalam hal ini melakukan interpretasi terhadap fakta-fakta yang telah terkumpul untuk dirangkai dan dihubungkan menjadi bentuk yang logis, rasional, dan objektif. Fakta itu kemudian disusun secara kronologis sehingga didapat suatu fakta yang realistis mengenai Peran Haji Agus Salim dalam Konflik Perpecahan Sarekat Islam Tahun 1914-1936.

Langkah interpretasi ini memberikan gambaran utuh mengenai tiga permasalahan yang oleh penelitian dijadikan rumusan masalah dalam penelitian ini, dan untuk menjawab tiga rumusan masalah itu peneliti telah mengklasifikasikan penggunaan sumber primer dan sekunder untuk menjawab tiga rumusan masalah tersebut.

Rumusan masalah pertama, peneliti menggunakan sumber karya Korver, A. P. E (1985) buku yang berjudul "*Sarekat Islam; Gerakan Ratu Adil*", karya Gani, A (1984) yang berjudul "*Cita Dasar dan Pola Perjuangan Syarikat Islam*", dan karya Nasihin (2012) yang berjudul "*Sarekat Islam Mencari Ideologi 1924-1945*". Sedangkan dalam rumusan masalah kedua, penelitin menggunakan sumber karya Kutojo, S (1978) buku yang berjudul "*Rowayat Hidup dan Perjuangan Haji Agus Salim*", karya Mukayat (1985) buku yang berjudul "*Haji Agus Salim; Karya dan Pengabdiannya*", karya Roem, M (1995) buku yang berjudul "*Djejak Langkah Haji Agus Salim*", karya Salam, S (1961) buku yang berjudul "*Haji Agus Salim; Hidup dan Perjuangannya*", karya Suhatno (1995) buku yang berjudul "*Tokoh-Tokoh Pemikir Paham Kebangsaan; Haji Agus Salim dan Mohammad Husni Thamrin*", serta karya Sulastro (2004) buku yang berjudul "*Haji Agus Salim (1884-1954) tentag Perang, Jihad, dan Pluralisme*". Sedangkan rumusan masalah ketiga, peneliti menggunakan sumber Skripsi karya Iman, N (2006) yang berjudul "*Pemikiran Haji Agus Salim tentang Islam*", Skripsi Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang. Selanjutnya skripsi karya Muhibbin, M (2009) yang berjudul "*Politik Hijrah; Perjuangan Partai Sarekat Islam Indonesia dalam Melawan Pemerintahan Kolonial Belanda Tahun 1923-1940*", Skripsi Fakultas Adab dan Ilmu Budaya, UIN Sunan Kalijaga.

### 3.4 Historiografi

Historiografi menjadi langkah terakhir atau tahapan final bagi peneliti. Gottschalk (1986:32) historiografi merupakan kegiatan akhir dari langkah penelitian sejarah yang merupakan kegiatan merekonstruksi secara imajinatif dari masa lampau berdasarkan data yang diperoleh. Dapat dikatakan bahwa metode historiografi merupakan metode puncak dari rangkaian kerja seorang peneliti, dari tahap inilah dapat diketahui baik buruk hasil kerja secara keseluruhan.

Dalam hal ini, peneliti harus memiliki kemampuan menampilkan kejelasan serta kerapian ekspresi penulisan sehingga fakta sejarah dapat dirangkai secara kronologis dan sistematis sehingga menjadi kisah sejarah yang bermakna. Historiografi yang dilakukan oleh peneliti menuliskan cerita sejarah tentang Peran Haji Agus Salim dalam Konflik Perpecahan Sarekat Islam Tahun 1914-1924 dengan cara merangkai fakta-fakta sejarah yang telah diperoleh menjadi suatu kisah sejarah ilmiah yang jelas, rasional, logis, dan objektif. Kemudian menyusun sejarah tersebut secara kronologis dan sistematis serta dapat diyakini kebenarannya.

Susunan hasil penelitian ini dituangkan dalam bentuk karya ilmiah skripsi dengan sistematika penulisan yang terdiri dari enam bab. Bab 1 adalah pendahuluan yang menyangkut latar belakang masalah, ruang lingkup penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Pada Bab 2 berisi tentang tinjauan pustaka yang berisi pendapat dan buku-buku serta sumber-sumber sejarah lainnya mengenai Peran Haji Agus Salim dalam Konflik Perpecahan Sarekat Islam Tahun 1914-1936, serta teori yang cocok terhadap penelitian dan pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini. Bab 3 berisi tentang metode penelitian yang digunakan untuk menyusun karya ilmiah skripsi ini, yang terdiri dari empat tahap metode penelitian yakni Heuristik, Kritik, Interpretasi, dan Historiografi. Bab ini dipaparkan dan dijelaskan mengenai cara – cara yang digunakan peneliti dalam hal mengumpulkan sumber, data, dan merekonstruksi fakta sejarah yang nantinya akan menjadi satu kesatuan yang utuh, kronologis, sistematis, serta rasional.

Hasil penelitian dijelaskan pada bab 4, 5, dan 6. Bab 4 penulis memaparkan tentang hal-hal yang melatarbelakangi terjadinya konflik internal dalam tubuh Sarekat Islam sejak tahun 1914- sampai dengan tahun 1936, serta proses konflik yang terjadi. Bab 5 penulis akan memaparkan Peran Haji Agus Salim dalam Konflik Perpecahan Sarekat Islam Tahun 1914-1936, dalam bab 4 ini tentunya yang akan di bahas oleh penulis adalah bentuk peran aktif Haji Agus Salim dalam Sarekat Islam, baik Peran memajukan bangsa, memajukan agama islam, ataupun memajukan pedagang islam yang ada di Indonesia, serta, dalam sub-bab kedua dalam bab 5 akan membahas masalah Sikap politik Haji Agus Salim dalam Sarekat Islam yang nantinya sikap politik itu akan ditujukan kepada pihak Kolonial Hindia-Belanda. Bab 6 penulis memaparkan tentang dampak yang diakibatkan dari Peran Haji Agus Salim dalam Konflik Perpecahan Sarekat Islam Tahun 1914-1936. Dampak peran Politik Haji Agus Salim tentunya bagi Sarekat Islam itu sendiri, serta bagi perjuangan kemerdekaan Bangsa Indonesia pada waktu itu. Bab 7 yaitu penutup, ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang memberikan kesimpulan dari penjelasan mengenai bab pembahasan. Di bagian bab ini juga terdapat saran yang diberikan oleh peneliti ke berbagai pihak yang membacanya.

#### **BAB 4. LATAR BELAKANG DAN PROSES TERJADINYA KONFLIK INTERNAL SAREKAT ISLAM TAHUN 1914-1936**

Pada awalnya Sarekat Islam didirikan oleh pedagang-pedagang Islam di Jawa Tengah dengan maksud melawan persaingan pedagang-pedagang Cina dan praktik imperialisme Belanda. Pada tahun 1912 sempat terjadi perdebatan antara Haji Samanhudi dan Cokroaminoto mengenai langkah selanjutnya dari SI. Haji Samanhudi yang lebih disibukkan dengan kegiatan perdagangan kemudian menyerahkan tampuk pimpinan kepada Cokroaminoto.

Pemimpin baru ini kemudian meluaskan ruang lingkup organisasi ini melewati tujuan awal yang dianggap terlalu sempit, menjadi tujuan luas yang mencakup keseluruhan umat Islam Bumiputera dengan tujuan menentang praktik kolonialisme Belanda. Dengan berlandaskan semangat Pan-Islamisme, Sarekat Islam memulai pergerakannya.

Sejak Sarekat Islam disahkan oleh notaris, organisasi ini terus berkembang dengan pesat. Sarekat Islam telah bekerjasama dengan Muhammadiyah sejak 1913. Kedua lembaga tersebut sejak awal berjuang bersama dalam wilayah yang berbeda. Muhammadiyah membangun Islam dalam wilayah Sosial-Religio, sedangkan SI memperjuangkan Islam melalui Jalur Politik.

Pada tahun 1919 Sarekat Islam mengklaim keanggotaan sebanyak 2 juta orang. Perkembangan Sarekat Islam yang bisa dikatakan sangat cepat ini, dikarenakan sebagian besar orang Indonesia pada waktu itu masih belum mempunyai artikulasi politik yang tinggi. Mereka menganggap kehadiran Sarekat Islam sebagai simbol protes melawan keadaan yang tengah berlangsung. Selain itu Sarekat Islam dalam hal cangkupan wilayah dan keanggotaannya yang lebih luas dari Budi Utomo, juga menjadi alasan pertumbuhan pesat keanggotaan Sarekat Islam. Jika Budi Utomo keanggotaannya hanya sebatas para priyayi yang terdapat di Jawa, maka Sarekat Islam lebih luas lagi dari itu, mereka mencakup keanggotaan hingga ke luar pulau Jawa. Orang-orang Bumiputera yang masih kental dengan adat kejawaan, menganggap Cokroaminoto sebagai penjelmaan ratu

adil, sehingga menyebabkan orang-orang pedesaan berbondong-bondong bergabung dengan organisasi ini.

Saat SI mulai melebarkan sayap organisasi, Gubernur Jenderal Idenburg secara hati-hati mendukung SI, dan dia memberi pengakuan resmi kepada SI. Meskipun demikian, dia hanya mengakui organisasi-organisasi Sarekat Islam lokal tersebut sebagai suatu kumpulan cabang-cabang yang otonom saja daripada sebagai suatu organisasi nasional yang dikendalikan oleh markas pusat organisasi. Akibatnya pusat organisasi Sarekat Islam kesulitan untuk mengatur organisasi-organisasi daerah itu, sehingga konsolidasi pun sulit dilaksanakan.

Pengesahan terhadap SI beserta syarat-syarat kelembagaannya diterima dengan baik oleh Cokroaminoto sebagai pemimpin SI. Melihat kenyataan yang dapat meruntuhkan keberadaan SI, Cokroaminoto mengadakan kongres Nasional SI pertama pada 17-24 Juni 1916 yang bertempat di Bandung. Kongres tersebut membentuk Central Sarekat Islam (CSI). CSI dibentuk sebagai federasi dari berbagai SI lokal yang tersebar di seluruh Indonesia.

Pasca terbentuknya CSI, Cokroaminoto melakukan kunjungan ke berbagai daerah untuk membentuk organisasi SI lokal. Melalui kemampuan berpidato dan suaranya yang berwibawa, Cokroaminoto menjadi sosok panutan dalam SI. Hampir setiap warga desa yang menggabungkan di dalam SI, selalu mengeluh-elukan Cokroaminoto sebagai ratu adil. Sadar akan kemampuannya, Cokroaminoto semakin luas mempropandakan SI di berbagai daerah Indonesia.

Selain Cokroaminoto, terdapat beberapa tokoh penting SI yang juga melakukan hal serupa, seperti Raden Gunawan, Abdul Moeis, dan Haji Agus Salim. Raden Gunawan melakukan propaganda di Jawa Barat hingga Sumatra Selatan. Abdul Moeis, melakukan propaganda di Sumatera Barat. Haji Agus Salim, melakukan propaganda ke berbagai daerah di Indonesia, selain melakukan propaganda Haji Agus Salim juga memperkuat basis ideologis kelembagaan SI.

Seiring berkembangnya Sarekat Islam, ideologi Sosialis-Komunis juga mengalami perkembangan di Indonesia. Sosialisme Komunis di Indonesia yang disebarkan oleh propagandis Belanda seperti: Sneevliet, Barandsteder, Ir. Baars, Brigmsma, dan Van Burink. Mereka membentuk organisasi pergerakan

sosialis Indische Sociaal Democratische Vereeniging (ISDV) di Semarang. Untuk memperjuangkan kepentingan buruh, ISDV kemudian membentuk *Vereeniging voor Spoor en Tramweg Personeel* (VSTP).

Pergerakan yang dilakukan kaum sosialis ini, ternyata menarik simpati para anggota SI, sehingga beberapa anggota SI turut serta menjadi anggota ISDV dan VSTP. Dimulai dengan munculnya Semaoen yang merupakan anggota VSTP sebagai ketua SI Semarang, diikuti masuknya para anggota SI yang lain ke dalam organisasi-organisasi tersebut, hal ini tentu saja memperkuat posisi kaum sosialis.

Sosialis-Komunis menjadi wacana baru bagi para anggota Sarekat Islam, selain Pan Islamisme. Munculnya kaum sosialis di dalam Sarekat Islam menimbulkan suatu intrik ideologi di dalam SI, yang akan dibahas dibawah ini.

#### **4.1 Perbedaan Ideologi**

Pada tahun 1913 di saat Sarekat Islam sedang melaksanakan gerak langkahnya yaitu berlangsungnya kongres Sarekat Islam pertama di Surabaya, Hendricus Josephus Franciscus Marie Sneevliet (Seorang Belanda) datang ke Jawa sebagai sekretaris dari suatu perkumpulan dagang. Ia seorang anggota *Social Democratische Arbeiders Partij* (SDAP) atau Partai Buruh Sosialis Demokrasi di negeri Belanda. Sneevliet bersama-sama temannya seperti Baars, Bergsma, Branstater, Dekker, C.Hartogh orang yang pertama-tama membawa ke bumi Indonesia ajaran sosialisme yang dilandasi oleh teori Marxis dan Engels (Abdulgani, 1963:24). Langkah yang pertama yang dilakukan Sneevliet di Semarang adalah menggabungkan diri dengan Sarekat Buruh Kereta Api yang tertua di Indonesia yaitu *Vereeniging van Spoor en Tremweg Personeel* (VSTP) yang organisasinya sudah tersusun secara rapi dan baik. Sebagai seorang pemimpin sosialis yang berpengalaman dalam waktu singkat telah berhasil mempropagandakan ide sosialisme dan membawa VSTP ke arah yang lebih radikal. Hampir serentak beberapa agennya juga mulai mencari jalan untuk masuk Sarekat Islam cabang Semarang. Aktivitas mereka mendapat fasilitas karena diterimanya pemikiran-pemikiran sayap kiri di Semarang. Dalam beberapa tahun

(kira-kira mendekati tahun 1916) beberapa orang yang memegang posisi kunci mengawasi ketiga organisasi.

Cabang Semarang menjadi kelompok yang sukar diawasi oleh pimpinan pusat Sarekat Islam. Walaupun menurut tujuan utama Sarekat Islam untuk meningkatkan standart rakyat Indonesia, kelompok Semarang menolak penampilan Islam dan menyerukan aksi revolusioner dan dengan provokatif menuduh anggota-anggota Sarekat Islam yang moderat sebagai borjuis. Penamaan borjuis pada umumnya dipakai oleh penulis sosialis jika membicarakan Sarekat Islam.

Sneevliet dan kelompoknya menyadari, bahwa pengawasan terhadap gerakan revolusioner mereka akhirnya harus dilahirkan oleh orang Indonesia. Mereka mulai mendidik pengikut-pengikut yang akan membawa ajaran mereka. Yang paling terkemuka diantara para pemuda Indonesia yang diindoktrinasi oleh Sneevliet ialah Semaun, orang muda dari beberapa priyayi rendahan. Semaun mempunyai pikiran yang terang dan membuktikan sebagai murid yang mempunyai kesanggupan segera saja ia menjadi salah seorang diantara pemimpin-pemimpin ISDV, sambil di tempat lain memegang jabatan penting di Buruh Kereta Api tempat dimana ia ditemukan sebelumnya. Menjelang tahun 1916 ia berusaha keras mendapat posisi yang tinggi di Sarekat Islam cabang Semarang dan menjelang tahun 1918 berhasil menjadi anggota badan sentral organisasi ini (Niel, 1958:169).

Sesudah mendapat pengesahan pada tahun 1916, kejadian-kejadian di dalam dan mengenai Sarekat Islam dapat dengan mudah dilihat melalui analisa kongres nasional tahunan yang diadakan organisasi. Kongres ini yang terdiri atas wakil-wakil dari cabang setempat, mendengarkan dan membahas berbagai masalah dan rencana tahunan yang sedang berjalan. Di dalam tubuhnya sendiri hal seperti itu menunjukkan proses demokrasi yang cukup, akan tetapi keputusan tentang hal-hal yang akan diikuti biasanya hanya dibuat oleh beberapa orang saja. Dari catatan rapat-rapat ini dapat dilihat sekarang bagaimana konflik-konflik mengenai ide dan ambisi di dalam organisasi dan dengan cara ini terlihat

bagaimana pergulatan terdapat di dalam elite baru yang sedang berkembang tersebut.

Dalam kongres nasional Central Sarekat Islam pertama di Bandung tanggal 17-24 Juni 1916 yang dihadiri oleh 20 wakil-wakil Sarekat Islam daerah. Istilah nasional di sini dimaksudkan agar organisasi ini bertujuan ke arah persatuan semua golongan bangsa Indonesia dan berusaha meningkatkan derajat pribumi setaraf dengan bangsa-bangsa lain. Meskipun selalu terlempar tuduhan bahwa Sarekat Islam akan menggunakan cara kekerasan namun jelas dalam keputusan kongres ini Sarekat Islam akan mewujudkan cita-citanya akan selalu menempuh cara-cara konstitusional dan dengan jalan evolusi berusaha agar bangsa Indonesia dapat turut serta dalam pemerintahan (Mukayat, 1981:32).

Pertumbuhan Sarekat Islam yang sangat pesat ini menimbulkan rasa tidak senang dari pemerintah kolonial, sedang di lain pihak organisasi National Indische Partij (NIP) dan ISDV berusaha untuk mendapatkan pengaruhnya dalam tubuh Sarekat Islam. Kedua organisasi ini jelas berhaluan sama, yaitu sosialisme kiri, sedang sasarannya adalah rakyat jelata, namun karena organisasi ini dipimpin oleh peranakan Indo Belanda, maka tidak mendapat tempat di hati rakyat. Inilah yang menyebabkan bahwa kedua organisasi tersebut mengarahkan tujuannya pada Sarekat Islam.

Di dalam usahanya ISDV lebih berhasil karena memiliki program yang hampir sama dengan Sarekat Islam, yaitu menentang kapitalisme, sedangkan yang utama taktiknya dapat memasukkan tenaga muda yang militan dalam tubuh Sarekat Islam. Yang menarik dari kongres pertama Central Sarekat Islam (CSI) di Bandung, bahwa Cokroamonoto dalam pidatonya dapat menempatkan posisi bangsa Indonesia terhadap Belanda terhadap bagaimana seharusnya, sedangkan semua dalam kongres ini berpendapat secara terang-terangan menentang paham yang berdasarkan agama sebagai dasar pergerakan (Amelz, 1952:117).

Kongres nasional Sarekat Islam yang kedua diadakan di Jakarta pada tanggal 20-27 Oktober 1917. Langkah-langkah yang diambil terutama ditujukan pada pemerintah jauh lebih maju dan lebih berani daripada sebelumnya, namun sifat dari pergerakan masih tetap parlemen evolusioner. Corak lain di dalam



kongres diwarnai adanya perbedaan pendapat, Semaun yang pada waktu itu menjabat sebagai ketua cabang Sarekat Islam Semarang dengan pemimpin Sarekat Islam lainnya. Semaun mengusulkan agar Sarekat Islam tidak perlu ikut campur dalam gerakan Indie Weerbaar, dimana Abdul Muis duduk sebagai wakil Sarekat Islam. Selain Semaun menentang masuknya Sarekat Islam dalam Volksrand yang akan dibentuk.

Usul ini ditolak oleh kongres dan Abdul Muis tetap dikirim ke negeri Belanda. Pada waktu itu Haji Agus Salim menentang usul Semaun tentang keanggotaan Sarekat Islam dalam Volksrand, ia berpendapat bahwa Volksrand merupakan forum untuk “aksi” dan dapat bertindak sebagai penasihat bagi parlemen yang konservatif. Akhirnya Sarekat Islam dan Sentral Sarekat Islam menyetujui pengangkatan Cokroaminoto dan Abdul Muis (Mukayat, 1981:33). Dengan demikian Sarekat Islam menjalankan politik kooperasi.

Dalam kongres nasional Sarekat Islam ketiga di Surabaya pada tanggal 29 September 1918 diputuskan untuk menentang pemerintah Belanda bila dalam tindakannya masih melindungi kapitalisme. Pegawai pemerintah dianggap sebagai alat penyokong kaum kapitalisme. Selain itu menuntut supaya ditentukan upah minimum dan jam maksimum bagi kaum buruh (Noer, 1982:135). Perbedaan pendapat antara ISDV dan Sarekat Islam tak dapat dihindarkan, sedang gerakan buruh semakin besar dan menjadi perebutan dari kedua golongan tersebut, maka diputuskan untuk mengadakan pemogokan-pemogokan yang teratur untuk memperbaiki nasib, mencari keadilan dan melawan perbuatan sewenang-wenang. Pada akhirnya gerakan buruh ini mendapat dukungan dari organisasi pergerakan yang ada. Wadah dari organisasi buruh yaitu Persatuan Pergerakan Kaum Buruh Hindia (PPKB) didirikan pada tanggal 15 Desember 1919, pemimpinnya Semaun dan wakilnya Suryopranoto, dan ia menghendaki PPKB ini berpusat di Yogyakarta. Oleh Semaun ini dianggap suatu usaha untuk mengeluarkan orang-orang komunis. Kemudian Semaun keluar dari PPKB dan didirikan Federasi baru *Revolutionaire Vacentrale* (Noer, 1982:135). Sarekat kerja pegadaian yang merupakan salah satu anggota PPKB yang terpenting, yang pada waktu itu

dipimpin oleh Cokroaminoto, Abdul Muis dan Agus Salim dalam kongresnya bulan Juli memutuskan untuk segala hubungannya dengan pihak komunis.

Keberhasilan revolusi Oktober di Rusia pada tahun 1917 berpengaruh dalam pergerakan nasional terutama organisasi yang berhaluan Marxis. ISDV semakin jelas berpaham kiri dan menyatakan dirinya sebagai partai komunis karena itu usahanya untuk merongrong Sarekat Islam dengan memengaruhi kebijaksanaan pimpinan serta menarik sebanyak-banyaknya anggota Sarekat Islam semakin gencar. Perpecahan dari kedua kelompok dalam tubuh Sarekat Islam tidak dapat dihindarkan. Untung sekali Sarekat Islam berhasil diselamatkan dari kemelut itu terwujudnya dwi tunggal pimpinan Sarekat Islam, yaitu HOS. Cokroaminoto dan Haji Agus Salim (Mukayat, 1981:38).

Sebenarnya dalam menghadapi propaganda kaum kiri dalam tubuh Sarekat Islam para pemimpinnya bertindak sangat toleran. Hal itu dapat dibaca dalam anggaran dasarnya bahwa Sarekat Islam pun menentang kapitalisme yang berdosa. Cokroaminoto tidak menghendaki perpecahan dan selalu bertindak bijaksana. Dalam hubungan Islam dan sosialisme ia berpendapat bahwa di dalam Islam senarnya sudah terkandung unsur-unsur sosialisme. Agama Islam menghendaki keadilan dan kemakmuran rakyat melalui cara-cara yang legal dan diridhoi oleh Tuhan (Poespoprodjo, 1984:38). Sosialisme memang mengajarkan dua jalan, yaitu dengan jalan lunak yang berarti reformis dan bersedia kompromi dengan mudah, sedangkan yang kedua tidak kenal kompromi dan dalam memperjuangkan cita-citanya bersifat dinamis dialektis. Aliran inilah yang kemudian menjelma menjadi komunis dan memang komunisme diajarkan *Hat doel heilinght de middelen* (tujuan menghalalkan cara). Jadi jelaslah di sini sosialisme yang dikehendaki Sarekat Islam ialah sosialisme religius.

Kelompok Marxis yang semakin kuat ini terlihat pada perubahan nama yang tegas, yaitu ISDV menjadi Partai Komunis India (PKI) pada tanggal 23 Mei 1920 dengan susunan pengurus Semaun sebagai ketua dan Darsono sebagai wakil. Dalam kongres PKI istimewa tanggal 24 Desember 1920 Semaun dengan berani menyerang Sarekat Islam. Ia mengatakan bahwa Sarekat Islam sebenarnya

dikendalikan oleh kaum saudagar dan kaum industri, itu justru malahan menyokong kapitalisme dan merugikan pergerakan rakyat (Mukayat, 1981:39).

Untuk menjaga kelestarian dan perkembangan Islam Agus Salim menerapkan disiplin partai. Setiap anggota Sarekat Islam harus memilih salah satu keanggotaan saja, tidak diperkenankan beranggotakan ganda. Dengan diterimanya ide disiplin partai maka Semaun Cs keluar dari Sarekat Islam. Inilah yang menjadi penyebab langsung pecahnya cabang-cabang Sarekat Islam Putih, yaitu yang masih setia pada pimpinan dwi tunggal HOS. Cokroaminoto dan Haji Agus Salim, sedangkan Sarekat Islam Merah mengikuti jejak Semaun dan Darsono yang menggantikan nama organisasinya Sarekat Rakyat sebagai onderbouw (susunan bawah) dari partai Komunis India.

Penyelesaian perbedaan dalam Sarekat Islam, tidak dapat terwujud, yang terjadi adalah perpecahan total antara kelompok Semarang dan Yogyakarta. Semarang dikuasai Semaun, Yogyakarta dikuasai Sarekat Islam Putih. Konflik terbuka tidak dapat dihindarkan lagi. Agus Salim dan Abdul Muis bertekad tempur membersihkan Sarekat Islam dari orang-orang komunis sampai akar-akarnya.

#### **4.1.1 Gerakan Pan-Islamisme**

Pergantian Gubernur Jenderal yang semula dipegang oleh Joannes B Van Heutz (1904-1909) dan digantikan oleh A. Willem Frederick Idenburg (1909-1916) memiliki keuntungan serta kerugian dalam pergerakan SI menjelang tahun 1916. Persebaran kekuatan SI menjadi perhatian khusus bagi Idenburg menjelang akhir jabatannya. Perhatian khusus tersebut akhirnya berujung pada pemberian persetujuan terhadap pengajuan SI sebagai organisasi yang sah di Indonesia. Perlu dicermati lebih lanjut, pemberian legalitas terhadap SI bukan berarti SI dapat secara bebas untuk melakukan berbagai kegiatan yang seperti diharapkan. Pemberian legalitas tersebut pada dasarnya untuk menekan laju perkembangan SI tersebut terlihat ketika setiap SI yang tersebar di berbagai daerah, harus memiliki Anggaran Dasarnya masing-masing untuk disahkan sebagai Organisasi yang legal. Artinya, SI harus mengubah sifat organisasinya yang sebelumnya terpusat

dengan cabang-cabang di berbagai daerah, kini berubah dan setiap daerah memiliki kewenangan untuk memimpin kelembagaan SI-nya masing-masing.

Pengesahan terhadap SI beserta syarat-syarat kelembagaannya diterima baik oleh Cokroaminoto sebagai *Hoofdbestuur* SI. Melihat kenyataan yang dapat meruntuhkan keberadaan SI, secara sigap Cokroaminoto tepat pada tanggal 17-24 Juni 1916, mengadakan Kongres Nasional SI pertama yang diadakan di Bandung. Kongres tersebut pada dasarnya untuk membentuk Central Sarekat Islam (CSI). CSI dibentuk sebagai federasi dari berbagai SI Lokal yang tersebar seluruh Indonesia. CSI secara structural dipegang sepenuhnya oleh Cokroaminoto dengan berbagai variasi kepengurusan dalam setiap tahun pergantiannya.

Pasca terbentuknya CSI, Cokroaminoto melakukan kunjungan ke berbagai daerah untuk membentuk beberapa organisasi SI Lokal. *Vergadering* mulai diberlakukan untuk menandai proses pembentukan SI. Melalui kemampuan berpidato serta kekuatan suara baritonnya, Cokroaminoto menjadi cahaya terang dalam SI. Hampir setiap warga bumiputera menggabungkan dirinya dalam SI. Cokroaminoto selalu dielu-elukan sebagai Ratu Adil. Sadar atas kemampuan serta daya tarik mistisnya sebagai orang Jawa, Cokroaminoto semakin luas mempropagandakan SI di berbagai daerah untuk memperkuat basis SI di desa-desa di seluruh wilayah Indonesia.

Selain Cokroaminoto, berbagai tokoh penting SI juga melakukan hal yang sama, seperti Raden Gunawan, Abdul Moeis, serta Haji Agus Salim. Raden Gunawan melakukan propaganda di Jawa Barat hingga Sumatera Selatan. Abdul Moeis, melakukan propaganda di Sumatera Barat. Haji Agus Salim, dia melakukan propaganda di berbagai daerah Indonesia, melalui pemikiran islamnya, ia memperkuat basis ideologis dalam kelembagaan SI. Selain mereka, masih banyak anggota SI lainnya, salah satu kader SI yang masih muda dan progresif muncul di Semarang, Semaoen. Semaoen sebelumnya aktif sebagai propagandis *Vereniging Voor Spoor en Tramweg Personeel* (VSTP) dan tepat pada 6 Mei 1917 ia menjadi ketua SI Semarang.

Pasca dibentuknya CSI sebagai federasi SI Lokal di berbagai daerah, Cokroaminoto beserta aktivis SI lainnya, kembali menyuarakan islam sebagai

basis pergerakan SI. Identitas islam tidak hanya digunakan untuk sekedar mengikat kaum pedagang bumiputera sebagai kelompok social yang relative bebas, akan tetapi juga pada penerapan perilaku islam dalam masyarakat. Sebuah kenyataan tidak dapat ditolak, bahwa islam telah melebut sebagai identitas bumiputera saat itu. Kebesaran SI melalui identitas islam tidak hanya sekedar mengikat tali persaudaraan di antara bumiputera dalam beberapa hal, akan tetapi islam selayaknya jadi pengikat semuanya.

Gagasan islam yang disuarakan oleh Cokroaminoto seperti halnya pedang bermata dua, di satu sisi, islam dijadikan sebagai isu untuk mengikat kembali para pemodal Arab dan keturunannya yang sejak 1914 keluar sebagai donator tetap SI dalam Oetoesan Hindia. Di sisi lain, Cokroaminoto menggunakan islam sebagai media pengikat bumiputera dalam melakukan perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda. Dengan demikian, Cokroaminoto telah memainkan sebuah permainan yang sangat baik dalam pergerakan bumiputera dan khususnya untuk SI. Kembalinya para donator Arab, tentunya akan memberikan sumbangan dana bagi perjuangan SI dalam mengawal bumiputera yang mayoritas beragama Islam. Ketika pergerakan SI semakin kuta, SI dapat menggerakkan bumiputera dalam melawan penjajah Belanda.

Strategi yang diaminkan oleh Cokroaminoto ternyata memiliki dampak besar bagi perkembangan SI. Organ tersebut terus meningkat dan mendapat dukungan dari berbagai pihak, khususnya umat islam Bumiputera. Seperti halnya berikut ini:

Saja rasa Vereeniging anak negeri bangsa kaoem moeslimin, juga ada di Hindia Olanda tidak ada jang besar, dsn blom perna Vereeniging anak negeri di H.O. jang soeda mendjadi kembang bibirnja dari roepa-roepa bangsa jang ada iu H.O. dan djadjahan lainnja, maoepon sampe dibenoewa Europa, Hedjaz, dll. Selainnja dari vereen; SI tapi saja rasa makanja sampe begitoe djaoeh terdengarnja boekan dari djahat of baiknja ini vereen SI, tjoema sadja orang orang lain bangsa ada sedikit kaget mendengar dan melihat dari tjepetnja Kaoem Moeslimin H.O soedah mengetahoei robahnja djaman, dan kemanoesiaan, kemadjoean kebangsaan menoeroet diini djaman jang, Modern sampe dalam sedikit tempo sadja vereen SI di H.O soedah mempoedja 600,000 lid lid (Suradi, 1997:57)

Maksud dari pernyataan di atas, pada dasarnya menjelaskan bahwa berkembangnya SI adalah akibat adanya kesadaran rakyat bumiputera dan perkembangan umat islam di Indonesia. Selebihnya tulisan tersebut, ingin menjelaskan bahwa perkembangan SI seharusnya disambut baik bagi semua kalangan bumiputera tanpa harus menghasut dan mencela keberadaan SI beserta anggota –anggotanya. Kebesaran SI sudah menjadi bukti bahwa SI yang telah memiliki keanggotaan mencappai 600.000 orang, melalui perkembangan umat islam adalah baik untuk perkembangan bumiputera kedepannya.

Pada tahap inilah, SI kembali berjuang dengan menggunakan semangat Islam dan melebur serta memprakarasi terbentuknya berbagai organ lain dalam memperjuangkan hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan dan kemajuan islam di Indonesia, perkembangan SI yang dimaksudkan sebagai bagian dari perkembangan umat islam di Indonesia tentu menjadi bagian penting proses pergerakan yang dilakukan oleh SI itu sendiri. Usaha untuk memajukan serta menolong berbagai hal berkaitan dengan perkembangan umat islam, menjadi sebuah hal yang tidak dapat dipisahkan dari sifat dan fungsi SI di Indonesia. Seperti halnya proses kemunculan organisasi yang bernama *Alhelal Ahmar* dari Consulat general Turki. Organ ini berkedudukan di Betawi yang bertujuan untuk membantu secara medis bagi para militer yang sedang berperang. Organisasi ini disambut baik berbagai kalangan baik SI maupun bumiputera lainnya, khususnya yang beragama Islam, sehingga berbagai organ tersebut mulai bermunculan di berbagai daerah di Indonesia.

Selain itu, berbagai kebutuhan berkaitan dengan upaya peningkatan pengajaran umat islam juga menjadi kebutuhan mendesak untuk diperjuangkan. Muhammadiyah sebagai organ bumiputera yang berkonsentrasi dalam bidang pendidikan serta pembaharuan islam, bersama-sama dengan SI turut memajukan pendidikan bagi bumiputera. Kebutuhan terhadap para Guru serta berbagai panduan system pengajaran baca tulis Al-Qur'an muncul atas kesadaran umat islam di Indonesia., juga sebagai program yang secepatnya haraus direalisasikan untuk kemajuan Islam di Indonesia.

Satu hal lagi yang juga diupayakan oleh SI beserta bumiputera lainnya adalah menggalang pendanaan bagi para haji yang tidak dapat pulang ke Indonesia akibat kekurangan uang. Kabar tentang adanya para haji yang kekurangan uang disampaikan secara tertulis oleh Consulat General Ottoman di Betawi. Menyebarnya kabar tentang para haji yang kekurangan dana untuk perjalanan pulang ke Indonesia juga diterima oleh Dr. D.A Rinkes sebagai penasehat Gubernur Jenderal di Indonesia dan diteruskan kepada petinggi bumiputera. Para petinggi bumiputera akhirnya membentuk sebuah komite penolong haji-haji yang bermukim di Mekkah. Kesepakatan pembentukan komite ini ditandatangani oleh beberapa pihak seperti berikut ini; 1) R.A.A Achmad Djajadiningrat (regent te Sarang), 2) Hadji Hassan Moetapa (*Hoofdepangholoe te Bandung*), 3) Dr. D.A.A Rinkes (*Adviseur voor Inlandsch Zaken, te Weltevreden*), 4) R. Pengoeloe Tafsir Anom (*Hoofdepengoeloe te Solo*), 5) R.O.S Cokroaminoto (*President Central S.I., te Soerabaja*).

Upaya SI untuk membantu para Haji yang kekurangan uang pada dasarnya untuk menyelamatkan serta membantu bumiputera, bahwa Haji merupakan bagian penting dalam proses perkembangan SI untuk mengawal bumiputera ke depan. Melalui para Haji inilah, pendidikan islam dapat berkembang secara cepat di Indonesia. Selain itu, upaya membantu para Haji tersebut adalah untuk menyelamatkan asset SI, karena para Haji menjadi garda terdepan dalam melawan kebijakan Kristenisasi yang diterapkan oleh Pemerintah Hindia Belanda.

#### **4.1.2 Gerakan Sosialisme Islam**

Politik etis sebenarnya dimaksudkan untuk mengimbangi perkembangan kapitalisme, sekaligus untuk memperkuat basis perkembangan modal dan pemerintah jajahan, dengan perbaikan administrasi. Tahun 1913-1914 tampaknya merupakan titik balik perkembangan kapitalisme. Dalam masa 1913-1914 keadaan perekonomian tidak banyak bertambah baik, mungkin bertambah buruk. Perusahaan gula mengalami krisis sejak tahun 1918 dan krisis ekonomi timbul pada tahun 1920-1921. Dalam periode 1921-1925 ekspor menurun 8,3 persen dan

turun lagi 15,5 persen dan turun seterusnya hingga menjelang Perang Dunia II. Keadaan kehidupan rakyat bertambah buruk. Di bawah Gubernur Jendral Fock, pajak ekspor dicabut dan pajak industri gula dikurangi, tetapi pajak kepala rakyat di Jawa dan Madura, ditambah atau naik sebesar 40%. Kegelisahan rakyat itu dimanifestasikan oleh pemberontakan-pemberontakan petani di Jambi (1916), Pasar Rebo (1916), Tjimareme (1918), Toli-Toli (1920), kemudian pemberontakan di Banten, Sumatera Barat dan Prambanan sekitar tahun 1926 dan 1927. Pada tingkat dunia, kapitalisme imperial internasional mulai mengalami masa krisis sejak tahun 1914 dan masa itu ditandai oleh usaha pengorganisasian kembali kapitalisme industrial yang mulai tumbuh sejak bagian pertiga terakhir abad XVIII dan bagian pertiga dari abad XIX serta mengalami konsolidasi ke dalam dan ekspansi imperial keluar dalam periode 1825- 1870 (Kartodirdjo, 1976:81-84).

Sarekat Islam dan organisasi pergerakan nasional lainnya di Indonesia, menyatakan perang terhadap kapitalisme dan melihat sosialisme sebagai alternatif. Sarekat Islam juga menengok ke sosialisme dalam konteks yang mudah dipahami, tetapi Sarekat Islam menolak marxisme, seperti yang dibawa oleh Semaun, yang pada tahun 1932 diasingkan pemerintah Hindia Belanda, atau Tan Malaka yang juga lari keluar negeri setelah pemberontakan PKI 1926. Tetapi rupanya bagi Sarekat Islam dan persepsi Cokroaminoto, Sarekat Islam pada awal dasawarsa 1920-an menghadapi tugas dan tuntutan untuk bisa mengembangkan dirinya yaitu pertama, mempelajari masyarakat Indonesia sendiri secara lebih baik, kedua memperdalam pengetahuan mengenai ajaran-ajaran Islam dan mengalami proses Islamisasi lebih lanjut dan mengetahui lebih baik apa sebenarnya sosialisme itu, karena itu maka Soerjopranoto dalam kursus-kursus Sarekat Islam di Yogyakarta diminta untuk mengajarkan sosiologi sebagai alat analisa untuk memahami masyarakat Indonesia dan KH. Fachrudin diminta untuk mengajarkan agama Islam. Cokroaminoto sendiri yang merasakan kekurangannya dalam hal keislaman berusaha memperdalam pengetahuannya dan membaca antara lain buku *The Spirit of Islam* karya Sayed Ameer Ali, *The Ideal Propet* dan juga *Tafsir Al Quran* karya Maulana Muhammad Ali sehingga ia mampu menulis buku *Tarekh Islam* (Amelz,



1952:137-138). Menjelang kongres Al Islam di Garut tahun 1922, Cokroaminoto merasa perlu untuk menulis artikel berjudul “Apakah Sosialisme itu” dan Sosialisme berdasar Islam, dalam Koran Sarekat Islam. Usaha untuk mengetahui lebih jauh apa sosialisme itu dilanjutkan dengan hasil sebuah buku Islam dan Sosialisme, terbit tahun 1924, (Amin, 1980:35). Dalam kursus-kursus Sarekat Islam, Cokroaminoto mendapat tugas mengajar tentang sosialisme.

Cokroaminoto dalam buku Islam dan Sosialisme ternyata menolak filsafat Historis Materialisme Karl Marx walaupun sebenarnya Cokroaminoto keliru dalam memahami metode ilmiah Marx itu, mungkin karena tak sempat membaca langsung karya Marx yang tidak mudah dipahami dengan alasan historismaterialisme itu, mungkir kepada Allah dan juga bertuhankan benda, tetapi menganggap segala sesuatu itu pada hakikatnya benda atau berasal dari benda, termasuk akal dan perasaan (Cokroaminoto, 1963:22). Cokroaminoto sebenarnya cukup paham untuk tidak mencampuradukkan pengertian materialisme dalam bahasa pergaulan yang diartikan sebagai sikap hidup yang dikuasai oleh keserakahan yang justru ditentang oleh Marx dengan Materialisme sebagai paham filsafat yang serba benda, tetapi Cokroaminoto tak berhasil memahami arti metode materialisme historis sebagai alat analisa untuk memahami hukum-hukum dan realitas perkembangan masyarakat dari tahap komunal primitif hingga ke tahap sosialis berdasarkan postulat bahwa bukanlah kesadaran masyarakat yang berwujud paham metafisik, hukum, Negara dan berbagai kelembagaan masyarakat, yang menentukan kondisi hidup, sebaliknya kondisi masyarakatlah yang coraknya berintikan modal produksi atau cara berproduksi yang ditandai oleh hubungan sosial dari produksi dan tahap perkembangan organisasi ekonomilah yang pada dasarnya menentukan struktur kesadaran masyarakat yang tercermin pada ideology mereka.

Tujuan filsafat materialisme Marx adalah menunjukkan bahwa kenyataan itu ada secara objektif dan bukan hanya ada karena ide-ide dan kesadaran manusia. Materialisme Marx akan lebih mudah dipahami jika diletakkan dalam posisi dengan paham idealisme yang mengingkari kemungkinan adanya realitas di luar ide-ide dan kesadaran, tetapi yang terlebih penting untuk diketahui tentang

buku Islam dan Sosialisme adalah, apa yang menjadi tujuan utama Cokroaminoto. Tujuan Cokroaminoto tampaknya adalah untuk membuat perhitungan terhadap ideologi sosialisme. Cokroaminoto pertama-tama mengambil sikap terbuka. Ia selalu berkata, “Seorang Islam sejati dengan sendirinya menjadi sosialis dan kita kaum muslimin, jadi kita kaum sosialis” (Amelz, 1952:115). Sosialisme sebagai cita-cita kemasyarakatan bagi dia sejalan dengan Islam, sepanjang ia bertujuan memperbaiki nasib kelompok manusia termiskin dan terbanyak bilangannya, agar supaya mereka bisa mendapatkan nasib yang sesuai dengan derajat manusia, tetapi dia menyadari juga bahwa sosialisme bukan semata-mata stelsel ekonomi, melainkan mengandung ajaran filsafat tertentu. Selain itu dia melihat bermacam-macam wujud stelsel yang diberi nama sosialisme. Oleh karena itu, dia ingin menjernihkan pengertian tentang apa sebenarnya sosialisme itu, sementara itu dia tahu bahwa pada umumnya masyarakat Indonesia, khususnya golongan terbawah tidak tahu apa itu sosialisme, karena tidak adanya kepustakaan yang cukup dalam bahasa Indonesia. Atas dasar itulah dia ingin menyiarkan pengetahuan selukbeluk sosialisme kepada masyarakat.

Soal penting lain lagi bagi Cokroaminoto adalah bahwa umat Islam dan bangsa Indonesia, termasuk golongan dan pimpinan Sarekat Islam sendiri, ternyata kurang pengetahuannya tentang Islam itu sendiri. Itupun dia rasakan pada dirinya sendiri. Karena itu, orang harus susah payah memusatkan perhatiannya pada suatu ideologi dari Eropa. Sementara, tentang agama yang sudah dipeluknya sendiri pengetahuannya kurang luas atau mendalam. Dia juga khawatir bahwa unsur-unsur kebajikan agama pada lapisan-lapisan masyarakat terbawah tampak makin lemah dan secara perlahan-lahan pergerakan rakyat yang bersifat sosialis itu semakin bertambah teguh bersandar kepada kebendaan belaka. Atas dasar inilah dia memutuskan untuk sekaligus membicarakan sosialisme dalam kerangka yang lebih luas dari ajaran-ajaran sosial Islam itu sendiri, sambil membantah perkataan orang yang menyatakan agama Islam tidak cakap memajukan halhal yang bertalian dengan politik, sosial dan ekonomi.

Buku Islam dan Sosialisme, ternyata hanya merupakan kajian awal. Dalam kongres PSSI, yaitu Sarekat Islam yang sudah lebih tegas bersifat keindonesiaan

di Surabaya tahun 1931, Cokroaminoto disertai menyusun program asas dan program tandhim. Di situlah ia memperoleh kesempatan untuk mengkonkritkan gagasannya. Ia menggali ajaran-ajaran Islam tentang persatuan umat, konsep tentang negara dan pemerintah, serta pembahasan tentang nilai-nilai kemerdekaan, persamaan dan persaudaraan menurut Islam. Di samping itu, dia mengupas pula masalah penghidupan ekonomi, termasuk mengupas realitas kapitalisme dengan mengutip analisa dari partai sosialis Jerman dalam kongresnya di kota Erfurt tahun 1891. Pada tahun 1932 ia juga ditugaskan untuk menyusun “Reglement Umum Bagi Islam” yang memberi pedoman umum bagi kehidupan sosial Islam, guna menciptakan apa yang disebutnya Islam gemeente atau Islam gemeenschap atau “perikatan hidup Islam”, sebab dengan rasa prihatin yang mendalam ia melihat umat Islam belum sekaligus menjadi suatu umat: tidak ada maksud dan tujuan bersama, tidak ada keperluan bersama, tidak merasa hidup bersama di dalam satu roh.

Keprihatinan itu dirasakan juga oleh Haji Agus Salim, pengikut Cokro yang kesetiiaannya tidak tertara, yang melihat golongan pemuda terpelajar sangat kurang dan bahkan picik pengetahuannya tentang Islam, sekalipun mereka mengaku beragama Islam. Usulnya untuk mengadakan kursus guna memajukan pengetahuan tentang Islam pada Jong Java ternyata di tolak, karena itu ia menggerakkan pemuda Jong Java dan Raden Syamsurijal, bekas ketua Jong Java untuk membentuk Jong Islamieten Bond. Dalam kongres II di Solo tahun 1926 diadakan seminar yang membicarakan Islam dalam hubungannya dengan pandangan dunia, pikiran merdeka serta perkembangan Islam di luar negeri. Dalam kongres III tahun 1927 di Yogyakarta dibicarakan konsep-konsep Islam secara khusus, yaitu tentang cita-cita persatuan, kebangsaan dan tak lupa juga dibicarakan tentang Islam dan sosialisme.

Sampai pada abad ke-20, perkembangan Islam di Indonesia semakin tampak. Kuatnya arus perkembangan Islam ini adalah akibat dari proses menyebarnya gerakan Pan-Islamisme (kebangkitan Islam) yang datang dari Timur Tengah. Melalui gerakan inilah, semangat pembaruan Islam hadir dan mewarnai

pemikiran masyarakat muslim bumiputera yang sebelumnya telah memeluk agama Islam.

Semangat gerakan Pan-Islamisme yang ada di Timur tengah, hadir ke Indonesia dibawa oleh para haji yang datang setelah menunaikan ibadah haji di Mekkah. Dengan demikian, para haji yang telah bermukim di Mekkah menyaksikan betapa pentingnya wacana Islam dan politik internasional. Menjelang pertengahan abad ke-19, jumlah jamaah haji pada dekade 50-60-an mencapai 1600, pada 70-an mencapai 2600 dan pada 80-an mencapai 4600. Jumlah keseluruhan jamaah haji dunia pada tahun 1914 adalah 56.855 dengan 28.427 orang di antaranya merupakan jamaah haji asal Indonesia.

Sekembalinya mereka dari Mekkah, berbagai ilmu diajarkan kepada masyarakat setempat. Pengajaran umumnya dilakukan melalui pesantren. Semakin banyaknya haji yang datang ke kampung halaman, semakin banyak pula pesantren yang berdiri di berbagai daerah di nusantara. Kendati tidak semua haji mendirikan pesantren, akan tetapi haji mendapat posisi sosial yang tinggi sebagai orang yang dianggap saleh.

Bagi para haji yang mendirikan pesantren –umumnya disebut kyai-, mereka menjadi pembimbing bagi para muridnya –santri-. Kyai memiliki peran ganda dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Kyai menjadi pembimbing spiritual, baik bagi para santri maupun bagi masyarakat sekitar.

Pada prosesnya, wacana Pan-Islamisme semakin bersentuhan dalam ranah politik, sebagai upaya untuk memperjuangkan rakyat bumiputera yang tertindas oleh bentuk kolonialisme Belanda. Pada tahap inilah, Pan-Islamisme telah melebur dalam semangat perjuangan pembebasan melalui berbagai bentuk seperti pemberontakan, pergerakan organisasi modern, dan lain-lain.

Sikap-sikap pertentangan yang dilakukan oleh bumiputera terhadap Belanda, pada dasarnya dipengaruhi oleh banyak hal. Sikap sewenang-wenang Belanda terhadap bumiputera, serta yang paling penting adalah, proses kristenisasi. Kristenisasi justru menjadi salah satu program pemerintah kolonial yang saat itu diberlakukan oleh Gubernur Jenderal Idenburg tahun 1909.

Diberlakukanya Kristenisasi di Indonesia adalah sebagai upaya untuk menekan laju perkembangan Islam di Indonesia.

Sebagai upaya untuk menekan laju kristenisasi, para kyai, haji, dan ulama membentuk perkumpulan sebagai wadah persatuan umat Islam bumiputera. Seperti halnya H. Samanhudi, H.O.S Cokroaminoto, H. Agus Salim serta berbagai tokoh lainnya melalui organisasi Sarekat Islam (SI), mereka bergerak bersama bumiputera lainnya melawan bentuk-bentuk kolonialisme serta Kristenisasi yang dilakukan oleh Belanda. SI dalam perjuangannya juga dibantu oleh para tokoh beserta organ Islam lainnya seperti H. Achmad Dahlan dengan Muhammadiyah; K.H Wahab Hasbullah dan K.H Hasyim Asy'ari dengan Tswiful Anwar dan Nahdlatul Ulama (NU), serta berbagai tokoh dan organ Islam lain yang juga mendukung arah perjuangan SI. Selain itu jumlah haji yang bergabung dalam SI mencapai 10% dari keseluruhan anggotanya saat itu.

#### **4.2 Proses Terjadinya Konflik**

Pertumbuhan yang pesat dari Sarekat islam sebagai organisasi massa terbesar, terutama sekali pada masa awal perkembangannya sampai akhir tahun beleasan telah memperlihatkan betapa besarnya kemampuan para pemimpin SI dalam mengorganisir gerak langkah organisasinya.

Bersamaan dengan kemajuan yang dicapai oleh SI, perbedaan pendapat yang menjurus kepada konflik dan sering menyangkut persoalan pribadi mulai melanda para pemimpin Sarekat Islam. Pembahasan dalam sub ini akan menitikberatkan kepada konflik di antara pemimpin Sarekat Islam pada masa-masa awal perkembangan Sarekat islam yang di dalamnya juga memfokuskan pada konflik yang melibatkan Haji Agus Salim dalam kondisi internal organisasi sarekat Islam.

##### **4.2.1 Konflik Masa-Masa Awal**

Sebenarnya konflik di antara pemimpin Sarekat islam itu sudah terjadi jauh sebelum awal-awal masa perkembangan Sarekat Islam dengan pelbagai persoalan yang menjadi penyebabnya, konflik-konflik itu telah terjadi menjadi

intrik politik yang terus mewarnai gerak langkah perjuangan Sarekat Islam di Indonesia.

Konflik yang pertama kali terjadi tahun 1914, yaitu ketika berlangsungnya proses pergantian kepemimpinan dari H. Samanhoedi ke tangan Cokroaminoto. Kelihatannya H. Samanhoedi tidak rela melepaskan kedudukannya. Melalui pengikutnya bernama Mas Marco, yang juga pemimpin surat Kabar *Doenia Bergerak* H. Samanhoedi menumpahkan kekecewaannya. Mas Marco kemudian membawa persoalan itu ke dalam pers, sehingga menimbulkan polemik antara *Doenia Bergerak* dengan surat kabar pimpinan Cokroaminoto *Oetoesan Hindia* akibat dari perselisihan ini adalah terganggunya usaha penyatuan cabang-cabang SI ke dalam CSI.

Dalam tahun 1916 terjadi pertikaian, kali ini menyangkut soal keuangan. Wakil Ketua CSI R. Gunawan dituduh oleh anggota SI bernama Tjipto Mangunkusumo telah menggelapkan uang organisasi untuk kepentingan pribadi. Persoalan ini akhirnya berubah menjadi pertikaian antara R. Gunawan dengan ketua CSI Cokroaminoto. R. Gunawan merasa sakit hati terhadap Cokroaminoto karena ketua CSI itu diam seribu bahasa dalam persoalan ini, apalagi ketika Abdoel Moes menyerang R. Gunawan dalam harian *Kaoem Moeda*.

Konflik yang terjadi di antara pemimpin CSI itu dimanfaatkan oleh H. Samanhoedi untuk memperoleh kembali kedudukan tertingginya dalam Sarekat Islam. Oleh karena itu dalam pertikaian ini, ia mendukung Gunawan. Langkah bersama ditempuh oleh R. Gunawan dan H. Samanhoedi adalah melepaskan SI Jawa Barat yang dipimpin oleh R. Gunawan, yang juga wakil ketua CSI untuk kemudian membentuk CSI tandingan. Usaha ini mendapat dukungan dari SI Sumatera Selatan, SI Jakarta, SI Bogor, SI Sukabumi dan SI Cikalong yang merasa tidak kurang terwakili dalam CSI.

Namun demikian, menurut Koerver, kurang kuatnya pengaruh R. Gunawan terutama di Jawa Barat dan Sumatera, akibat perpecahan itu tidaklah terlalu besar bagi CSI. Tetapi akibat yang pasti adalah digantikannya R. Gunawan dari jabatan Wakil Ketua CSI oleh Abdoel Moes.

Pertikaian selanjutnya di antara pemimpin Sarekat Islam, menyangkut persoalan prinsipil yaitu soal asas atau dasar organisasi. Dalam hal ini, Sarekat Islam cabang Semarang yang telah dikuasai oleh orang-orang komunis seperti Semaun dan Darsono berusaha memasukkan dasar-dasar komunisme ke dalam asa SI. Langkah-langkah golongan Komunis itu oleh para pemimpin CSI, terutama Haji Agus Salim dan Abdoel Moeis dianggap membahayakan kedudukan partai. Oleh karena itu pada tahun 1921, CSI mengambil sikap yang tegas terhadap orang-orang komunis dengan memberlakukan disiplin partai.

Disiplin partai juga dilakukan terhadap organisasi Muhammadiyah. Keputusan ini diambil dalam kongres di Pekalongan tahun 1924. Pertikaian antara Sarekat Islam dan Muhammadiyah timbul sejak tahun 1920 dan berlanjut terus sampai tahun 1929. Persoalan yang menjadi penyebabnya adalah kecaman-kecaman dari pemimpin Muhammadiyah terhadap kelemahan-kelemahan pribadi Cokroaminoto.

Setelah ancaman dari golongan komunis dapat dipatahkan dengan dikelaurkannya disiplin partai, CSI kembali dilanda perpecahan. Abdoel Moeis, wakil ketua CSI yang telah sukses bersama H Agus Salim dalam membersihkan orang-orang komunis dari Sarekat Islam mengundurkan diri. Pengunduran diri Abdoel Moeis dalam tahun 1923 itu disebabkan oleh kekecewaannya terhadap sikap pemimpin-pemimpin Sarekat Islam yang lain, terutama Cokroaminoto yang dirasakannya tidak memperlihatkan dukungan moral bagi kegiatan-kegiatannya. Kedudukan Abdoel Moeis kemudian digantikan oleh H. Agus Salim.

Memasuki periode tahun 1920-an, konflik di antara pemimpin partai Sarekat Islam semakin meluas sehingga terjadi pemecatan-pemecatan, waktu itu terkenal dengan istilah *royeer*. Pemecatan pertama dilakukan terhadap Sukiman dan Surjopranoto kedua tokoh SI ini dianggap telah mencemarkan nama baik Cokroaminoto dalam masalah ketidakberesan keuangan organisasi Persatuan Pegawai Pegadaian Hindia (PPPH). Cokroaminoto merupakan salah satu pengurus pekerja tersebut.

Ketika kongres Sarekat Islam diadakan di Jakarta pada bulan Maret 1923, masalah PPPH ini menjadi salah satu pokok bahasan. Tjoroaminoto dan Salim

menekankan kepada kongres untuk mengeluarkan Sukiman dan Surjopranoto, karena mereka telah menyalahi adat dalam Sarekat Islam.

Pemecatan terhadap Sukiman dan Surjopranoto membawa pengaruh yang luas dalam partai. Banyak cabang yang tidak menyetujui keputusan ini, misalnya cabang Yogyakarta kemudian terpecah dua. Kelompok yang tidak setuju membentuk “PSI Merdeka”. Juga pers Indonesia menyebut keputusan kongres itu dengan nada yang sama agar pimpinan PSI meninjau kembali pemecatan tersebut.

Sehubungan dengan pemecatan tersebut, cabang-cabang yang tidak setuju membentuk sebuah panitia yang bernama Persatuan Islam Indonesia; dengan dasar Islam, Nasionalisme, dan Swadaya. Panitia ini bekerja sama dengan PSI Merdeka di Yogyakarta untuk membentuk organisasi baru yaitu Partai Islam Indonesia (PARTI).

Tebentuknya Partai Islam Indonesia menandai era perpecahan PSI menjadi beberapa partai, perpecahan ini semakin memperlemah kedudukan PSI. Setelah dalam tahun 1920-an mengeluarkan PKI dan Muhammadiyah, kini di antara pemimpin partai sendiri terjadi konflik. Konflik ini terus berlanjut besar-besaran sampai pada pemecatan pemimpin PSI, termasuk haji Agus Salim.

Seperti dikemukakan di awal, struktur pimpinan PSI dibagi menjadi dua, yaitu Dewan partai yang dibentuk oleh Kongres, dan Kedua adalah *Lajnah Tanfidziyah* (Dewan Eksekutif) yang bertanggung jawab kepada Dewan Partai. Pembagian ini dilakukan karena berkurangnya kesehatan Cokroaminoto dan Haji Agus Salim, dua orang yang pada waktu itu tidak dapat digantikan oleh siapapun juga di dalam Partai. Karena mereka tidak mungkin menyelenggarakan kegiatan harian partai, maka kepemimpinan mereka dinaikkan dalam Dewan Partai. Sedangkan kedudukan eksekutif dipegang oleh mereka yang lebih muda.

Ketika Haji Agus Salim memegang tampuk kekuasaan PSI, bahkan ketika masih menjadi wakil ketua PSI mendampingi Cokroaminoto, situasi politik di Hindia Belanda sedang mengalami perubahan-perubahan. Perubahan tersebut dimulai ketika Gubernur Jenderal de Jonge memulai tugasnya di Hindia Belanda tahun 1924 akhir menggantikan de Graff.



Perubahan politik yang dimaksud adalah semakin dibatasinya ruang gerak kehidupan partai, terutama partai yang berhaluan non-kooperasi. Dengan kata lain, pada masa pemerintahan De Jonge unsur-unsur radikal dari pergerakan nasional berusaha untuk dihancurkan. Dengan pembatasan-pembatasan yang ketat, partai politik tidak dapat berbuat banyak. Moh Roem melukiskan situasi partai politik pada pertengahan tahun tersebut sebagai “.... Lemah kekuatannya dan sempit jalannya, bahkan hampir boleh dikatakan hanya tinggal nama saja”.

Partai Sarekat Islam yang masih tetap berpegang pada haluan Non-Kooperasi, tidak bisa terbebas dari bayang-bayang pemerintah yang selalu mengintai gerak dan langkah mereka. Salim sebagai Ketua Dewan Partai melihat bahwa sikap pemerintah yang keras itu semakin lama tidak akan menguntungkan dan sebaliknya akan menghancurkan partai. Oleh karena itu, untuk menyelamatkan partai, pada bulan Maret Salim mengeluarkan pernyataan politik, yang pada waktu itu dikenal sebagai “Pedoman Politik”. Sedangkan dalam kalangan Sarekat Islam sendiri disebut sebagai “Memori Salim”.

Pada intinya pedoman Politik Salim ini menghendaki agar PSI segera melepaskan haluan Non-Kooperasi karena sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi jaman. Pedoman Politik ini kemudian disorongkan pada *Lajnah Tanfidziyah* (LT), yang pada waktu itu dipegang oleh Abiekoesno Tjokrosoeyoso dengan maksud untuk melahirkan sikap yang tegas tentang haluan partai. LT yang didominasi oleh kelompok Abiekosno menolak Pedoman politik itu. Abiekoesno bahkan menuduh Salim berambisi duduk kembali dalam Volksraad engan lebih dahulu ingin mengubah politik non-kooperasi menjadi kooperasi.

Keluarnya Pedoman Politik Salim ini menimbulkan perosalan yang besar dalam kalangan pemimpin PSI. sikap pro dan kontra bermunculan. Apalagi setelah Abiekoesno dengan tegas menolak langkah yang akan diambil oleh Salim itu. Salim menginginkan agar partai segera mengubah haluan kebijakan politiknya, dengan menyarankan diadakan suatu *referendum* dari seluruh cabang. Salim juga menekankan kepada setiap pimpinan Sarekat Islam agar mereka semua berhenti bersama-sama, apabila *referendum* menolak pemikirannya.

Perpecahan di kalangan pimpinan PSI terus berlanjut yang tercermin dalam dua kelompok yang masing-masing mempertahankan sikapnya. Pertama adalah kelompok pimpinan dalam Dewan Partai di bawah pengaruh Salim, AM Sangadjie, Moh Roem dan Sabarin. Kedua kelompok pimpinan *Lajnah Tanfidziyah* (LT) di bawah pengaruh Abiekoesno, Wondoamiseno, dan SM Kartosuwirjo.

Kedua kelompok yang saling bersengketa itu mengadakan suatu pertemuan bersama antara Dewan Partai dan *Lajnah Tanfidziyah* di Jakarta pada tanggal 9-11 Mei. Pertemuan tersebut memustuskan untuk menanggukhan pembahasan mengenai persoalan pedoman politik pada kongres yang akan dating. Sebelum kongres diselenggarakan, Abiekoesno dan sekretarisnya, SM Kartosuwirjo mengundurkan diri dari *Lajnah Tanfidziyah* dan kemudian memimpin PSI cabang Jakarta. Kedudukannya kemudian digantikan oleh AM Sangadji dan Sabirin. Alasan pengunduran diri Abiekoesno adalah katanya, “ia tidak disukai” oleh Salim dan arena itu tidak ingin menjadi penghalang bagi keinginan politik Salim.

#### **4.3 Akhir Konflik**

Proses menjalankan perjuangan di bidang politik, sebagai gerakan nasional yang melepaskan bangsa dari penjajahan belanda, maka tidaklah aneh bila ada kelompok lain yang menyusup kedalam tubuh Sarekat Islam untuk mengacaukan dari dalam. Tahun 1916 semaun dan kawan-kawan melakukan infiltrasi komunisme kedalam tubuh Sarekat Islam. Semaun sendiri sebenarnya pengurus Sarekat Islam cabang Semarang. akan tetapi pada tahun 1920 ia menjadi ketua Partai Komunis Indonesia (PKI) cabang Semarang tentu saja perilaku busuk Semaun sangat mengganggu eksistensi Sarekat Islam. Sebenarnya gerakan komunisme ini telah dirancang sejak tahun 1913 pada saat pertama kalinya Sneevliet datang ke Indonesia (Depdikbud, 1982:62).

Faham komunisme ini masuk ke Indonesia di bawa oleh Sneevliet pada tahun 1913, pada saat ia pertama kali datang ke Jawa, kemudian ia mendirikan Indische Social Democratische Vereeniging ( ISDV) dengan tujuan sebagai alatan

Pada awalnya Sneevliet (1883-1942) tiba di Indonesia sebagai seorang penganut mistik katolik kemudian beralih ke ide-ide sosial demokratis yang revolusioner. Karir selanjutnya bertindak sebagai agen Komintern di Cina dengan nama samaran G. Maring. Pada tahun 1914 kelompok Marxis ini mendirikan ISDV (*Indische Social Democratische Vereeniging*) (Saefullah, 2005:43).

Organisasi Sosial Demokrat Hindia Belanda, di Surabaya. Duduk sebagai pengurus besar ISDV adalah Semaun yang pada saat itu juga sebagai ketua cabang Sarekat Islam di Semarang. Paham ini disebutnya sebagai paham “*Revolusioner Socialitis*”. Lewat organisasi inilah kemudian gagasan-gagasan dan slogan-slogan Marxis diekspor di dalam tubuh SI dengan menginfiltrasi SI diharapkan ISDV dapat menguasai massa. Infiltrasi ini secara formal dibicarakan pada kongres Nasional IV SI tahun 1919 yang sempat menciptakan fiksi dan perpecahan.

Tetapi beberapa cabang telah amat terpengaruh oleh kader radikal sosialisme yang sebenarnya ialah Marxis-leninisme atau komunisme. Fraksi sosialisme ini di pimpin oleh Semaun. Keadaan politik bertambah keruh. Pemerintah Belanda menahan Sneevliet dan ia di buang keluar Indonesia. Ia berangkat ke Moskow 1918. Dalam kongres ke-IV Sarekat Islam, timbul perpecahan secara terang-terangan (tahun 1919).

Pada tanggal 23 Mei 1920 sayap kiri Sarekat Islam dibawah pimpinan Semaun berubah menjadi PKI (Partai Komunis Indonesia), dengan Sarekat Islam cabang Semarang sebagai pusatnya. Semaun dipilih sebagai ketuanya yang pertama, sekalipun pada waktu itu masih tetap sebagai anggota Sarekat Islam. Strategi dasar PKI ialah bagaimana menghancurkan pengaruh tokoh-tokoh Sarekat Islam yang lain dan membawa Sarekat Islam secara keseluruhan melalui infiltrasi kedalam kamp komunis. Pada mulanya anggota PKI juga tetap menjadi anggota Sarekat Islam (Saefullah, 2005:45).

Setelah terbaca gelagat Semaun, segeralah pengurus Sarekat Islam melakukan berbagai langkah untuk menggulangi infiltrasi paham komunisme itu. Paham komunisme yang banyak dipropagandakan di kalangan kaum buruh, mendorong para pengurus Sarekat Islam untuk melakukan konsolidasi di kalangan kaum buruh dengan membentuk Sarekat-Sarekat sekerja yang berazaskan Islam

sebagai perwujudan dari usaha tersebut, pada tahun 1920 dibentuk Vaksentral yang berkedudukan di Yogyakarta, dengan Suryopranoto dan Haji Agus Salim sebagai pimpinannya. Vaksentral tersebut beranggotakan : Sarekat pekerja pabrik gula, Sarekat Pekerja Pegadaian, Sarekat pekerja guru, dan Sarekat pekerjapekerja umum.

Sejak itu tokoh-tokoh Sarekat Islam mulai kritis dan waspada terhadap adanya infiltrasi paham komunisme. Kemudian Sarekat Islam dengan tegas melakukan disiplin partai. Keputusan ini diambil atas usul Agus Salim dan Abdul Muis dalam kongres Central Sarekat Islam kelima di Surabaya pada tahun 1921. Dengan demikian Sarekat Islam sebagai organisasi berhadapan langsung dengan komunisme dan menolak secara tegas paham tersebut (Saefullah, 2005:45).

Ketika Sarekat Islam pada tahun 1921 meberlakukan peraturan baru dalam rangka melaksanakan disiplin organisasi tidak lagi memperbolehkan adanya keanggotaan yang ganda. Akhirnya terjadilah perpecahan yang nyata dalam Sarekat Islam yang selanjutnya mempertegas wajah ke Islamannya. SI kemudian terpecah menjadi dua, yaitu SI Putih (dengan gerakan Pan-Islamisme di bawah pimpinan H. Agus Salim serta Abdul Muis dan dukungan Cokroaminoto.

Sedangkan SI Merah berada di bawah pimpinan Semaoen sejak 1922, setelah ia pulang mengasingkan diri ke Uni Soviet dan mulai membangun kembali serikat-serikat kerja PKI serta meningkatkan pengaruhnya pada cabang-cabang dan sekolah-sekolah SI (Kartodirjo, 1993:35).

Pada tahun 1923, diadakan kongres Sarekat Islam di Madiun. Hasil kongres ini memberikan arah baru Sarekat Islam dengan mengadakan beberapa perubahan. Central Sarekat Islam diputuskan untuk di ubah menjadi Partai Sarekat Islam. Resmilah kini golongan Islam mempunyai wadah, yang berupa partai sebagai alat perjuangannya. Kongres itu juga telah menegaskan pelaksanaan dari disiplin partai terhadap PKI.

Sebagai akibat pelaksanaan dari disiplin partai terhadap PKI itu, maka PKI pun mengambil tindakan balasan. Pada 4 Maret 1923 PKI mengadakan pula kongresnya di Bandung. Kongres itu dihadiri oleh 16 buah cabang PKI dan 14 cabang Sarekat Islam merah. Dalam kongres ini serangan-serangan tajam kepada

Partai Sarekat Islam ( nama baru Sarekat Islam) dilancarkan terutama oleh Semaun. Gerakan PKI pada saat itu memiliki jalinan dekat dengan moskow, sehingga kader-kader mereka memiliki hubungan langsung dengan Stalin hubungan erat antara Semaun dengan Stalin semakin kelihatan kuat tatkala konsekuensi politik ditanggungnya. Tatkala Semaun membuat konvensi pergerakan.



## **BAB 5. PERAN HAJI AGUS SALIM DALAM PENYELESAIAN KONFLIK INTERNAL SAREKAT ISLAM TAHUN 1914-1936**

November 1919 menjadi saat istimewa dalam perjuangan politik Haji Agus Salim. Waktu itu, Haji Agus Salim resmi ditunjuk menjadi Komisaris Central Sarekat Islam (CSI). Setelah empat tahun bergabung, disebut-sebut sebagai baying-bayang dan penasehat Ketua CSI Haji Oemar Said Cokroaminoto, baru hari itu Salim tampil ke depan.

Bukan tanpa maksud bila Cokroaminoto akhirnya memunculkan Salim. Seperti ditulis Takashi Shiraishi dalam bukunya “Zaman Bergerak; Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926”, Salim menjadi amat penting karena Cokroaminoto sedang berhadapan dengan Semaoen, Darsono, dan teman-temannya. Para tokoh Sarekat Islam (SI) Semarang berhaluan komunis itu uturus menerus merongrong kepemimpinan Cokroaminoto.

Rongrongan SI Merah juga membuat hubungan SI dengan Belanda mulai tidak baik. Aksi-aksi yang dilakukan cabang SI di daerah-daerah –tanpa bisa dikontrol CSI- membuat Belanda marah. Belanda mengira sikap Cokroaminoto terhadap pemerintah adalah kooperatif, tetapi cabang-cabang SI (SI afdeeling) malah bersikap sebaliknya. Salim yang diketahui oleh Cokroaminoto dekat dengan beberapa pejabat Hindia Belanda diharaokan bisa menjinakkan sikap tuan-tuan penjajah.

Setidaknya ada 12 komisaris di CSI yang terpilih dalam kongres. Selain Haji Agus Salim, antara lain ada Abiekoesno Tjokrosuejoso, adik Cokroaminoto; Alim Prawirodirjo; dan Semaoen. Salim diberi tugas mengatur serikat buruh. Ketika itu, banyak serikat buruh yang berafiliasi ke SI, tapi kebanyakan berada di bawah kendali atau dekat dengan SI Semarang, yang dipimpin Semaoen dan Darsono. Sebut saja *Vereniging van Spoor-en Tramwegpersoneel* (VSTP), serikat buruh kereta api dan trem; *Indische Social Democratische vereniging* (ISDV), serikat social democrat Hindia; serikat sekerja kehutanan, serikat sekerja pelabuhan; serikat sekerja sopir dan kusir. Serikat-serikat buruh lainnya yang membuat ressa pemerintah Hindia Belanda karena sering melakukan aksi mogok.

Haji Agus Salim punya kedekatan tersendiri dengan serikat buruh. Pada tahun 1930, lama setelah konflik dengan Semaoen selesai, Salim diminta Nederlands Verbond van Vakverenigen menjadi penasehat dalam siding Biro Internasional Perburuhan untuk membicarakan soal penghapusan sanksi kontrak buruh. Dalam pertemuan tersebut, Salim membuat sendiri naskah pidatonya dalam bahasa Prancis.

Kepercayaan Cokroaminoto kepada Haji Agus Salim untuk menghadapi Semaoen terbayar. Keandalan Salim terbukti manakala dia merumuskan gerakan disiplin partai. Anggota SI dilarang merangkap menjadi anggota organisasi lain. Kebijakan itu akhirnya menyingkirkan kelompok komunis dari SI. Semaoen selain menjadi Ketua SI Semarang juga menjadi ketua ISDV. Sejak itu, posisi Salim diantara Elit pimpinan CSI makin kuat. Pada tahun 1921, manakala masa tugas Cokroaminoto di Volksraad berakhir, Salimlah yang ditunjuk menggantikan Cokroaminoto.

Tapi persoalan SI belum selesai. Posisi SI Afdeeling yang cenderung otonom tetap menjadi masalah. Akhirnya, dalam kongres CSI di Madiun pada tanggal 17-23 Februari 1923, SI memutuskan berganti bentuk menjadi Partai Sarekat Islam (PSI). imigrasi ini bukan keputusan tiba-tiba. Beberapa tahun sebelumnya, Salim sudah melontarkan gagasan ini. Alasan dia, dengan berubah menjadi partai, mereka bisa melakukan reorganisasi dan mengetatkan pengawasan terhadap cabang-cabang.

Dalam sub-bab di bawah ini akan dijabarkan mengenai beberapa peran dari Haji Agus Salim dalam menyelesaikan beberapa konflik internal yang menimpa Sarekat Islam dari tahun 1914 sampai dengan tahun 1936.

### **5.1 Posisi Haji Agus Salim sebagai Pemimpin Partai**

Sekitar tahun 1920 Sarekat Islam sudah berkembang menjadi partai massa, tetapi pada waktu itu pula mulai terasa adanya ancaman terhadap asas utama partai itu. Sebagian anggota, terutama yang tergabung dalam SI cabang Semarang, sudah dipengaruhi oleh paham komunis. Paham yang berdasarkan atas serba materialis itu sudah jelas bertentangan dengan Islam yang menjadi asas SI.

Menyadari bahaya itu, dua orang anggota pengurus pusat SI dalam Kongres SI tahun 1921 mengajukan usul agar SI melaksanakan disiplin partai. Usul itu diterima oleh kongres, SI lalu mengeluarkan larangan bagi setiap anggota menjadi anggota organisasi atau partai lain. Anggota-anggota yang sudah dipengaruhi komunisme meninggalkan SI, dengan demikian SI dibersihkan dari faham komunis.

Salah seorang anggota pengurus pusat yang mengajukan usul tersebut ialah Haji Agus Salim. Beliau dilahirkan tanggal 3 Oktober 1884 di Kota Gedang, dekat Bukittinggi, Sumatera Barat. Ayahnya bernama Sutan Muhammad Salim, seorang jaksa kepala yang pernah bertugas di Riau dan Medan. Jabatan ayahnya itulah yang memungkinkannya menempuh pendidikan pada ELS (*Europese Lagere School* = Sekolah Dasar Belanda) dan kemudian dilanjutkan di HBS (*Hogere Burgere School*). Tamat dari HBS Agus Salim tidak bersedia lagi melanjutkan sekolahnya, ia memilih untuk belajar sendiri. Cara itu kemudian dipraktikannya pula terhadap anak-anaknya. Anak-anak Agus Salim tidak dikirim ke sekolah, tetapi diajar sendiri di rumah.

Dari hasil belajar di HBS dan dari belajar sendiri, Agus Salim dapat menguasai beberapa bahasa asing, yakni bahasa-bahasa Belanda, Inggris, Perancis, Jerman, Arab, Turki dan Jepang. Di samping itu beliau juga menguasai bahasa-bahasa daerah Minangkabau, Melayu, Sunda, dan Jawa. Sebelum menceburkan diri dalam kegiatan politik melalui Sarekat Islam, kehidupan Agus Salim memperlihatkan kehidupan seorang yang gelisah. Ia berpindah-pindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain, mula-mula Ia bekerja sebagai penterjemah dan kemudian sebagai pembantu notaris. Sesudah itu beliau merantau ke Indragiri dan Riau, dan akhirnya ke Jedah, Saudi Arabia. Di sini beliau mempelajari Islam secara lebih mendalam, sambil bekerja di kantor konsulat Belanda di kota itu. Mempelajari Islam menyebabkan beliau berkenalan dengan pemikiran-pemikiran tokoh-tokoh modernis Islam seperti Muhammad Abduh dan Jamaludin Al Afghani. Pekerjaannya sebagai pegawai konsulat Belanda, beliau bekerja di kantor konsulat Belanda hanya untuk memenuhi keinginan orang tuanya yang selalu mendesak agar beliau menjadi pegawai



negeri, namun kesempatan itu dimanfaatkan untuk mempelajari seluk-beluk diplomasi internasional yang kelak akan sangat berguna baginya.

Tahun 1911 Agus Salim kembali ke tanah air, untuk beberapa waktu lamanya Ia bekerja pada Burgerlijke Openbare Werken (Pekenaan Umum). Setahun kemudian beliau pulang ke kampung halamannya kota Gedang, dan mendirikan HIS (Holland Inlandse School) yang diasuhnya sampai tahun 1915. Waktu kembali ke Jakarta, beliau bekerja sebagai penterjemah pada “*Indonesische Drukkerij*” dan kemudian sebagai redaksi bahasa pada Balai Pustaka. Dari tempat terakhir ini beliau pindah ke “*Bataviasche Nieuwsblad*”. Sejak saat itu pula beliau mulai rajin menulis artikel.

Karir politik Agus Salim dimulai dalam Sarekat Islam. Perkenalannya dengan SI merupakan cerita tersendiri. Pihak-pihak yang tidak menyenangi SI menyiarkan desas-desus bahwa SI akan melancarkan pemberontakan secara besar-besaran. Pemerintah Hindia Belanda segera mengadakan penyelidikan. Agus Salim yang mempunyai hubungan baik dengan pihak PID (Polisi Politik) mendapat tugas untuk turut serta dalam penyelidikan itu walaupun sejak semula beliau sudah yakin bahwa desas-desus itu tidak didukung oleh kenyataan. Dalam rangka penyelidikan itu beliau berkenalan dengan Haji Umar Said Cokroaminoto ketua SI. Perkenalan ini membawa perubahan dalam sikap Agus Salim. Beliau tertarik dengan perjuangan SI dan langsung menjadi anggotanya. Hubungannya dengan PID diputuskannya sama sekali.

Begitu masuk SI Agus Salim langsung duduk sebagai anggota pengurus pusat, namanya cepat dikenal berkat pemikiran-pemikirannya yang didukung oleh pengetahuannya yang luas mengenai berbagai hal. Dalam tahun 1919, bersama Semaun, beliau mendirikan Persatuan Pergerakan Kaum Buruh. Organisasi ini menuntut kepada Pemerintah Belanda supaya di Indonesia segera didirikan Dewan Perwakilan Rakyat yang sesungguhnya. Agus Salim turut mengorganisir pemogokan buruh di beberapa tempat seperti Semarang, Surabaya dan Cirebon sebagai senjata buruh untuk menuntut kenaikan gaji.

Menyadari perlunya digalang persatuan di kalangan umat Islam. Agus Salim melontarkan gagasan tentang pembentukan Pan Islamisme. Dalam Kongres

Al Islam di Garut tahun 1924 yang diadakan berkat kerjasama antara SI dan Muhammadiyah. Agus Salim menguraikan fungsi agama dan ilmu pengetahuan serta hubungan antara Islam dan sosialisme. Dikatakannya bahwa dalam Islam sebenarnya sudah terkandung unsur-unsur sosialisme, bahkan Islam sudah lebih dahulu mengajarkan sosialisme daripada Marx dan Engels, beliau menganjurkan pula agar para cendekiawan Islam mempelajari ilmu-ilmu sosial, supaya mereka mampu menunjukkan unsur-unsur sosialisme dalam Islam.

Dalam perjuangan politik, pada mulanya Agus Salim menganut aliran kooperasi, yakni mencapai kemerdekaan bangsa melalui kerjasama dengan pemerintah jajahan. Karena itulah antara tahun 1921 – 1924 beliau bersedia duduk dalam Volksraad (Dewan Rakyat) menggantikan Cokroaminoto. Kesempatan ini dipakainya untuk mengecam tindakan-tindakan pemerintah yang banyak menyengsarakan rakyat. Beliau berpidato dalam Volksraad menggunakan bahasa Melayu (Indonesia) dan menuntut agar bahasa ini digunakan sebagai bahasa resmi dalam Volksraad. Lama-kelamaan Agus Salim menyadari bahwa perjuangan dalam Volksraad tidak membawa hasil seperti yang diharapkan. Beliau berpendapat bahwa Volksraad tidak lebih dari sebuah komidi among dan nasib rakyat tidak dapat diperbaiki dengan cara seperti itu. Karena itulah dalam tahun 1924 beliau keluar dari Volksraad dan mulai menganut aliran non-kooperasi, yakni menolak bekerjasama dengan pemerintah jajahan.

Pandangan Agus Salim mengenai nasionalisme dibentangkannya dalam Kongres Luar Biasa Al Islam di Surabaya. Dikatakannya bahwa nasionalisme berdasarkan Islam adalah sama dengan memajukan bangsa berdasarkan Islam. Pernyataan itu disambut Cokroaminoto dengan gerakan tandzim, yaitu gerakan untuk menyusun kehidupan rakyat, baik dalam ekonomi, maupun budaya dengan asas Islam.

Sebagai seorang yang berpengalaman di bidang pers, Agus Salim mengusahakan terbitnya surat kabar yang dapat dijadikan sarana untuk mencurahkan pemikiran politiknya. Bersama dengan Cokroaminoto pada tahun 1925 beliau menerbitkan harian Fajar Asia di Yogyakarta. Di samping itu beliau juga memimpin harian Hindis Baru yang terbit di Jakarta. Berkat tulisan-

tulisannya, namanya semakin dikenal sehingga beliau diangkat menjadi Sekretaris Umum Muktamar Alam Islami Sedunia cabang Hindia Timur (Indonesia) yang diketuai oleh Cokroaminoto dan wakil ketua Wondoamiseno. Namanya dikenal pula di luar negeri Dalam tahun 1929 beliau diangkat menjadi penasehat teknis delegasi Serikat Buruh Negeri Belanda ke konferensi kaum buruh internasional di Jenewa (Swiss). Dalam konferensi ini beliau berpidato dalam bahasa Perancis yang membuat orang kagum atas kemahirannya menggunakan bahasa tersebut, dan sekaligus menaikkan nama Indonesia di luar negeri.

Di kalangan pemuda-pemuda Islam, nama Agus Salim pun cukup dikenal dan disegani, beliau pernah diangkat menjadi penasehat Jong Islamieten Bond (JIB), sebuah organisasi pemuda yang bertujuan memajukan pengetahuan, hidup dan persatuan Islam.

Kedudukan wanita dalam masyarakat tidak pula luput dari perhatian Agus Salim. Beliau menyerukan agar dalam lingkungan wanita Islam diberlakukan emansipasi. Ditegaskannya bahwa wanita dan laki-laki mempunyai hak yang sama. Dalam salah satu kongres JIB beliau membahas masalah kudung dan pemisahan wanita. Dianjurkannya agar dalam rapat-rapat yang dihadiri oleh laki-laki dan wanita, tidak perlu diadakan lagi tabir yang memisahkan kedua golongan tersebut.

Dalam tahun 1930 pergerakan nasional mengalami masa suram. Pemerintah Hindia Belanda menjalankan politik tangan besi. Partai-partai politik ditindas dan pemimpin-pemimpinnya ditangkap atau dibuang. Dalam situasi demikian beberapa partai menempuh taktik kooperasi agar masih bisa bergerak. Agus Salim pun menempuh taktik ini. Setelah Cokroaminoto meninggal, Haji Agus Salim diangkat sebagai ketua Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII). Masalah kooperasi dan non-kooperasi menimbulkan pertentangan dalam PSII. Agus Salim yang berhaluan koperasi meninggalkan partai. Dengan beberapa temannya beliau mendirikan Barisan Penyedar, tetapi organisasi ini tidak berkembang dengan baik.

## 5.2 Haji Agus Salim dan Gerakan Disiplin Partai

Tidak lama setelah bergabung dengan perhimpunan Sarekat Islam pada tahun 1915, Salim menjadi tokoh yang penting dan berpengaruh dalam mengagriskan kebijakan dan strategi perjuangan Sarekat Islam.

Memasuki periode ketiga perkembangan Sarekat Islam, peranan Salim benar-benar menonjol. Menurut Deliar Noer “Haji Agus Salimlah yang lebih banyak memberi cap islam pada SI”, Deliar Noer menambahkan “Salim bukan saja seorang yang mengetahui fikiran-fikiran Barat, tetapi dialah pemimpin SI yang paling mengetahui tentang Islam dari sumbernya”.

Berbeda dengan pemimpin utama SI Cokroaminoto, menurut D.A Rinke, penasehat untuk Bumiputera yang sering mengadakan perjalanan bersama Cokroaminoto menilai “Cokroaminoto lebih merupaka priyayi yang berpaham bebas daripada seorang islam yang fanatic”, sedangkan menurut Koerver, “Cokroaminoto terutama menitikberatkan pada segi politik islam. Agama dianggapnya sebagai sarana pembantu yang penting bagi kesadaran politik rakyat Indonesia”.

Peranan salim yang sangat dominan dan menentukan adalah di dalam hal membersihkan golongan Komunis dari Sarekat Islam. Tindakan pembersihan orang-orang Komunis dari SI terkenal dengan istilah *Partij Discipline*, yang mulai diberlakukan tahun 1921.

Perselisihan antara golongan islam dan komunis dalam Sarekat Islam mulai terjadi sejak 1917. Pada waktu itu diadakan debat terbuka pada tanggal 12 September 1917. Pada waktu itu di Surabaya dalam rangka membicarakan persoalan *Indie Weerbar*. Golongan Komunis bukan saja menolak, akan tetapi juga mengecam pemimpion-pemimpin SI yang bukan komunis. Masih dalam tahun 1917, ketika CSI mengadakan Kongres Nasional yang kedua di Jakarta pada bulan Oktober, golongan Komunis ini sangat menentang partisipasi SI dalam *Volksrad*.

Golongan Komunis terus berusaha untuk melemahkan kedudukan para pemimpin CSI. Pada tahun 1920, golongan komunis melalui Darsono menyatakan ketidakpercayaan terhadap kepemimpinan Cokroaminoto terutama mengenai

persoalan keuangan. Tetapi masalah ini diselesaikan pada Kongres Nasional kelima di Yogyakarta pada bulan Maret 1921. Pada waktu itu Darsono meminta maaf kepada Cokroaminoto, namun menjernihkan masalah, kongres membentuk sebuah komisi penyidik urusan keuangan yang beranggotakan Darsono dari SI Semarang, Said dari SI Malang dan Soeroso dari SI Mojokoerto.

Peristiwa Afdeeling B di Garut tahun 1919 dan kekalahan pemogokan umum buruh PFB (*Personeel Fabrik Bond*) pimpinan Soerjopranoto pada tahun 1920 menjadi sebuah titik balik perjuangan Sarekat Islam (SI) dalam mengatasi konflik yang terjadi di dalam organisasi pergerakan nasional ini. Peristiwa afdeeling B telah menempatkan beberapa pimpinan CSI (*Central Sarekat Islam*) sebagai tersangka termasuk Cokroaminoto. Akibat peristiwa ini beberapa anggota CSI mengusulkan untuk diadakan sebuah disiplin partai. Disiplin partai yang diusulkan pasca peristiwa Afdeeling B adalah mencoba mendisiplinkan SI Lokal agar tidak melakukan aksi-aksi sepihak tanpa sepengetahuan CSI. Sedangkan disiplin partai yang berkembang pasca pemogokan umum PFB dan dimotori oleh kelompok Jogjakarta, Agoes Salim, Abdoel Moeis dan Soerjopranoto adalah menghilangkan unsur-unsur non SI secara tegas. Tujuannya jelas mengeluarkan unsur komunis dan pengaruh mereka yang begitu kuat di tubuh SI dan CSI khususnya, karena di SI para pemimpin komunis menduduki posisi yang penting di dalam kepengurusan CSI dan Persatoean Perserikatan Kaoem Boeroeh (PPKB) atau lebih sering disebut sebagai Vak Sentral.

Pada bulan Oktober 1920 bestuur CSI memutuskan untuk mengadakan kongres guna membahas rencana disiplin partai. Pembicaraan mengenai hal ini telah dilaksanakan pada tanggal 8 Oktober 1920. Abdoel Moeis dalam pertemuan tersebut mengemukakan bahwa perhimpunan tidak mungkin memiliki dua azas. Haji Agus Salim memberikan bukti kegiatan yang melanggar kebenaran dan bermaksud mengubah SI, tetapi tidak secara rinci diterangkan kegiatan apa saja yang melanggar kebenaran dari anggota CSI yang juga anggota komunis. Pertemuan tersebut menghasilkan keputusan untuk mengintrodusir disiplin partai yang akan diteruskan ke Kongres Nasional SI pada tanggal 16 Oktober 1920 di Surabaya. Keputusan mengadakan Kongres Nasional SI pada tanggal tersebut

terlihat terburu-buru karena berjarak hanya dua minggu. Hal ini dapat dimengerti jika melihat bahwa pertemuan Soerjopranoto dan Agoes Salim dengan Gubernur Jendral Van Limburg Stirum dijadwalkan pada 20 Oktober 1920. Hal ini berarti pemberlakuan disiplin partai SI terhadap para anggotanya yang berhaluan komunis merupakan hadiah yang manis bagi Gubernur Jendral.

Sebelum Kongres Nasional SI dilaksanakan, guncangan hebat terjadi di tubuh SI dimana Darsono, propagandis CSI dan anggota SI Semarang melakukan kritik terbuka terhadap pimpinan CSI, Brotosoehardjo dan Cokroaminoto melalui surat kabar Sinar Hindia pada tanggal 6 Oktober 1920. Dalam kritiknya Darsono mengatakan bahwa maksud perhimpunan adalah untuk menolong anggotanya yang dapat menimbulkan kerukunan serta maksudnya masyarakat tertarik terhadap SI bukan hanya karena Islam saja tetapi juga karena tujuan dari perhimpunan tersebut. Darsono juga menunjukkan bahwa SI sekarang tidak bertenaga karena tidak berusaha memperbaiki nasib anggotanya sehingga banyak ditinggalkan anggotanya.

Darsono membandingkan SI dengan *Nationaal Indische Partij-Sarekat Hindia* (NIP-SH) dan *Indische Sociaal Democratische Vereniging* (ISDV/PKI) yang berjuang tanpa slogan Islam tetapi banyak diminati masyarakat, hal ini dikarenakan tujuan dan maksud dari kedua organisasi ini cukup mudah dimengerti oleh rakyat. Masalah keuangan CSI juga menjadi kritik Darsono yang menganggap CSI tidak akan kekurangan uang dengan begitu banyaknya cabang dan anggota tetapi pada kenyataannya CSI tidak mampu menyewa gedung untuk kantornya, sehingga bestuur CSI bekerja di rumahnya masing-masing atau menumpang di kantor Oetoesan Hindia, sehingga tidak dapat berkumpul bersama setiap hari untuk membicarakan hal-hal penting yang berhubungan dengan organisasi.

Darsono juga mengkritik cara kerja dua bestuur CSI yaitu Brotosoehardjo dan Cokroaminoto pada tulisannya yang dimuat Sinar Hindia pada tanggal 7 Oktober 1920. Brotosoehardjo suka berjudi yang diakuinya di depan Darsono dan Cokroaminoto serta disaksikan oleh Alimin di kantor Oetoesan Hindia pada bulan Juli 1920. Selain itu, Brotosoehardjo juga dianggap lalai karena menghilangkan

arsip yang berisi bon-bon uang SI ketika akan menghadiri Vergadering di Jogjakarta, meminta uang kepada SI-SI Lokal dalam vergadering-vergadering yang dihadapinya dengan jumlah yang tidak wajar sehingga banyak SI-SI Lokal yang merasa ketakutan.

Perpecahan di tubuh CSI telah di depan mata dengan adanya disiplin partai dan kritik yang dilontarkan oleh Darsono kepada pengurus CSI. Kritik yang tajam dilontarkan Darsono kepada Cokroaminoto sebagai pimpinan CSI. Kritik yang dimuat di Sinar Hindia, pada tanggal 9 Oktober 1920 ini, Darsono mempermasalahkan mengenai mobil yang dimiliki oleh CSI yang dibeli dengan harga f. 2800,- tidak melalui persetujuan lid bestuur CSI. Antara tahun 1919-1920, CSI kekurangan uang dan mobil milik CSI digadaikan kepada Cokroaminoto seharga f. 2000,-. Perjanjian dalam gadai mobil ini adalah jika dalam waktu delapan bulan mobil tidak diambil oleh CSI maka mobil tersebut menjadi milik Cokroaminoto. Darsono mempertanyakan bagaimana bisa CSI kekurangan uang sedangkan Cokroaminoto bisa meminjamkan uang begitu besar kepada CSI. Pada tanggal 5 September 1920 mobil tersebut telah ditawarkan oleh seseorang seharga f. 3500,- dan Darsono telah mengusulkan untuk menjual mobil tersebut dan hasil penjualan tersebut digunakan untuk membayar hutang kepada Cokroaminoto dan sisanya digunakan untuk membiayai penyewaan kantor CSI agar koordinasi antar pengurus CSI bisa dilakukan lebih intensif di kantor tersebut. Tetapi usulan ini ditolak, sehingga mobil tetap milik Cokroaminoto.

Cokroaminoto juga dianggap boros oleh Darsono karena selalu menghadiri vergadering dengan mobil tersebut, padahal biaya bensin dan perawatan selalu diambilkan dari kas CSI. Beberapa kali diusulkan untuk melakukan perjalanan vergadering menggunakan kereta karena lebih murah. Cokroaminoto juga dapat tidak membayar ongkos kereta karena posisinya sebagai anggota volksraad sehingga dapat menghemat pengeluaran CSI. Tetapi usulan ini pun selalu ditolak. Darsono juga mengambil kutipan dari surat kabar Soerabaiash Handelsblad yang memberitakan bahwa Cokroaminoto telah membelikan mobil baru untuk istri mudanya seharga f. 3000,-. Permasalahan uang lain yang dipermasalahkan oleh Darsono secara terbuka adalah masalah uang derma yang

dikumpulkan untuk menolong korban bencana alam gunung Kelud sejumlah f. 10000,- tetapi diberikan kepada orang yang tidak berhak menerima. Uang derma tersebut dipakai oleh Haji Agus Salim sebesar f. 4500,- untuk perjalanan ke Belanda. Hal ini menurut Darsono sangat tidak pantas karena organisasi selalu berteriak kekurangan uang, sedangkan pengurusnya menghambur-hamburkan uang.

Kritik ini membuat dunia pergerakan nasional tersentak, berbagai tanggapan muncul dari CSI maupun SI-SI Lokal bahkan mendapatkan perhatian yang luas dari organisasi pergerakan lain melalui surat kabar mereka. Surat kabar Persatoean Hindia milik NIP-SH memuat jawaban-jawaban yang berasal dari kedua belah kubu yang bertikai dan memberikan respon yang cukup provokatif yaitu Doenia Sarekat Islam Bergontjang, Komunis Kontra Sarekat Islam pada tulisannya tanggal 20 November 1920.

Cokroaminoto sebagai pihak yang diserang membalas kritik Darsono melalui surat kabar Neratja pada tanggal 18 Oktober 1920 dan juga dimuat oleh Sinar Hindia. Cokroaminoto menjelaskan ia tidak akan membantah dan membalas serangan Darsono sebelum ada izin dari vergadering bestuur CSI, karena menurutnya perlawanannya tidak hanya akan mengenai Darsono saja tetapi akan mengguncang tubuh SI dan Cokroaminoto akan segera menyingkirkan barang yang tercemar dari SI. Cokroaminoto juga meminta mengundurkan Kongres CSI hingga waktu yang belum ditetapkan untuk mengatasi permasalahan dengan Darsono. Barulah pada tanggal 21 Oktober 1920, Cokroaminoto menjelaskan dan membantah tuduhan-tuduhan Darsono terhadap dirinya. Ia mengatakan permasalahan biaya bensin dan perawatan mobil sudah seharusnya ditanggung CSI atau SI-SI Lokal yang dikunjunginya. Pembelian mobil bagi istri mudanya dijelaskan menggunakan uang yang berasal dari uang pribadi istrinya sendiri bukan uang curian ataupun uang organisasi. Mengenai uang derma bencana alam gunung Kelud yang dipakai Agoes Salim telah digunakan oleh CSI untuk keperluan sehari-hari dan akan dilaporkan setelah penanganan bencana alam tersebut selesai.



Kritik dan jawaban kritik bukan mereda bahkan menjalar membuka dendam-dendam politik lama, seperti yang dilakukan oleh Soerjopranoto dengan meminta segera memutuskan hubungan dengan pihak komunis Semarang baik di PPKB (Vak Sentral) maupun di SI dengan alasan bahwa kaum komunis selalu menjadi halangan baik gerakan buruh yang dipimpinnya maupun SI dengan terlalu sering melakukan kritik yang mencela. Dan yang utama adalah mengenai kritik kaum komunis terhadap peristiwa Afdeeling B dan kegagalan pemogokan PFB serta yang terakhir adalah kritik Darsono.

Kaum komunis yang diwakili oleh Semaoen menjawab melalui Sinar Hindia bahwa lontaran Soerjopranoto tidak pada tempatnya, karena konflik antara kaum komunis dan SI tidak ada hubungannya dengan Vak Sentral dan tulisan ini menyebabkan rusaknya persatuan kaum buruh. Dan Ia juga menyesalkan kritik yang dilontarkan oleh Darsono, tetapi kritik tersebut merupakan serangan pribadi Darsono dan bukan berasal dari fraksi Komunis.

Kedudukan Cokroaminoto tetap tidak tergoyahkan walaupun banyak kritik yang dilontarkan. Kongres di Yogyakarta itu mengangkatnya kembali sebagai ketua CSI –seperti yang dilaporkan oleh harian *Nerajta*.

Maksud kritik saudara Darsono menurut paham kita ialah buat membersihkan CSI –oleh karena kritik Cokroaminoto dapat kelapangan menghilangkan cemburu hati dari pihak yang sebelumnya kongres bergoyang-goyang sebagai penyakit dalam pergaulan hidup Hindia. Saudara Cokroaminoto dapat kelapangan itu dan ia sudah menarik faedahnya, sehingga kongres lalu menentukan kepercayaan pada saudara Cokroaminoto (Suradi, 1997:37)

Dalam hal pertentangan dengan golongan komunis, Cokroaminoto lebih mementingkan persoalan persatuan dari perhimpunan sarekat islam serta persoalan kedudukannya sebagai pemimpin. Ia kelihatannya kurang memperhatikan persoalan-persoalan prinsipil, seperti persoalan sesuai tidaknya Komunisme dengan islam ataupun dengan Nasionalisme.

Pemimpin-pemimpin Sarekat islam lain yang bukan komunis terutama Salim dan Moeis memandang masalah yang dipersoalkan sebagai masalah yang sangat prinsipil. Oleh sebab itu mereka memperjuangkan pengeluaran orang-

orang komunis dari Sarekat Islam. Salim sendiri bahkan sejak tahun 1917 menginginkan agar orang-orang komunis itu dikeluarkan dari SI. Menurut Salim;

Adapun suatu kaum yang harus kita jauhkan daripada pergerakan kita, suatu kaum yang hendak menerbitkan perceraian antar bangsa kita, atas kaum pekerja dengan kaum bermodal, kaum itu ialah kaumnya yang ingin membatalkan hak milik, yang memakai nama Sosialis yang dibangun dan dikembangkan dalam negeri ini oleh tuan-tuan Snevliet, Baars dan lain-lain (Suradi, 1997:37)

Masalah disiplin partai mulai dibicarakan pada kongres CSI tahun 1919. Cokroaminoto yang memimpin kongres itu dan seperti dikemukakan dimuka – yang lebih mengutamakan persatuan, menanggukkan masalah disiplin partai itu. Kongres CSI tahun berikutnya juga membahas disiplin partai. Kongres yang tidak dihadiri oleh Cokroaminoto ini, merupakan arena debat antara kelompok Komunis pimpinan Semaun dan kelompok bukan Komunis yang menginginkan disiplin partai di bawah pimpinan H Agus Salim dan Moeis. Keputusan untuk memberlakukan disiplin partai masih ditanggukkan.

Kongres CSI kelima yang diadakan di Jogjakarta pada tanggal 2 sampai 6 Maret 1921 belum juga mengambil keputusan soal disiplin partai. Kongres ini sepakat untuk khusus membicarakan masalah ini pada kongres luar biasa yang direncanakan pada tahun itu juga.

Kongres Luar Biasa, yang merupakan kongres keenam CSI diadakan di Surabaya pada tanggal 6 hingga 11 oktober 1921. Dua masalah besar yang menjadi agenda pokok Kongres Luar Biasa ini adalah; pertama masalah disiplin partai, dan kedua, masalah penyusunan kembali asa SI. Pada waktu kongres berlangsung, Cokroaminoto dalam tahanan/ sehingga kongres sepenuhnya oleh H Agus Salim dan Abdoel Moeis ketika sampai pada bahasan paling alot yaitu disiplin partai, Salim Berkata;

Keberhasilan itulah yang dituju dengan mengadakan keterangan asas yang terang dan jelas disertai pula dengan aturan *Patrij Discipline*, yang maksudnya bahwa orang yang masuk SI tidak boleh menjadi *lid* perkumpulan atau partai politik yang lain. Hanyalah orang yang tetap haluannya dan sungguh-sungguh menerima dan menyetujui asa itu, hanya orang begitulah yang boleh diharapkan setia dan bersungguh-

sungguh menerima dan menyetujui asas itu. Hanya orang begitulah yang boleh diharapkan setia dan bersung-sungguh hati menyokong pergerakan SI. Dan atau berusaha untuk mengikhtiyarkan dan menyampaikan maksud-maksud SI.

Istimewa pula hanyalah pemimpin yang mencakup syarat-syarat itulah yang boleh diharapkan memajukan pergerakan SI, karena SI belaka dengan tidak bermaksud tersembunyi akan mempergunakan kekuatan SI untuk bermaksud keperluan partai lain (Suradi, 1997:39)

Untuk meyakinkan kongres Salim mengemukakan alasan-alasan perlunya disiplin partai;

Tiap-tiap diluar Si telah menentukan *Partij Discipline* lebih dulu untuk partainya. Dari pada hal itu ternyata, bahwa memang segala partai telah mengerti, kebersihan asas menjadi syarat yang penting bagi tiap-tiap pergerakan

Selain itu, dari itu asas perhimpunan yang satu tidak bisa sejalan betul asas itu serupa tentu tidak aka nada dua atau lebih perhimpunan (Suradi, 1997:39)

Selanjutnya salim mengemukakan bahwa tindakan disiplin partai haruslah segera diambil terhadap PKI, karena hal ini sangat perlu untuk menegakkan dasar partai itu sendiri, yaitu islam. Salim berkeyakinan bahwa;

Tidak perlu mencari isme-isme yang lain akan mengobati penyakit pergerakan. Obatnya ada di dalam dasarnya sendiri, asas yang lama dan kekal, yang tidak dapat dimubahkan orang, sungguhpun sedunia telah memusuhi permusahan lain atau takdzim. Asas itu ialah islam (Suradi, 1997:39).

Dari sumber ajaran islam yang utama yaitu, kitab suci Alquran, salim mengutip salah satu ayat yang berhubungan dengan masalah ini;

Kitab Islam yang bernama alquran itu, yang mengandung teguran dan ajaran, peringatan dan pertunjukan bagi segala manusia dalam dunia tidak kurang mengandung nasehat menyuruh berserikat bertolong-tolongan dalam segala pekerjaan kebijakan.

Akan tetapi dalam alquran itu adalah terkandung perintah yang melarangnya kita bersaudara, yakni berikatan lahir bathin dengan orang yang tidak sama keyakinan dengan kita. Menurut ayat itu adalah mereka itu selalu hendak mengeluarkan kita dan bahwa mereka itu suka apabila kita menderita bencana (Suradi, 1997:39).

Menanggapi putusan yang segera akan dijatuhkan kongres luar biasa CSI, golongan Komunis dibawah pimpinan Semaun dengan keras menolak peraturan Disiplin partai. Semaun mengemukakan argumentasinya;

Adapun pergerakan rakyat hendak membela hak-hak rakyat yang terinjak-injak, selainnya dari mengutamakan hal perasaan, harus pula mengutamakan taktik, SI telah nyata hanya bisa mengumpulkan orang Islam saja buat bekerja bersama-sama membela hak rakyat.

Tapi selamanya hak rakyat Islam, masih banyak lagi orang lain yang tidak beragama islam. Perkumpulan kaum *Coomunisten* yaitu PKI, sudah nyata bisa membawa orang-orang Ambon, Manado dan lain-lain rakyat Hindia yang tidak beragama Islam. Bilangan mereka tidak sedikit pengaruhnya harus pula dihargakan. Disini PKI sudah membuktikan taktiknya, bekerja dengan orang Islam, Kristen guna keperluan rakyat (Suradi, 1997:40).

Semaun menambahkan, “atas usaha-usaha orang-orang Komunislah sifat-sifat Kapitalis dalam SI telah dihilangkan –sehingga SI menjadi partai rakyat”. Dengan alasan-alasan ini, pada akhir pidatonya, Semaun mengharapkan agar Kongres tidak mengambil keputusan disiplin partai terhadap PKI;

Kalau SI menguatkan *Partij Discipline*, baiklah, hanya kekecualikanlah *Partij Discipline* itu terhadap kepada kaum *Communisten*, dan PKI, karena kaum PKI bisa bekerja bersama-sama dengan SI guna keperluan pihak yang tertindas (Suradi, 1997:40).

Semua argumentasi dan pembelaan Semaun dapat dipatahkan oleh Salim dan Moeis. Dalam Kongres Luar Biasa CSI ini, Salim telah menunjukkan dirinya sebagai pemimpin Islam dari sumber aslinya –tetapi juga menguasai pemikiran-pemikiran Barat seperti Komunisme, sehingga argumentasi-argumentasi Salim dalam perdebatan dengan golongan Komunis sangat tajam. Kongres akhirnya mensahkan keputusan disiplin partai, dengan perbandingan suara 23 lawan 7 suara. Dengan demikian, sejak Kongres Luar Biasa CSI tahun 1921 itu golongan Komunis dikeluarkan dari Sarekat islam.

Seperti telah dikemukakan di muka, bahwa peranan Salim yang khas dalam Sarekat islam adalah di dalam memberi warna islam pada SI. Usaha itu dilakukan Salim beberapa tahun sejak ia bergabung dengan Sarekat Islam. Dimulai sejak

Kongres Tahun 1919, Salim telah merumuskan arah dan tujuan SI dengan menyusun rancangan keterangan Asas (*Beginsel Verklaring*) bagi Sarekat Islam yang kemudian disahkan dalam Kongres Luar Biasa CSI tahun 1921.

Keterangan Asas hasil pemikiran Salim ini merupakan penegasan kembali dasar perjuangan Islam yang tercantum dari keterangan Asas tahun 1917 yang disusun oleh Cokroaminoto. Salim menjelaskan kedudukan Islam lebih luas di dalam keterangan Asas. Menurut Salim, Islam merupakan satu-satunya alternatif bagi perubahan masyarakat Hindia. Bagian keempat dari Keterangan Asas ini menyebutkan;

Syahdan pada keyakinan kaum Sarekat Islam, kemerdekaan rakyat Hindia ini yang sejatinya, yaitu yang sesungguhnya melepaskan segala rakyat dari perhambaan macam apapun juga, ialah dengan jalan kemerdekaan yang berasaskan keislaman (Suradi, 1997:40).

Untuk mencapai tujuan kemerdekaan rakyat Hindia itu, selanjutnya disebutkan "... Perlulah rakyat Hindia beroleh hak-hak politik, yang membukakan jalan kepadanya akan melakukan kekuasaan atas pengaruh atas urusan negerinya".

Gerakan disiplin partai yang digulirkan oleh Haji Agus Salim dalam Kongres Sarekat Islam berhasil menyingkirkan beberapa tokoh yang memiliki dualisme keanggotaan, terutama yang berhaluan komunis. Acuan disiplin partai yang diajukan oleh Haji Agus Salim dilakukan untuk menyelamatkan Sarekat Islam agar tidak menjadi bulan-bulan oleh pemerintah Hindia Belanda ataupun semakin hancur karena rongrongan ideology Komunisme.

### **5.3 Haji Agus Salim dan Gerakan Politik Hijrah**

Di zaman penjajahan, ada perkumpulan yang bersikap non-kooperatif dan ada perkumpulan yang bersikap kooperatif terhadap pemerintah Hindia- Belanda (Hardi, 2003:127). Perkumpulan yang bersikap non tidak mau bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda sedangkan yang bersikap ko menganggap adanya manfaat untuk bekerjasama dengan pemerintah kolonial. Tahun 1923 Agus Salim membawa partai Sarekat Islam dalam jalur non-kooperatif. Awalnya,

menurut Haji Agus Salim antara non-kooperatif, swadeshi, dan politik hijrah adalah sama ketika ia berkata bahwa swadeshi akan menghasilkan non-kooperatif (Noer, 1996:160). Tapi kemudian Agus juga mengatakan “bahwa faham non-kooperasi dalam partai Sarekat Islam diganti dengan faham hijrah.”

Maksud dari pergerakan Haji Agus Salim itu adalah dirubahnya sikap menolak kerjasama dengan pihak asing diganti menjadi “bekerjasama menyusun diri, menyebuahkan suara dan mempersatukan buatan di dalam kalangan sendiri pada seluruh padang kehidupan pergaulan: sosial, ekonomi, dan politik. Dalam tahun 1925 Partai Sarekat Islam mempertegas politik Hijrahnya dalam kongres Sarekat Islam, berpendapat tidak ada gunanya untuk mengajukan mosi apapun juga terhadap pemerintah (Noer, 1996:160).

Kebijakan ini ditekankan kembali pada tahun 1925, ketika pemerintah sebagai akibat dari tindakan penghematannya sehubungan dengan zaman krisis ekonomi mengeluarkan banyak pejabat-pejabat dan pegawai-pegawainya. Peningkatan pengangguran ini dalam tahun-tahun ini menyebabkan pemimpin-pemimpin Sarekat Islam menunjuk kepada perlunya Hijrah dalam ekonomi dan politik. Demikianlah Swadeshi lagi-lagi ditekankan oleh pemimpin-pemimpin tersebut, tetapi perlu dikemukakan dalam hubungan ini bahwa partai tidak melihat Swadeshi sebagai alat ampuh dalam menghadapi kapital asing. Pemimpin-pemimpin Sarekat Islam mengakui kegunaanya di dalam bidang politik oleh sebab membantu memelihara semangat nasional, dan membantu membangunkan kehendak untuk mengadakan perusahaan nasional dengan pengharapan supaya sedikit-sedikit bisa mempunyai kapital bumi putra yang hidup. Dalam rangka inilah partai menyusun program krisis dan agrariannya dalam tahun 1925 (Noer, 1996:161).

Swadeshi sebenarnya adalah ajaran-ajaran agama Mahatma Ghandi dalam perjuangannya di India. Swadeshi merupakan pemboikotan pada barang-barang Inggris, segala tanda kehormatan Inggris, sekolah Inggris, dan pekerjaan Inggris. Penerapan politik Swadeshi ini juga mendapat kritikan dari beberapa tokoh, misal Soekarno yang beranggapan bahwa politik Swadeshi tidak cocok bila diterapkan di Indonesia, dikarenakan perbedaan masyarakatnya. Masyarakat India sudah

mengenal bangku sekolah sejak lama, jadi sangat wajar bila mereka sudah memiliki masyarakat industri yang harus dipertimbangkan oleh pihak penjajah, Inggris.

Berbeda dengan masyarakat Indonesia yang dimasa itu hanya 7% dari masyarakat Pribumi yang mampu baca tulis (Muljana, 2001:156). Pendidikan di Indonesia baru diterapkan pada masa politik etis, itupun hanya dikalangan para bangsawan, dan orang-orang kota di dalam lembaga pemerintahan atau perusahaan. Masyarakat pribumi hanya berperan sebagai buruh dan bila mereka mempunyai kualitas lebih baik akan menduduki pegawai tingkat rendah. Dan suatu lembaga atau industri lebih dikuasai oleh orang-orang Belanda, sedangkan perdagangan lebih dikuasai oleh orang Cina. Berbeda dengan Natsir dia beranggapan bahwa Partai Sarekat Islam mampu mengikat masyarakat bawah, yaitu para petani dan kaum buruh dalam pergerakan Nasional.

Periode antara awal 1923 sampai dengan pertengahan 1925 tidak hanya ditandai oleh perpecahan gerakan nasionalis serta kegagalan usaha pengintegrasian organisasi-organisasi nasionalis. Gubernur Jendral de Jonge tidak tanggung-tanggung secara konsekuen menjalankan politik “purifikasi” atau “pemurnian”, artinya penumpasan segala kecenderungan ke arah radikalisasi dengan agitasi massa dan semua bentuk nonkooperasi (Kartodirjo, 1992:176). Sementara itu, krisis PSII makin menghebat pada tahun 1924, partai Sarekat Islam cabang Sumatra Barat dilarang pemerintah untuk mengadakan rapat.

Program-program tersebut berpusat pada gerakan-gerakan tani dan Serikat buruh tetapi dalam bulan maret 1925 Haji Agus Salim sebagai ketua dari Dewan partai meminta kepada *Lajnah Tanfidziyah* untuk meneliti kembali politik hijrah sehubungan dengan keluarnya peraturan-peraturan yang lebih ketat oleh pemerintah pada tahun tersebut untuk menghadapi kegiatan partai politik yang bersifat non-kooperatif. Haji Agus Salim berpendapat bahwa oleh peraturan ini partai mungkin akan menjadi lumpuh dan oleh sebab itu Agus Salim mengemukakan perlunya meninggalkan politik Hijrah dan perlunya menjalankan politik kooperasi, pada akhirnya golongan kooperasi meninggalkan PSII, dan membentuk partai Barisan penyadar PSII. Abikusuno dan kawan-kawannya

merasa perlu untuk membenarkan tindakan mereka terhadap anggota-anggota partai. Demikianlah pada bulan April dan Mei 1925 diadakan rapat dari cabang-cabang partai, dimana pembenaran ini dijelaskan oleh pemimpin-pemimpin dari pusat partai. Sesuai hasil dari rapat akhirnya Haji Agus Salim dikeluarkan. Sekitar masa itu pulalah sebuah publikasi khas tentang Hijrah, berupa brosur yang terdiri dari dua jilid, menampakkan diri. Brosur ini dikarang oleh SM. Kartosuwirjo tanpa lebih dahulu membicarakan isinya pada Abikusno.

Setelah menjelaskan arti jihad (perang dalam pengertian yang bukan terbatas semata-mata pada pengertian fisik saja), jihad ditafsirkan sebagai usaha bersungguh-sungguh, usaha bersungguh-sungguh pada jalan Allah, pada jalan kebenaran dan pada jalan kenyataan dan ditujukan kepada jalan kebaikan, juga keinginan bersungguh-sungguh, maka yang bersungguh-sungguh yang berwujud persediaan, atau perjanjian atau kelengkapan dengan harta benda maupun dengan jiwa manusia, juga perbuatan yang berupa amal kebajikan atau amal soleh sekuat-kuat memberi keterangan-keterangan yang nyata memeriksa, memperhatikan, dan memikirkan dengan sungguh-sungguh, hati-hati dan teliti (Noer, 1996:165).

Jihad bukan berarti perang melainkan usaha bersungguh-sungguh yang berupa persediaan, persajian, atau kelengkapan, pada jalan Allah yang menuju ke arah kebenaran dan kenyataan, sepanjang ajaran agama Islam, jadi jihad dilihat sama dengan Hijrah. Brosur itu mengatakan bahwa Sarekat Islam melaksanakannya dengan menjadikan dirinya sebagai pusat latihan bagi orang-orang Islam dalam mempersiapkan diri pada suatu masa di depan, ketika mana mereka itu akan dipercayai untuk memimpin pemerintahan. Untuk keperluan ini persatuan segenap orang Islam di Indonesia serta juga di dunia pada umumnya dirasakan sebagai suatu keperluan. Partai, demikian dikatakan oleh Brosur itu seterusnya, tidak menginginkan untuk turut serta dalam dewan-dewan yang didirikan oleh pemerintah Belanda, tetapi ia bersedia untuk memprotes segenap tindakan hukum atau ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah Belanda, yang merusak bagi negeri ataupun bagi bangsa. Dalam rangka ini lagi-lagi masalah hijrah dan non-kooperasi dibedakan. Hijrah dilihat sebagai aksi yang positif, sebagai suatu usaha untuk membina kemampuan diri.



Brosur yang dikeluarkan oleh Haji Agus Salim tidak membicarakan ini sama sekali oleh karena sebab dikatakannya “ini tidak berharga sedikitpun”. Memikirkan saja tentang masalah kooperasi atau non-kooperasi dengan pemerintah, kata brosur itu lebih lanjut, “sudah menimbulkan rugi, karena meninggalkan wajib”. Tetapi, walaupun segala macam penegasan dikemukakan tentang masalah politik Hijrah ini, masalah tersebut tidak juga terselesaikan. Pengarang dari kedua brosur itu, S.M. Kartosuwirjo, dipecat pada tahun 1925 (Noer, 1996:165). Dengan adanya segala macam pemecatan dalam tahun 1925-an itu dapat difahami betapa Sarekat Islam menjadi sangat lemah. Ini terjadi dalam akhir periode menjelang berakhirnya pemerintah Hindia Belanda.

Berdasarkan sikap bangsa Belanda yang angkuh dan ditambah pula oleh kemiskinan yang disebabkan oleh malaise yang menghebat sejak tahun 1925 hubungan antara bangsa Indonesia dengan Belanda sangat renggang. Ketika pada tahun 1939 perang Dunia II itu pecah, rakyat Indonesia hanya mau membantu Belanda asal saja ada jaminan, bahwa akan diadakan pembaharuan dalam ketatanegaraan, seperti tuntutan supaya Dewan rakyat diganti bentuknya menjadi parlemen yang minta pertanggung jawaban dari Gubernur Jendral tentang jalannya pemerintahan di Indonesia. Permintaan ini yang dijalankan oleh aksi Indonesia berparlemen dibawah pimpinan Gapi ditolak pula dengan alasan bahwa dalam waktu genting meruncing itu, tidak pada tempatnya untuk mengadakan perubahan tata negara (Wirjosuparto, 1996:112).

Keadaan di Indonesia sedemikian gentingnya disebabkan oleh meletusnya Perang Pasifik pada akhir tahun 1941. Untuk dapat bantuan dari bangsa Indonesia, pada tahun 1942 Ratu Wilhelmina sekali lagi memberi janji tentang pembaharuan-pembaharuan dalam susunan pemerintahan di Indonesia. Dengan cara mendekati orang-orang pemimpin Indonesia yang telah diasingkan, Belanda mencoba menggalang jalan kerjasama, Ir. Soekarno menolak.

## BAB 7. PENUTUP

### 7.1 Simpulan

Berdasarkan uraian dalam penelitian ini, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagaimana berikut ini:

Latarbelakang munculnya konflik dalam tubuh Sarekat Islam adalah karena faktor perbedaan ideology yang dianut oleh Anggota Sarekat Islam ataupun Ideologi Organisasi Sarekat Islam, dimana pengaruh Sosialisme Komunis sudah menjalar dan menggerogoti cabang Sarekat Islam (SI) Semarang dibawah kepemimpinan Semaon. Sedangkan ideology Sarekat Islam berlandaskan islam yang akhirnya berdampak pada pemecatan terhadap sejumlah anggota partai yang memiliki dualism keanggotaan dan yang dianggap sebagai afiliasi dari komunisme.

Peran Haji Agus Salim dalam menyelesaikan konflik internal Sarekat Islam sejak tahun 1914 sampai dengan tahun 1936 adalah dengan melakukan berbagai macam hal, yaitu terkait konflik dualism keanggotaan dan paham komunisme Haji Agus Salim melakukan tindakan disiplin partai dengan memberikan ketegasan pemilihan antara menjadi anggota Sarekat Islam atau memilih keluar dengan mengikuti Komunisme. Sedangkan untuk konflik antar pemimpin yang terjadi di tubuh Sarekat Islam, hal yang dilakukan oleh Haji Agus Salim adalah dengan melakukan gerakan penyadar terhadap Sarekat Islam yang dianggap sudah mulai melenceng dari gerbong yang sudah ditata dari awal pendiriannya.

Dampak yang diakibatkan dari peran serta Haji Agus Salim dalam menyelesaikan konflik internal Sarekat Islam berupa terjadinya pemecatan terhadap beberapa pendukung Haji Agus Salim yang tergabung dalam Gerakan Penyadar, selain itu Haji Agus Salim akhirnya dikeluarkan dari PSII dalam kongres karena dianggap sudah tidak sejalan lagi dalam perjuangan Sarekat Islam. Selain itu, terjadinya perpecahan dalam tubuh Sarekat Islam dengan banyaknya anggota yang keluar dan mendirikan partai baru, salah satunya adalah Partai Komunis Indonesia (PKI), PSII Merdeka, Gerakan Penyadar, dan lain sebagainya.

## 7.2 Saran

Ada beberapa saran yang akan penulis berikan kepada para pembaca, di antaranya :

- 1) Kepada para Mahasiswa calon guru sejarah, Penelitian ini diharapkan dapat mengasah dan memahami secara mendalam mengenai Peran Haji Agus Salim dalam Konflik Internal Sarekat Islam Tahun 1914-1924.
- 2) Kepada almamater, hendaknya memberikan peluang bagi mahasiswa untuk mengadakan penelitian, terutama yang berada di wilayah sendiri, sehingga akan membawa dampak terhadap rasa cinta tanah air, bangsa dan negara.
- 3) Bagi pembaca, dapat menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai Peran Haji Agus Salim dalam Konflik Internal Sarekat Islam Tahun 1914-1924, dan dapat mengambil nilia-nilai tauladan dan rasa nasionalisme yang dicontohkan dari para pejuang kemerdekaan Indonesia, baik dalam hal politik, hambatan, perjuangan, dan kepemimpinannya.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdurahman, D. 1999. *Metode Penelitian Sejarah*, Jakarta: Logos Wacana
- Abdurahman, D. 2003. *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Kurnia Islam Semesta, 2003.
- Ahmadi, A. 1982. *Psikologi Sosial*. Surabaya: PT. Bina Ilmu,
- Almond, A. G. 1984. *Budaya Politik, Tingkah Laku Politik dan Demokrasi Politik di Lima Negara*. Jakarta: Bina Aksara.
- Amelz. 1952. *H.O.S. Cokroaminoto: Sejarah Hidup dan Perjuangannya*. Jilid I dan II. Jakarta: Bulan Bintang.
- Amin, M. 1996. *Syarikat Islam; Obor Kbenagkitan Islam*. Jakarta: Pena Jaya
- Awwas, Irfan S. 2008. *Jejak Jihad S. M. Kartosuwiryo*, Yogyakarta: Darul Uswah.
- Benda, Harry J. 1980. *Bulan Sabit dan Matahari Terbit: Islam Indonesia Pasa Masa Pendudukan Jepang*, Jakarta: Pustaka Jaya.
- Bilton, Tony, Kevin Bonnet, Philip Jones, Michelle Stanworth, Ken Sheard, dan Andrew Webster. 1981. *Introductory Sociology*. Hong Kong: The Macmillan Press, Ltd.,
- Budiardjo, M. 2005. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Dengel, Holk H. 1995. *Darul Islam dan Kartosuwirjo: Langkah Perwujudan dan Angan-angan Yang Hilang*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Djaelani, Abdul Qadir. 1994. *Peran Ulama dan Santri dalam Perjuangan Politik Islam Indonesia*, Surabaya, PT. Bina Ilmu.
- Djoened, Marwati Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto. 1993. *Sejarah Nasional Indonesia*, Jilid V. Jakarta: Balai Pustaka.
- Duverger, M. 1998. *Sosiologi Politik*. Surabaya: Charta Politika Pers
- Farley, John E., 1992. *Sociology*. New Jersey: Prentice Hall,
- Fathurrahman, Deden dan Wawan Sabri. 2002. *Pengantar Ilmu Politik*, Malang: UMM Press.
- Gani, A. 1984. *Cita Dasar dan Pola Perjuangan Syarikat Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Gratia dan Septiani, 2014. *Politi; Definisi dan Sistem Politik*. Jakarta: Grafity Jaya

- Hendropuspito, D., OC. 1989. *Sosiologi Sistematis*. Yogyakarta: Kanisius,
- Heywood, A. 2014. *Politik*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Horton, Paul B., dan Chester L. Hunt. 1993. *Sosiologi*, Jilid 1 Edisi Keenam, (Alih Bahasa: Aminuddin Ram, Tita Sobari). Jakarta: Erlangga,
- Hutami, dan Chariri. 2011. *Sosiologi Politik; Suatu Pengantar*. Jakarta: Aksara Pinus Media.
- Karim, M. Abdul. 2005. *Islam dan Kemerdekaan Indonesia: Membongkar Marjinalisasi Peranan Islam dalam Perjuangan Kemerdekaan RI*, Yogyakarta: Sumbangsih Press.
- Kartodirjo, S. 1999. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional dari Kolonialisme sampai Nasionalisme*. Jilid II, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Korver, A. P. E. 1985. *Sarekat Dagang Islam; Gerakan Ratu Adil ?*. Jakarta: Grafity Pers.
- Kuntowijoyo. 2001. *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya.
- Kutojo, S. 1978. *Riwayat Hidup dan Perjuangan Haji Agus Salim*, Jakarta: Mutiara.
- Larson, George D. 1990. *Masa Menjelang Revolusi: Kraton dan Kehidupan Politik di Surakarta 1912-1942*, Yogyakarta: Gamapress.
- Martha, Ahmaddani G. 1985. *Pemuda Indonesia: Dalam Dimensi Sejarah Perjuangan Bangsa*, Jakarta: Kurnia Esa.
- Materu, Mohammad Sidkly Daeng. 1985 *Sejarah Pergerakan Bangsa Indonesia* Jakarta: Gunung Agung.
- Miriam, B. 2007. *Politik, Suatu Pengantar*. Surabaya: Tinta Press
- Mukayat. 1985. *Haji Agus Salim: Karya dan Pengabdiaannya*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Muljana, S. 2008. *Kesadaran Nasional dari Kolonialisme Sampai Kemerdekaan*, Yogyakarta: LKiS.
- Nasihin. 2012 *Sarekat Islam Mencari Ideologi 1924-1945*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Niel, Robert Van. 1984. *Munculnya Elite Modern Indonesia*, Terj. Zahara Deliar Noer, Jakarta: Pustaka Jaya.
- Noer, D. 1996. *Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942*, Jakarta: LP3IS.

- Panitia Buku Peringatan. 1996. *Seratus Tahun Haji Agus Salim*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Prasetyo, 2004: *Haji Agus Salim dan Sarekat Islam*. Bandung: Pustaka Jaya Abadi.
- Pringgodigdo, A.A. 1986. *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*, Jakarta: Dian Rakyat.
- Ricklefs, M.C. 2005. *Sejarah Indonesia Modern*, Terj. Darmono Hardjowidjono, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Roem, M. 1995. *Djedjak Langkah Haji Agus Salim*, Jakarta: Tinta Mas.
- Sagimun. 1986. *Perlawanan dan Pengasingan Pejuang Pergerakan Nasional*, Jakarta: PT. Inti Idayu Press.
- Salam, S. 1961. *Haji Agus Salim: Hidup dan Perjuangannya*, Jakarta: Penerbit Djajamurni.
- Seta, B. 2005. *Politik dan Perpolitikan Bangsa Indonesia*. Jakarta: Media Group
- Setyawan, D. 2014. *Haji Agus Salim: The Grand Old Man*, Bandar Lampung: Indepth Publishing.
- Shiraishi, T. 1997. *Zaman Bergerak Radikalisme Rakyat di Jawa, 1912- 1926*, terj. Hilmar Farid, Jakarta: Pustaka Grafiti.
- Sitorus, L. M. 1951. *Sejarah Pergerakan dan Kemerdekaan Indonesia*, Dian Rakyat.
- Soewarsono. 2000. *Berbareng Bergerak: Sepenggal Riwayat dan Pemikiran Semaun*, Yogyakarta: LKiS.
- Sudiyo. 1984. *Pergerakan Nasional Mencapai dan Mempertahankan Kemerdekaan*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Suhartono. 1994. *Sejarah Pergerakan Nasional: dari Budi Utomo Sampai Proklamasi 1908-1945*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suhatno. 1995. *Tokoh-Tokoh Pemikir Paham Kebangsaan: Haji Agus Salim dan Mohammad Husni Thamrin*, Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional.
- Sulastro (ed). 2004. *Haji Agus Salim (1884-1954) Tentang Perang, Jihad, dan Pluralisme*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Suminto, A. 1985. *Politik Islam Hindia Belanda*, Jakarta: LP3ES.
- Suradi. 2014. *Grand Old Man of Republic*, Yogyakarta: Mata Padi Presindo.

Surbakti, R. 1992. *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.

Suryanegara, A. M. 1996. *Menemukan Sejarah: Wacana Pergerakan Islam Indonesia*, Bandung: Mizan.

Yatim, 1999. *Kaum Terpelajar dalam Pergerakan Nasional*. Bandung: Pustaka Jaya Abadi.

### **SKRIPSI.**

Iman, Nur. 2006. “*Pemikiran Haji Agus Salim Tentang Islam*”. Skripsi. Tidak Diterbitkan. Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang.

Muhibin, M. 2009. “*Politik Hijrah*” *Perjuangan Partai Sarekat Islam Indonesia Dalam Melawan Pemerintahan Kolonial Belanda tahun 1923-1940*”, Skripsi. Tidak Diterbitkan. Fakultas Adab dan Ilmu Budaya, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

